

**PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN PASIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN PASIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh:
Sri Rahayu
Laila Nagib
Sumono
Devi Asiati



LIPI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

© 2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan*

Katalog dalam Terbitan

Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja di
Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur / Sri Rahayu, Laila Nagib,
Sumono, Devi Asiati. – Jakarta : LIPI Press, 2007
xi+ 148 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-142-5

1. Perkebunan kelapa sawit

3. Tenaga kerja

331

Desain cover dan Layout Isi : Puji Hartana

Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp. : (021) 5207205, 5225711, 5251542
Fax. : (021) 5207205
E-mail : ppk-lipi@rad.net.id

ABSTRAK

Tulisan Ini bermaksud mengkaji tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menganalisis penyerapan tenaga kerja sejalan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kabupaten Pasir pada khususnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap pekerja di Perkebunan kelapa sawit, khususnya terhadap petani plasma kelapa sawit pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN) di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro.

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur mulai berkembang sejak tahun 1982/ 1983 dengan pola PIR-BUN, oleh PT Perkebunan Nusantara XIII. Sebagai sektor unggulan dan prioritas bagi perekonomian di Kabupaten Pasir, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama sejak dikembangkannya pengelolaan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya pada tahun 1990 an. Hal ini didukung oleh potensi yang cukup besar terutama ketersediaan lahan yang diperuntukkan bagi kebun kelapa sawit, dan partisipasi masyarakat setempat.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit disamping meningkatkan perekonomian masyarakat, juga menyerap tenaga kerja baik pendatang maupun penduduk setempat. Penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit diharapkan akan meningkat sesuai dengan perkembangan areal luas perkebunan yang direncanakan pemerintah daerah. Meskipun tenaga kerja yang terserap di usaha perkebunan kelapa sawit relatif kecil (rata-rata 2 orang setiap 2 Ha), namun terciptanya kesempatan kerja dapat diperluas karena adanya kegiatan turunan dari hasil produksi kebun kelapa sawit seperti industri pengolahan, perdagangan dan usaha lain yang berkaitan.

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang “Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pasir” dengan kasus petani plasma di perkebunan PIR-BUN, merupakan salah satu penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK – LIPI) tahun anggaran 2004.

Kajian dalam studi ini berfokus kepada kondisi dan isu penyerapan tenaga kerja, serta prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang pengelolannya diawali oleh perkebunan pola PIR-BUN telah menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat petani terutama transmigran dari Jawa. Dalam perkembangan perkebunan selanjutnya dengan pola PIR-Swadaya masyarakat lokal turut dilibatkan dengan memanfaatkan lahan petani. Selain itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit ini berdampak terhadap pengembangan pabrik pengolahan terutama CPO yang melibatkan sejumlah tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dinamika perekonomian yang terkait dengan perkembangan perkebunan membuka pula kesempatan kerja dibidang lainnya terutama usaha jasa dan perdagangan. Namun demikian, usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang terbatas (2 hektar per keluarga) belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, karena fluktuasi harga dan produktivitas yang relatif rendah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha kelapa sawit selanjutnya. Prospek penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian, dapat dikembangkan dengan merealisasikan target perkembangan perkebunan kelapa sawit dan tambahan pabrik pengolahan CPO yang masih dibutuhkan di Kabupaten Pasir.

Buku ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir sebagai sumber informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari instansi pemerintah, swasta, tokoh masyarakat dan petani kelapa sawit. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kerjasama tersebut. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada staf peneliti, teknisi serta pihak yang membantu demi selesainya tulisan ini. Meskipun semua anggota peneliti telah berusaha dengan segala kemampuan mulai dari perencanaan sampai penulisan laporan, disadari masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Jakarta, Desember 2007
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI

Dr. Ir. Aswatini, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Metodologi	6
1.3. Kerangka Pemikiran	8
BAB II PERKEBUNAN KELAPA SAWIT:	
Potensi Sumber Daya Daerah dan Sarana Penunjang	13
2.1. Geografis	14
2.2. Potensi Sumber Daya Alam	16
2.3. Potensi Sumber Daya Manusia	20
2.4. Sarana Penunjang	27
2.5. Kesimpulan	32
BAB III DINAMIKA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT :	
Perkembangan Kebijakan, Produksi dan Pemasaran	35
3.1. Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Iklim Investasi	36
3.2. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit: Luas Areal, Produksi dan Harga Pasar	45
3.3. Kesimpulan	59
BAB IV TENAGA KERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT : Pola PIR-BUN	
Kasus Desa Padang Jaya.	61
4.1. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	62
4.2. Karakteristik Demografi	75
	vii

4.3.	Kegiatan di Perkebunan Kelapa Sawit	79
4.4.	Kesejahteraan dan Strategi Kelangsungan Hidup Petani	88
4.5.	Kesimpulan	97
BAB V	PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA TERKAIT PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	99
5.1.	Keberlangsungan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	101
5.2.	Prospek Pengelolaan Kelapa Sawit: Hulu dan Hilir	113
5.3.	Prospek Penyerapan Tenaga Kerja : Peluang dan Tantangan	122
5.3.	Kesimpulan	130
BAB VI	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	135
6.1.	Kesimpulan	135
6.2.	Implikasi Kebijakan	140
DAFTAR PUSTAKA		143
LAMPIRAN		148

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pasir Menurut Kecamatan Tahun 2002	18
Tabel 2.2 Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Pasir Tahun 2002.	19
Tabel 2.3 Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Pasir Tahun 2002.	23
Tabel 3.1 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Pola Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pasir (termasuk Penajam Pasir Utara) Tahun 2002.	49
Tabel 3.2 Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir Menurut Tahun Anggaran 1991/1992- 2002/2003.	51
Tabel 4.1 Alasan Responden Pindah Bekerja ke Kebun Kelapa Sawit	68
Tabel 4.2 Luas Pemilikan Lahan Menurut Tahun Kedatangan di Desa Padang Jaya	70
Tabel 4.3 Perbandingan Perekonomian Rumah Tangga Responden Saat ini dan Sebelum Krisis Ekonomi (1997)	72
Tabel 4.4 Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden Menurut Umur, Jenis Kelamin	78

Tabel 4.5	Keterlibatan Tenaga Kerja Dalam Pengelolaan Kebun Plasma	86
Tabel 4.6	Pendapatan Petani Menurut Tahun Kedatangan (Persen)	89
Tabel 4.7	Status Pekerjaan Petani Di Luar Perkebunan Plasma Menurut Tahun Kedatangan di Lokas	91
Tabel 4.8	Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Pendapatan	92
Tabel 5.1	Luas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur	116

DAFTAR GRAFIK

	Halaman	
Grafik 3.1	Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir	52
Grafik 2	Produksi Kelapa Sawit Per Bulan di Desa Padang Jaya Tahun 2003	53
Grafik 3	Perkembangan Harga Kelapa Sawit Kabupaten Pasir Tahun 2003	55
Grafik 4	Perkembangan nilai indeks “K” Kabupaten Pasir, 2003	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki potensi besar dan bernilai strategis, baik dalam perkembangan ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi dari sub sektor ini dapat dinilai dari perkembangan luas perkebunan dan nilai produksi. Salah satu komoditas strategis dari sub sektor perkebunan adalah kelapa sawit yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik luas areal perkebunan, maupun nilai produksinya.

Selama tahun 1997-2000, perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami kenaikan produksi sekitar 1674 ton per tahun, yaitu dari 5.380.000 menjadi 6.217.000 ton. Selama periode yang sama, volume ekspor kelapa sawit juga meningkat sekitar 35 persen, yaitu dari 3.471.000 menjadi 4.689.000 ton (BPS, 2001). Meningkatnya produksi dan volume ekspor kelapa sawit yang cukup tinggi, seiring dengan perkembangan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selama lima tahun terakhir terdapat penambahan areal baru sekitar 230.000 Ha/tahun. Persebaran lokasi perkebunan juga mengalami perkembangan, yang semula (tahun 1970-an) hanya terkonsentrasi di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, kini juga telah menyebar ke lokasi lainnya, terutama ke 17 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang paling pesat terjadi di Kabupaten Paser, dan kini luasnya mencapai lebih dari separuh luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (64.059,5 Ha). Perkembangan ini diprediksikan akan terus berlanjut sesuai dengan potensi dan kebijakan daerah.

Perkembangan sub sektor perkebunan kelapa sawit sangat penting artinya bagi perluasan kesempatan kerja, karena pengelolaan perkebunan kelapa sawit membutuhkan banyak tenaga kerja dari hulu ke hilir. Semakin luas perkebunan kelapa sawit, semakin banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sejak masa persiapan perkebunan sampai tahap kegiatan pengelolaan selanjutnya. Demikian pula kegiatan industri pengolahan yang terkait dengan produk tersebut, selain menambah nilai produksi juga merupakan peluang menciptakan kesempatan kerja untuk menampung tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi (Dwinita,1999). Diperkirakan saat ini terdapat sekitar 3,5 juta tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Apabila diasumsikan setiap pekerja kebun kelapa sawit memiliki anggota keluarga yang terdiri dari satu orang istri dan 2 anak, maka terdapat sekitar 14 juta orang yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit (Dewan Riset Nasional, 2002). Jumlah tenaga kerja yang terserap akan semakin besar, apabila kegiatan perkebunan kelapa sawit diperluas dengan kegiatan industri hilir seperti industri pengolahan yang terkait dengan komoditi kelapa sawit. Dalam perekonomian Indonesia, komoditi kelapa sawit berperan penting baik sebagai penghasil devisa utama maupun sebagai bahan baku dari berbagai industri pengolahan, seperti pengolahan CPO, minyak goreng, dan mentega.

Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit di suatu daerah sangat bermakna bagi pembangunan daerah tersebut, baik dilihat dari potensi perkembangan ekonomi secara keseluruhan maupun potensi penyerapan tenaga kerja. Keadaan ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Namun demikian ketersediaan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitas di beberapa daerah belum tentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan usaha perkebunan tersebut. Di sisi lain, tersedianya kesempatan kerja di suatu wilayah sebagai dampak dari perkembangan perkebunan, juga berpotensi besar menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar daerah. Keadaan ini merupakan peluang dan sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan tenaga kerja yang

tersedia sesuai dengan kebutuhan pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

Dilaksanakannya Otonomi Daerah sejak tahun 2000, memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, termasuk pengembangan sub-sektor perkebunan. Sasaran pembangunan sub sektor perkebunan ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah seperti pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan yang timpang, pengembangan ekonomi wilayah, penyebaran penduduk dan peningkatan ekspor non migas (Nuhung, 2003). Di beberapa wilayah Indonesia, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi untuk pengembangan agro industri (Simanjuntak, 2001). Pengembangan agro industri berbasis komoditi kelapa sawit, selain berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit, juga memperluas kesempatan kerja di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian PPK-LIPI sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu prioritas dari pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang diawali dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dilakukan di Kabupaten Pasir pada tahun 1982/1983. Pembangunan perkebunan dengan pola PIR merupakan usaha pemerintah dalam mengembangkan sub-sektor perkebunan, melalui perkembangan kebun inti dan plasma. Usaha ini dipandang perlu sebagai campur tangan pemerintah dalam meningkatkan usaha perkebunan rakyat, karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perkebunan rakyat memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi gejolak ekonomi (Dirjen Perkebunan, 1992). Pengembangan pola PIR-BUN juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah dalam membina ekonomi rakyat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, memungkinkan petani plasma untuk menjaga kelangsungan

perkebunan maupun perluasan lahannya. Keberhasilan ini juga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam usaha perkebunan kelapa sawit, sekaligus memanfaatkan lahan yang masih menganggur.

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, diprediksikan daerah juga akan terus mengalami perkembangan di masa depan. Apabila diasumsikan perkembangan perkebunan kelapa sawit sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 230.000 Ha/tahun, maka pada tahun 2010, diperkirakan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan mencapai 4,8 juta Ha. Hal ini berarti kapasitas produksi juga akan meningkat menjadi sekitar 10,9 juta ton, yaitu sekitar 35 persen dari proyeksi pangsa pasar dunia. Perkembangan ini akan menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia. Diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kegiatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke berbagai negara seperti Belanda, Amerika Serikat, India, dan Brasil (Dewan Riset Nasional, 2001).

Seiring dengan rencana perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir sebagai pionir perkebunan kelapa sawit di wilayah ini, berpotensi untuk terus berkembang, karena selain memiliki potensi lahan yang cukup luas juga memiliki sumber daya manusia yang siap untuk dilibatkan dalam usaha perkebunan tersebut. Namun banyak pihak mencemaskan dampak perkembangan ini, karena sebagian besar perluasan merupakan hasil konversi hutan tropis basah di Indonesia, sehingga berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Demikian pula keterlibatan SDM dalam perkebunan kelapa sawit, membutuhkan kemauan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan perkembangan perkebunan secara profesional.

Berbagai potensi dan permasalahan diatas berperan penting dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan dinamika dan prospek perkebunan kelapa sawit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang

pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Secara rinci kajian tersebut meliputi:

1. Mengkaji kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit serta peran penting produksi dan pemasaran dalam perkembangan ekonomi daerah.
2. Mengkaji kondisi ketenagakerjaan terutama terkait dengan karakteristik, kuantitas dan kualitas pekerja di perkebunan plasma kelapa sawit di Kabupaten Pasir.
3. Menganalisis potensi dan kendala terkait dengan kelangsungan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit, serta isu penyerapan tenaga kerja baik di perkebunan maupun industri pengolahan.

Kajian ini mencakup pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir baik pola PIR-BUN maupun pola PIR-Swadaya. Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan Pola PIR-BUN dilakukan sejak awal perkembangan yaitu tahun 1982/1983 sampai saat ini. Sedangkan Pola PIR-Swadaya merupakan perkembangan perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan petani di bawah koordinasi pemerintah daerah (Dinas Perkebunan). Prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut, sejalan dengan rencana proyek sejuta Ha kelapa sawit untuk wilayah Provinsi Kaltim untuk jangka waktu 15 tahun (2003 – 2018).

Kajian tentang ketenagakerjaan terkait dengan perkebunan kelapa sawit, terutama dilakukan di lokasi PIR-BUN Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, yang menekankan pada jumlah dan kualitas tenaga kerja, kegiatan petani serta kesejahteraan petani plasma di daerah tersebut. Adapun tahapan kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit mencakup masa persiapan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Isu terkait dengan penyerapan tenaga kerja selain terkait dengan prospek pengembangan perkebunan, juga prospek industri pengolahan hasil, terutama pengembangan industri CPO. Prospek penyerapan tenaga kerja mencakup potensi dan kendala terkait dengan kelangsungan dan

perkembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan rencana Pemda ke depan. Penelitian lapangan dilakukan pada saat kondisi tanaman kelapa sawit di lokasi PIR-BUN sudah mencapai usia sekitar 17 tahun, dan dalam masa pasca panen.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan, maka tulisan ini merupakan hasil kajian tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit terkait dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kajian sejenis juga dilakukan di dua provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Riau.

1.2. METODOLOGI

Lokasi penelitian untuk Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kabupaten Pasir, karena daerah ini memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dibandingkan kabupaten lainnya. Demikian pula perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN di wilayah ini sebagai daerah pionir pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Survei dilakukan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, sebagai salah satu lokasi perkebunan PIR-BUN di Long Pinang. Daerah ini merupakan perkebunan plasma yang umumnya ditempati oleh transmigran dari Jawa pada awal pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir.

Pengumpulan data primer yang bersifat kuantitatif dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuestioner/daftar pertanyaan yang terstruktur, disusun berdasarkan variabel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga / kepala keluarga yang terlibat dalam pekerjaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN sebagai petani plasma. Survei dilakukan terhadap 150 keluarga petani plasma dari 346 keluarga yang terdiri dari transmigran dan penduduk lokal yang dipilih secara random sampling. Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil tabulasi silang data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif dianalisa untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa

sawit. Sedangkan data sekunder dapat memberikan gambaran tentang potensi yang ada di wilayah provinsi maupun kabupaten. Pengumpulan data sekunder yang merupakan data kuantitatif dilakukan sebelum dan selama penelitian lapangan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain : BPS Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan (provinsi dan kabupaten), Bappeda Kabupaten Pasir, Dinas Tenaga Kerja , Perguruan Tinggi.

Pengumpulan data primer yang bersifat kualitatif dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), kajian bersama dengan beberapa instansi yang terkait, dan observasi atau pengamatan terfokus selama penelitian lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi variabel pokok dan sub variabel dari permasalahan penelitian yang berkembang selama di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang relevan dengan subyek penelitian dan dapat memberikan informasi tentang permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan *snow-balling*, baik di kalangan birokrasi pemerintahan daerah (kepala dinas), perusahaan (PTPN dan swasta), maupun di kalangan petani kelapa sawit (petani plasma dan swadaya).

Selain wawancara mendalam, diadakan diskusi kelompok (semacam *Focus Group Discussion*) terhadap beberapa orang anggota rumah tangga petani plasma, berpendidikan SLTA. Sebagian dari mereka kadang-kadang bekerja membantu orang tua atau sebagai buruh pada perkebunan kelapa sawit milik petani lainnya. Kajian bersama dilakukan terhadap beberapa informan yang terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, seperti Bappeda, Dinas Nakertrans, Dinas Diknas, Dinas Perkebunan, PTPN XIII, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perindagkop.

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia, sebagai Negara dengan surplus tenaga kerja, memerlukan berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif dan strategis untuk dapat menyediakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Hal ini penting agar dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan, yang semakin meningkat akibat krisis pada tahun 1997. Salah satu kebijakan makro yang strategis adalah meningkatkan peran sektoral dalam membuka lapangan kerja terutama sektor pertanian pada umumnya dan sub-sektor perkebunan pada khususnya. Sektor tersebut terbukti selama ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, meskipun sumbangan ekonomi dari sektor ini cenderung semakin menurun dibandingkan dengan sektor industri.

Secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat penting untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang diperlukan, karena diperkirakan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja. Namun pengalaman di Negara berkembang (termasuk Indonesia) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran (Mubyarto, 2004). Selama ini pengembangan sektor Industri di Indonesia cenderung bersifat padat modal dan tidak terkait dengan sektor yang banyak digeluti masyarakat (sektor pertanian), menyebabkan proses transformasi ekonomi yang terjadi, tidak mampu mengatasi masalah pengangguran (Arief, 1998). Untuk itu diperlukan desain kebijakan ekonomi makro yang menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai titik pijak atau prioritas ekonomi Indonesia ke depan (Basri, 2003).

Penciptaan kesempatan kerja di daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, di samping faktor –faktor lain sebagai pendukung. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menyediakan kesempatan kerja diperlukan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pemilihan sektor-sektor strategis yang sifatnya padat karya. Sub sektor perkebunan diharapkan memenuhi kriteria tersebut karena banyak melibatkan tenaga kerja dalam tahapan-tahapan pengolahannya serta mempunyai

efek ganda dalam pengolahan produksi berbasis hasil perkebunan (agro industri). Pengembangan agro-industri, diharapkan juga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing produk yang dihasilkan, baik di pasar nasional, regional maupun pasar global.

Salah satu komoditas perkebunan yang strategis adalah kelapa sawit yang merupakan komoditas berorientasi ekspor, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya daerah yang berfungsi strategis dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah, baik dalam perkembangan investasi maupun penyerapan tenaga kerja. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara teoritis, faktor tenaga kerja merupakan salah satu input dalam proses produksi, di samping faktor-faktor lain seperti lahan, modal dan teknologi (Dernberg,1972). Dalam penelitian ini, beberapa faktor internal yang langsung mempengaruhi pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah ketersediaan lahan potensial, kebijakan Pemda dalam sub sektor perkebunan dan partisipasi masyarakat. Perkembangan perkebunan dengan orientasi ekspor, tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal seperti pasar global, nasional maupun regional, dan persaingan antar negara produsen sejenis. Faktor-faktor tersebut penting dalam mempengaruhi pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan yang akan berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, melalui perluasan perkebunan maupun melalui pengembangan industri hulu maupun hilir (agro-industri terkait).

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai di sektor perkebunan, diperlukan investasi yang cukup besar dan manajemen yang professional. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh perkebunan-perkebunan besar yang mempunyai modal, teknologi dan manajemen yang professional. Namun demikian, hal ini bisa berdampak pada ketimpangan yang makin lebar antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat yang umumnya dikelola secara tradisional dengan berbagai keterbatasan. Untuk mengurangi

ketimpangan tersebut maka pemerintah melalui kebijakan nasional mengintrodusir pola PIR-BUN, dengan maksud untuk memberdayakan petani rakyat. Dalam pola PIR-BUN hubungan antara perusahaan besar dan petani merupakan hubungan inti dan plasma, dimana perusahaan besar sebagai inti dan petani yang terlibat sebagai plasma. Diharapkan dengan pola PIR-BUN hubungan petani plasma dengan perusahaan inti merupakan hubungan kemitraan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha. Dengan hak dan kewajiban yang jelas dari masing-masing pelaku perkebunan, diharapkan tidak menimbulkan hubungan yang bersifat eksploitatif antara kedua pihak yang berbeda status dan kekuatannya. Pengelolaan perkebunan dengan pola PIR-BUN, memberi kesempatan kepada petani plasma untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan perkebunan secara professional dengan bimbingan perusahaan inti. Demikian pula perusahaan inti memperoleh jaminan memperoleh prioritas dalam pembelian hasil produksi untuk pengolahan hasilnya (CPO). Hubungan kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi baik jumlah maupun kualitas.

Tulisan ini terdiri dari enam bagian. Setelah bab pendahuluan terutama tentang latar belakang penelitian, bab kedua menjelaskan tentang setting daerah penelitian, terutama menjelaskan potensi daerah penelitian baik SDA maupun SDM dan sarana penunjang lainnya. Bagian ketiga berisi tentang dinamika perkebunan kelapa sawit yang menekankan pembahasan pada kebijakan pemerintah daerah, pemasaran dan produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasir. Bagian keempat menekankan pada penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN, terutama tentang karakteristik tenaga kerja, kegiatan di perkebunan kelapa sawit serta penyerapan tenaga kerja baik kualitas dan kuantitas petani plasma di perkebunan kelapa sawit. Bagian kelima membahas prospek penyerapan tenaga kerja dalam kaitan dengan keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir pada khususnya dan Kaltim pada umumnya. Pembahasan menekankan pada beberapa hal tentang potensi dan kendala yang terkait dengan

prospek penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit. Kemudian bagaimana keberlangsungan perkebunan kelapa sawit kedepan dan industri pengolahan terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Bagian keenam yang merupakan akhir dari tulisan berisi kesimpulan dan implikasi kebijakan. Bagian ini menekankan pada benang merah dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Sebagai penutup tulisan akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan di daerah tentang kebijakan penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir.

BAB II

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT:

Potensi Sumber Daya Daerah dan Sarana Penunjang

Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. Minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit yang dihasilkan menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan secara terus menerus dalam jangka panjang. Kabupaten Pasir dengan ibukota Tanah Grogot, merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan arealnya, kabupaten ini memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur. Sejak dilakukan pemekaran wilayah pada tahun 2002, Kabupaten Pasir dipecah menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Pasir sekarang dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedua kabupaten ini memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, baik lahan milik PTPN XIII maupun lahan perkebunan milik masyarakat. Desa Padang Jaya yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kuaro merupakan salah satu daerah penempatan transmigrasi sejak tahun 1986 untuk program PIR-BUN PTPN XIII. Sebagian besar penduduk desa ini terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yaitu sebagai petani plasma kelapa sawit pola PIR-BUN, dengan PTPN XIII sebagai perusahaan inti.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir tidak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana daerah. Tulisan pada bagian ini bertujuan untuk melihat potensi sumber daya daerah, yaitu Kabupaten Pasir dan Desa Padang Jaya yang menjadi studi kasus penelitian, yang mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit, seperti: kondisi geografis daerah, potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana sosial ekonomi.

2.1. GEOGRAFIS

Kabupaten Pasir dengan luas wilayah 11.603.94 Km², terletak dibagian selatan provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menjadikan kabupaten ini sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Posisi yang strategis ini didukung oleh keberadaan jalan negara yaitu Trans Kalimantan yang melalui wilayah ini, serta keberadaan pelabuhan laut -Teluk Adang, yang mempermudah akses masuk dan keluar wilayah ini. Dengan demikian, Kabupaten Pasir merupakan wilayah yang relatif terbuka dan dapat dijangkau secara lebih efektif melalui sistim transportasi laut maupun darat.

Secara topografis, Kabupaten Pasir terdiri dari lahan yang berbukit-bukit dengan ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut dan wilayah yang berada disekitar aliran sungai yang relatif besar dan bermuara ke Selat Makasar, antara lain Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Tekale (430 Km), Sungai Kerang (190 Km) dan Sungai Apar Besar (95 Km). Selain berfungsi sebagai sarana perhubungan antar wilayah maupun sebagai sarana pengairan dan penangkapan ikan, keberadaan sungai-sungai tersebut dapat menyuburkan lahan disekitar daerah aliran sungai. Secara garis besar, wilayah Kabupaten Pasir terdiri dari dua bagian wilayah, yaitu: (1) Bagian Timur, luasnya mencapai hampir 70 persen dari luas kabupaten, merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang, memanjang dari arah utara hingga ke selatan. Wilayah ini terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai yang berhadapan langsung dengan Selat Makasar. (2) Bagian Barat yang luasnya mencapai sekitar 30 persen dari luas kabupaten, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasir terdiri dari tanah *alluvial*, *podsonik* dan campuran. Jenis tanah dengan zat organik yang terkandung di dalamnya dapat berpengaruh pada kesuburan tanah dan kesesuaian tanah dengan jenis tanaman tertentu. Tanah *alluvial* merupakan jenis tanah yang relatif subur karena komposisi mineral

yang terkandung di dalamnya. Penyebaran jenis tanah alluvial terbatas pada daerah yang memungkinkan terjadinya sedimentasi dari sungai. Jenis tanah ini sangat cocok sebagai media tanam untuk perkebunan kelapa sawit karena memiliki drainase yang baik. Di Kabupaten Pasir jenis tanah ini luasnya mencapai 182.250 Ha, menyebar pada wilayah dataran rendah, landai dan bergelombang di bagian timur pada lembah-lembah dan aliran sungai. Jenis tanah *podsonik merah kuning* dianggap kurang subur untuk pertanian. Jenis tanah ini luasnya mencapai 628.850 Ha dan terdapat pada daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Penajam-Kuaro, menyebar ke bagian selatan yaitu bagian barat Kecamatan Pasir Belengkong dan bagian selatan Kecamatan Tanjung Aru. Sedangkan jenis tanah *Campuran*, terdiri dari podzolik coklat/endozol, podzolik litozol, organozol/orgono gambut, podzolik dan regozol/glizol/meditem, dikategorikan sebagai tanah yang kurang subur, sehingga kurang baik untuk pertanian. Penyebaran jenis tanah ini cenderung ke arah bagian barat dan utara Kabupaten Pasir.

Intensitas curah hujan di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah yang cukup penting dalam menjaga kesinambungan dan pengembangan tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit. Di wilayah Kabupaten Pasir, sebagian besar wilayah dapat dikategorikan mempunyai intensitas curah hujan yang dianggap cukup baik untuk pertumbuhan kelapa sawit. Suatu wilayah dengan iklim dan curah hujan antara 1500 - 4.000 mm/tahun, dianggap cukup baik untuk pertumbuhan kelapa sawit, dan mampu mencapai hasil optimal apabila curah hujan mencapai 2000 - 3000 mm/tahun. Di Kabupaten Pasir, curah hujan sangat bervariasi namun sebagian besar wilayah mempunyai intensitas curah hujan terbesar antara 1.188 sampai 2.917 mm/tahun. Curah hujan yang cukup besar terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Januari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

2.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Pasir dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber daya laut dan sumber daya darat, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang terdiri dari lautan dan daratan. Potensi sumber daya alam yang dikategorikan darat terdiri dari hasil hutan, lahan pertanian, termasuk pertanian pangan dan perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Hutan merupakan sumber daya yang cukup dominan di Kabupaten Pasir. Berdasarkan penggunaan lahan daratan, pada tahun 2002 peruntukan lahan untuk hutan cukup besar sekitar 77 persen dari luas daratan, termasuk Penajam Pasir Utara (Pasir Dalam Angka, 2002: 15). Hasil produksi sub sektor kehutanan terdiri dari kayu dan non kayu. Hasil berupa kayu terdiri dari kayu log yang dihasilkan oleh HPH dan Non HPH, kayu gergajian, kayu ulin, dan sirap ulin. Sedangkan hasil non kayu terdiri dari semambu dan rotan.

Pada saat ini produksi kehutanan mengalami penurunan baik produksi kayu maupun non kayu. Bahkan sejak tahun 2002, jenis kayu sirap dan kayu ulin tidak lagi memproduksi. Jenis kayu gergajian juga mengalami penurunan meskipun tidak sedrastis lainnya. Penurunan hasil kehutanan ini antara lain juga disebabkan semakin berkurangnya kawasan hutan untuk dikonversikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Namun dalam praktek banyak surat ijin untuk perkebunan kelapa sawit, disalahgunakan pemanfaatannya oleh investor dengan hanya mengambil hasil kayu saja, kemudian hutan ditelantarkan kembali. Kasus ini terjadi pada sebagian besar daerah di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Pasir. Sebagian besar perusahaan pemegang ijin hanya menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai dalih untuk mengincar kayu. Setelah ijin dikantongi, kayu hutan habis dibabat tapi perkebunan kelapa sawit tidak pernah dibuka. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, sampai saat ini terdapat 20 perusahaan perkebunan yang telah dicabut ijin pemanfaatannya, karena pelanggaran tersebut.

Seperti halnya hasil kehutanan, hasil produksi tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija juga mengalami penurunan. Hasil

palawija yang cukup menonjol di Kabupaten Pasir adalah jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan potensial untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pasir seluas 208.913 Ha terdiri dari 493.352 Ha lahan sawah dan 159.562 Ha lahan kering (Properda, 2001-2005: 27). Belum dikelolanya lahan secara maksimal sehingga produktivitasnya relatif rendah. Sebagai daerah yang berbatasan dengan laut dan sungai yang cukup lebar dan panjang, wilayah ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan sumber laut dan sungai, seperti hasil perikanan, mineral, wisata bahari, yang semuanya mempunyai nilai ekonomis bagi penduduk di sekitarnya. Usaha perikanan mempunyai prospek yang cukup bagus dan dapat diandalkan bagi pengembangan perekonomian, mengingat sumber daya tersebut bersifat dapat dipulihkan atau berkelanjutan (*renewable resources*). Demikian juga luasnya perairan laut dan darat yang dapat dimanfaatkan di wilayah ini, memungkinkan sumber daya ini dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk yang berkelanjutan..

Hasil pertanian terutama sub-sektor perkebunan dan bahan galian seperti batu bara, menjadi andalan perekonomian di Kabupaten Pasir. Berdasarkan PDRB harga berlaku, sumbangan kedua sektor tersebut cukup besar masing-masing 31,31 persen dan 32,76 persen. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian daerah semakin besar. Selama periode 1997-2000, sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB menunjukkan peningkatan sementara sumbangan Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan (Properda, 2001-2005). Pentingnya sektor perkebunan bagi Kabupaten Pasir tidak terlepas dari potensi sumber daya lahan yang dapat digunakan untuk perkebunan. Berdasarkan pemanfaatannya, sebagian besar atau sekitar 84 persen lahan di Kabupaten Pasir masih berupa hutan. Sedangkan lahan untuk sub-sektor perkebunan yang menempati urutan terbesar kedua dialokasikan sekitar 8 persen (table 2.1). Hal ini mencerminkan adanya prioritas dalam pengembangan sub-sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan wilayah ini. Komoditi perkebunan yang dihasilkan antara lain, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, lada, kakao. Sedangkan lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan dan perumahan relatif kecil, masing-

masing sekitar 4 persen dan sekitar 1 persen. Dengan komposisi pemanfaatan lahan tersebut, wilayah Kabupaten Pasir merupakan daerah dengan hampanan perkebunan kelapa sawit dan hutan yang luas.

Tabel 2.1
Alokasi Pemanfaatan dan Luas Lahan Daratan
di Kabupaten Pasir

Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pemukiman	25.041,6	1,08
Pertanian	53.561,2	3,85
Perkebunan	114.217,5	8,21
Perikanan tambak/kolam	5.147,4	0,37
Hutan	1.173.746,8	84,37
Lahan kosong/tidak produktif	29.594,1	2,13
Jumlah	1.391.200,0	100,00

Sumber: Properda Kabupaten Pasir, 2001-2005.

Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan dari pengembangan sub-sektor perkebunan di Kabupaten Pasir. Kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit memperoleh dukungan baik dari segi kebijakan pemerintah daerah maupun segi ketersediaan potensi sumber daya lahan seperti lahan hutan maupun lahan kosong/tidak produktif. Luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 52.226,2 Ha atau 73,6 persen dari total luas perkebunan di Kabupaten pasir. Dominannya areal perkebunan kelapa sawit, disebabkan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Pasir sehingga pembangunan perkebunan diarahkan pada pembukaan lahan besar-besaran untuk kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit sudah dikembangkan di beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Pasir termasuk Penajam Pasir Utara, Nunukan, Berao, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Tarakan. Luas areal perkebunan kelapa sawit

di wilayah Pasir (termasuk Kabupaten Penajam Pasir Utara) adalah 64.059,5 Ha, diikuti Kutai Timur seluas 31.186 Ha, dan luas lahan terkecil terdapat di Kabupaten Tarakan (12 Ha). Pada saat ini (Tahun 2004), perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir merupakan areal terluas di Kalimantan Timur, karena lebih dari separuh perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kaltim berada wilayah Pasir (Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara). Sebagian areal tanaman kelapa sawit sudah mulai memproduksi dan sebagian lain masih dalam tahap penanaman.

Selama periode 1998-2002, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir meningkat dari 46.680,19 Ha menjadi 52.226,2 Ha atau meningkat sekitar 12 persen. Areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir tersebar di semua kecamatan, dengan areal kelapa sawit terluas (39,5 persen) terdapat di Kecamatan Long Ikis, dan areal paling kecil terdapat di Kecamatan Muara Komam yaitu 4,00 Ha (0,0%) (lihat Tabel 2.2). Pada tahun 2003, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir meningkat menjadi 56.224,37 Ha, lebih dari separuh lahan tersebut merupakan perkebunan milik rakyat yaitu 32.328,20 Ha, kemudian diikuti oleh lahan kelapa sawit milik Negara (24,06%) dan milik swasta (18,44%)

Tabel 2.2
Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut
Kecamatan di Kabupaten Pasir Tahun 2002.

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Persentase
1.	Batu Sopang	310,00	0,59
2.	Tanjung Aru	6.535,00	12,51
3.	Pasir Balengkong	9.880,00	18,91
4.	Tanah Grogot	820,00	1,57
5.	Kuaro	8.281,56	15,86
6.	Long Ikis	20.663,14	39,56
7.	Muara Komam	4,00	0,00
8.	Long Kali	5.732,50	11,00
	Kab. Pasir	52.226,20	100,00

Sumber: Kabupaten Pasir Dalam Angka, 2002.

Perbedaan luas lahan yang dikuasai oleh masing-masing pelaku, di samping faktor lain berpengaruh terhadap komposisi hasil produksi kelapa sawit pada masing-masing pola perkebunan. Sebagian besar produksi kelapa sawit (sekitar 47 persen) dihasilkan oleh Perkebunan Rakyat yang menguasai lahan terluas. Namun produksi kelapa sawit terbesar kedua (32,4%) dihasilkan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yang menguasai lahan terkecil sesudah Perkebunan Besar Swasta (PBS). Hasil produksi PBS menempati posisi terkecil (20,3%persen), meskipun memiliki luas lahan terbesar kedua sesudah Perkebunan Rakyat. Relatif rendahnya hasil produksi dari PBS, kemungkinan karena pengelolaan kebun yang relatif baru, sehingga belum menghasilkan, atau belum dimanfaatkannya semua lahan yang dikuasai perusahaan swasta. Dengan demikian, perkebunan rakyat masih dominan dalam memberi kontribusi pada perekonomian, meskipun produktivitas kelapa sawit masih lebih rendah dari produktivitas PBN. Data dari dinas Perkebunan Pasir menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat adalah 12.519,76 Kg/Ha dan produktivitas perkebunan besar negara mencapai 13.367,16 Kg/Ha. Rendahnya produktivitas kelapa sawit pada Perkebunan Rakyat kemungkinan dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang kurang memenuhi standard perusahaan inti, serta kemungkinan penggunaan bibit yang kurang baik. Pemilihan bibit merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Bibit yang kurang bagus akan menghasilkan buah sawit yang kurang bagus yaitu buah sawit dengan cangkang besar tetapi isinya kecil. Cangkang yang besar memiliki sabut yang tipis sehingga CPO yang dapat dihasilkan relatif sedikit. Demikian pula isi kelapa sawit yang kecil juga menghasilkan minyak inti relatif sedikit.

2.3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten Pasir termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, yaitu sekitar 15 orang per km² (Pasir Dalam Angka, 2002: 43). Pada tahun 2000, jumlah penduduk Pasir (sebelum pemekaran) adalah sebesar 268.761 jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk

Provinsi Kalimantan Timur, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4,4 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar ini selain karena faktor kelahiran, kemungkinan besar karena dipengaruhi oleh faktor migrasi masuk (*in migration*). Kabupaten Pasir sudah lama merupakan daerah penerima transmigran, terutama untuk program PIR-BUN. Sebagai daerah yang terbuka dan mempunyai kegiatan di bidang pertambangan, juga merupakan daya tarik bagi pencari kerja dari luar kabupaten atau provinsi. Setelah pemekaran pada tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pasir terbagi dengan penduduk Kabupaten Penajam Pasir Utara (PPU), yaitu kini menjadi 168.521 jiwa atau mengalami penurunan lebih dari 100.000 jiwa. Penyebaran penduduk untuk masing-masing kecamatan menunjukkan proporsi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tanah Grogot (25,2%) yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten. Sedangkan proporsi penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Muara Komam (5,8%).

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasir pada tahun 2002 mencapai 108.825 jiwa atau sekitar 65 persen dari penduduk di Kabupaten Pasir (berusia 15 tahun atau lebih). Sebagian besar angkatan kerja ini menurut konsep/definisi yang berlaku termasuk dalam status bekerja. Berdasarkan data ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pasir, pengangguran terbuka yang biasa diprosikan sebagai pencari kerja, lebih banyak dialami oleh angkatan kerja yang relatif berpendidikan. Sebagai contoh pada tahun 2002 terdapat sebanyak 3.475 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja, dan hanya sekitar 15 persen yang berhasil ditempatkan untuk bekerja, selebihnya masih menunggu untuk ditempatkan atau menganggur. Sebagian besar pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans adalah pemuda berusia 20-29 tahun dengan tingkat pendidikan minimal SMA. Hal ini menunjukkan perluasan kesempatan kerja masih dibutuhkan di Kabupaten Pasir, terutama untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang relatif berpendidikan. Sedangkan setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), biasanya banyak terjadi di sektor pertanian, karena sifat pekerjaan yang fluktuatif sesuai dengan irama kegiatan.

Di perkebunan kelapa sawit, misalnya, kegiatan petani yang paling menonjol hanya pada waktu panen, karena dilakukan secara serentak dalam satu hamparan kebun oleh kelompok petani.pemiliknya. Sedangkan kegiatan lainnya seperti pemeliharaan dan pemupukan, kurang mendapat perhatian dari para petani, dan biasanya merupakan kegiatan individual, tergantung kemauan petani. Kemungkinan rendahnya produktivitas di perkebunan rakyat dibandingkan perkebunan Negara, dipengaruhi oleh kurang optimalnya pemeliharaan di perkebunan rakyat, sehingga hasilnya kurang memenuhi standard pengelolaan yang ideal.

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasir tergolong masih rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2002, lebih dari dua pertiga (70%) penduduk di Kabupaten Pasir berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar (SD), 26 persen berpendidikan sekolah menengah (SLTP dan SLTA) dan yang berpendidikan akademi keatas hanya sekitar 3 persen (Tabel 2.3). Rendahnya kualitas sumber daya manusia mencerminkan pengelolaan di sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk, masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Selama ini dengan masih rendahnya kualitas penduduk tidak menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkebunan kelapa sawit karena kebutuhan tenaga kerja di kebun kelapa sawit tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Namun kualitas penduduk yang relatif rendah ini merupakan tantangan bagi daerah untuk pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit terutama industri pengolahan yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas.

Kecamatan Kuaro sebagai salah satu daerah penerima transmigran mempunyai jumlah penduduk 18.093 jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk Pasir, diantaranya sebanyak 1.402 jiwa (346 KK) merupakan penduduk di Desa Padang Jaya. Penduduk Desa Padang Jaya tergolong penduduk yang produktif, karena lebih dari dua pertiga berusia di atas 15 tahun. Sedangkan penduduk pada usia sekolah SD dan SLTP (6-16 tahun) sebanyak 385 jiwa (sekitar 27 persen), penduduk usia sekolah SLTA dan PT (17-25 tahun) sebanyak

232 (sekitar 16 persen), usia 26-60 tahun sekitar 43 persen, dan selebihnya adalah penduduk manula (60 tahun atau lebih), sekitar 3 persen. Sebagai desa penempatan transmigran PIR-BUN, sebagian besar penduduk desa ini berasal dari Jawa, baik yang datang pada awal pembukaan kebun kelapa sawit maupun yang datang kemudian dengan membeli lahan perkebunan. Sebagian kecil penduduk lainnya merupakan penduduk lokal dari Pasir atau daerah di sekitarnya. Berdasarkan profil desa (tahun 2000), sebagian besar penduduk di desa ini mempunyai mata pencaharian pokok sebagai petani plasma kelapa sawit (264 orang), buruh (66 orang), pedagang (23 orang), industri rumah tangga (14 orang), tukang (15 orang) dan pegawai negeri (18 orang) dan swasta (47 orang).

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Pasir Tahun 2002
(Persentase)

Tingkat Pendidikan	Persentase
Tidak/belum pernah sekolah	9,16
Tidak/belum tamat SD	29,54
Sekolah Dasar (SD)	31,95
SMP	14,61
SMA	12,00
Diploma/PT	2,74
Total	100

Sumber: Kabupaten Pasir Dalam Angka 2003, BPS Pasir

Berdasarkan tingkat pendidikan, lebih dari separuh penduduk Desa Padang Jaya berpendidikan SD yaitu sebanyak 798 orang. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti kondisi Kecamatan Kuaro pada umumnya, proporsinya makin kecil, yaitu jumlah penduduk dengan pendidikan SLTP sebanyak 288 orang (sekitar 20 persen), tingkat SLTA sebanyak 164 orang (sekitar 12 persen) dan Perguruan Tinggi hanya 5 orang. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Desa Padang Jaya, dipengaruhi oleh banyaknya transmigran yang berpendidikan rendah. Sarana pendidikan yang tersedia sangat terbatas yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-

Kanak (TK). Sedangkan untuk sarana sekolah yang lebih tinggi terdapat di kota Kecamatan Kuaro atau di ibukota Kabupaten yaitu Tanah Grogot.. Disamping sekolah umum, di Desa Padang Jaya juga terdapat sekolah keagamaan informal seperti Taman Pengajian Alquran (TPA).

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pasir, telah dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK2) dan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER). SMK 2 yang dibangun dengan pembiayaan dari bantuan luar negeri, memiliki sarana penunjang, seperti lahan praktek, kebun percontohan, asrama untuk siswa. Program studi yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pertanian seperti (1) Budidaya Tanaman, termasuk Kelapa Sawit; (2) Perikanan; (3) Peternakan; (4) Teknologi Pertanian, termasuk teknologi tanaman kelapa sawit. Untuk Teknologi Pertanian yang baru akan dibuka dan sudah ada MOU dengan PT. Astra yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit berlokasi di Waru Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dukungan Astra terhadap SMK cukup besar disamping kerjasama dalam mengadakan Program Studi Teknologi Pertanian, juga dalam bentuk pemagangan siswa SMK di kebun milik Astra. Sebagian lulusan sekolah ini terserap di perusahaan Astra. Sementara dukungan PTPN XIII sebagai perusahaan negara dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang pertanian/perkebunan masih kurang, baik dalam pembinaan kurikulum maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja lulusan SMK 2 di PTPN XIII.

Meskipun sarana sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang pertanian telah tersedia di Kabupaten Pasir, namun permasalahannya adalah rendahnya minat siswa untuk masuk ke sekolah tersebut dibandingkan minat ke sekolah umum. Data pada Diknas Pendidikan Kejuruan Kabupaten Pasir menunjukkan jumlah siswa di SMK 2 semakin berkurang dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin banyak jumlah sekolah menengah umum (SMU) yang tersebar sampai ke tingkat kecamatan. Salah satu faktor penyebab adalah kurang adanya kepastian lapangan kerja di perkebunan untuk lulusan sekolah kejuruan ini. Di samping itu,

lapangan pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit makin terbatas, serta lulusan sekolah kejuruan yang belum siap untuk langsung bekerja di lahan pertanian. Tampaknya kurikulum di sekolah kejuruan dipersiapkan untuk mengarahkan siswa mandiri di bidang pertanian terutama perkebunan, sedangkan minat generasi muda cenderung masih terbatas menjadi karyawan di perusahaan besar perkebunan dan perusahaan pertambangan batu bara yang terdapat di kabupaten Pasir dan sekitarnya.

Sosial- ekonomi

Penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasir terdiri dari penduduk asli/setempat dan pendatang. Jumlah pendatang di kabupaten ini cukup besar karena daerah ini merupakan salah satu daerah tujuan migran yang berasal dari Banjar, Bugis, Jawa, Madura, dan Sumatera (Batak dan Minang) dan daerah lainnya. Disamping itu Kabupaten Pasir merupakan daerah penempatan transmigran yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan daerah lainnya. Berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Adat Pasir, keberadaan orang dari Jawa cukup besar sehingga proporsinya hampir sama dengan proporsi penduduk Pasir asli/lokal (sekitar 40 persen), sedangkan sisanya 20 persen merupakan pendatang dari daerah lainnya.

Penduduk lokal adalah penduduk asli yang merupakan orang Pasir dan sebagian keturunan Bugis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembaga Adat Pasir, keberadaan penduduk keturunan Bugis yang diakui sebagai penduduk lokal berawal dari sejarah pada masa lalu, yaitu adanya perkawinan orang Pasir dengan orang Bugis, sehingga bahasa yang dipakai adalah campuran bahasa Pasir dengan bahasa Bugis. Masyarakat asli yang berasal dari keturunan raja mempunyai titel 'Aji' atau 'Andi' bagi yang keturunan Bugis. Dikotomi antara penduduk asli dan pendatang tidak menjadi hal yang perlu dipermasalahkan, karena penduduk yang tinggal di Kabupaten

Pasir dianggap sebagai masyarakat Pasir, meskipun tidak semua termasuk Etnis Pasir¹.

Berdasarkan data BPS, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja masih berada di sektor pertanian (55,5 persen). Lapangan pekerjaan diluar pertanian yang cukup banyak dimasuki angkatan kerja adalah sektor jasa yang relatif mudah dimasuki bahkan oleh tenaga kerja berkualitas rendah. Pengelolaan sektor pertanian masih bersifat tradisional, seperti bertani atau berladang. Secara tradisional masyarakat Pasir memperoleh penghasilan dengan cara menggarap ladang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka mengumpulkan hasil hutan seperti kayu dan rotan dan membuka lahan untuk di jadikan ladang tanaman pangan dan palawija. Masyarakat percaya bahwa lahan yang sudah lama di pakai untuk bercocok tanam, lama kelamaan tidak subur lagi, sehingga mereka pindah mencari lahan baru. Pada saat PTP XIII membuka perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN, masyarakat lokal banyak yang menolak untuk menjadi petani plasma, karena belum terbiasa dengan perkebunan kelapa sawit. Minat mereka untuk berkebun sawit timbul setelah melihat kehidupan transmigran yang lebih berhasil sebagai petani kelapa sawit. Keinginan masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahannya untuk perkebunan kelapa sawit diakomodasi oleh pemerintah daerah dengan mengembangkan Program PIR-Swadaya di bawah pembinaan Dinas Perkebunan Tingkat I dan II.

Masalah tanah ulayat di Kabupaten Pasir muncul seiring dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini, yang menyebabkan lahan perkebunan lebih bernilai ekonomi dibandingkan

¹ Etnis Pasir berasal dari perpaduan 5 (lima) etnis, yaitu Etnis Lembuyat (bagian Barat), Etnis Migi (bagian Utara), Etnis Tajur (bagian Timur), Etnis Bukit Sunggit Buro Mato (bagian Selatan) dan Etnis Pematang (bagian Tengah). Kelima etnis tersebut mempunyai 10 (sepuluh) tanah ulayat, yaitu: (1) Balikpapan; (2) Pagatan; (3) Tanjung Aru; (4) Telakei (Panajam)–Longkali–Kuaro; (5) Batu Kajang–Batu Aji; (6) Sungai Biu daerah Sunggit–Sungai Samu–Kerang Batu Angau; (7) Sungai Batu Kajang–Muara Lusan–Tewei; (8) Sungai Batu Kajang ke ilir disebut daerah setio; (9) Sungai Samu sampai ke Lempesu; (10) Lempesu Ilir–Muara Paser (Muara Kendilo)–Paser Benuwo–Belengkong (Iqbal (MI, 2000).

waktu pembukaan lahan. Menurut Kepala Lembaga Adat Pasir, sebagian lahan yang diklaim sebagai tanah Negara merupakan hak adat atau ulayat, tapi pemerintah belum mengakuinya. Seiring dengan diakuinya hak adat atau ulayat, sebagai buah reformasi, masyarakat lokal menuntut pengembalian lahan yang sudah dikuasai perusahaan. Hal ini terjadi pada kasus 10 desa pada tahun 2000, yang merupakan tuntutan masyarakat terhadap PTPN XIII, untuk mengembalikan perkebunan kelapa sawit seluas 2000 Ha (kebun inti) sebagai tanah ulayat mereka. Tanah ulayat biasanya dikuasai secara turun-temurun, sebagian ada yang masih berupa 'ongko' atau lahan hutan. Kasus ini diselesaikan selama 2 tahun, setelah terjadi konflik sosial yang hampir melumpuhkan ekonomi Pasir. Masalah tanah ulayat juga terjadi antara sesama masyarakat Pasir, terutama antara masyarakat keturunan raja (Kerajaan Pasir) dengan masyarakat biasa. Dalam hal ini, masyarakat keturunan raja meyakini sebagian wilayah adalah tanah kerajaan dengan bukti adanya tulisan bersegel dari Belanda dengan cap mahkota, sehingga mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah hak ulayat mereka. Sementara menurut masyarakat Pasir lainnya, tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat Pasir yang bukan keturunan raja. Sengketa tanah ulayat ini menjadi pelajaran penting untuk diperhatikan Pemda pada waktu mengurus ijin untuk pembukaan lahan kelapa sawit selanjutnya, agar konflik sosial dapat dihindarkan.

2.4. SARANA PENUNJANG

Sarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi darat merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit, terutama ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar ibukota kecamatan dan desa yang ada dapat dijangkau melalui jalan darat meskipun sebagian dalam keadaan rusak. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit berada disepanjang jalan Trans Kalimantan antara Kuaro dan Penajam Pasir Utara sehingga dengan adanya jalan Trans

Kalimantan dapat memperlancar pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit dari perkebunan ke pabrik maupun dari pabrik untuk diekspor ke luar kabupaten.

Prasarana jalan dan sarana transportasi yang dapat menjangkau perkebunan kelapa sawit sangat penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan perkebunan kelapa sawit, terutama dalam hal pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan ke pabrik CPO. Untuk menjaga kualitas produksi maka TBS yang baru dipanen membutuhkan waktu cepat (maksimum 8 jam) untuk diproses menjadi minyak sawit. Kelancaran transportasi sangat penting supaya TBS sampai di pabrik CPO tepat waktu. Sejauh ini jalan yang ada dapat menjangkau perkebunan kelapa sawit sehingga dapat memperlancar pengangkutan TBS ke pabrik. Selama ini pengangkutan TBS milik petani plasma PTPN XIII dikelola oleh KUD, sementara bagi petani PIR-Swadaya yang menjual TBS perusahaan swasta, seperti ke PT. Alam Raya, perusahaan yang menyediakan transportasinya.

Desa Padang Jaya yang dijadikan sebagai daerah studi kasus pendalaman dalam penelitian ini, merupakan daerah penempatan transmigran petani plasma kelapa sawit. Wilayah Desa Padang Jaya dengan luas sekitar 12,23 Km², dapat dicapai melalui jalan darat dari jalan trans Kalimantan di ibukota kecamatan. Tersedianya akses jalan yang cukup baik ke desa, memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat untuk ke luar dan masuk desa dengan cukup lancar. Meskipun sarana transportasi kendaraan umum ke desa masih terbatas, hanya tersedia dua kali dalam seminggu, namun dengan banyaknya masyarakat memiliki kendaraan pribadi (sepeda motor), sehingga mobilitas masuk dan keluar desa cukup lancar. Demikian pula tersedianya pasar di kota Kecamatan Kuaro, juga memungkinkan berlangsungnya kegiatan ekonomi desa berjalan cukup lancar.

Kelembagaan Ekonomi

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, khususnya di daerah pedesaan seperti Padang Jaya, tidak terlepas dari dukungan berbagai kelembagaan ekonomi, seperti perbankan (BRI) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Lembaga perekonomian dapat membantu petani dalam mengatasi masalah keuangan, maupun masalah yang berhubungan dengan usaha tani kelapa sawit. Bagian ini melihat lembaga ekonomi yang ada dan sejauhmana dapat dimanfaatkan oleh petani, khususnya petani plasma di Desa Padang Jaya, kecamatan Kuaro.

Lembaga keuangan

Lembaga keuangan, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan layanan pada masyarakat dalam hal keuangan, seperti tabungan, deposito, kredit dan sebagainya. Pada saat ini BRI dan BPR sudah ada sampai ke tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Kuaro untuk memberi layanan perbankan pada masyarakat. Perbankan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani kelapa sawit di Desa Padang Jaya apalagi akses dari desa ke kecamatan sangat mudah. Namun kenyataannya lembaga perbankan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani kelapa sawit. Lembaga perbankan hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil petani yang memiliki lahan perkebunan yang cukup besar, terutama untuk keperluan menyimpan uang. Rendahnya pemanfaatan lembaga perbankan disebabkan karena para petani tidak terbiasa dan tidak berani berhutang dalam jumlah besar. Mayoritas petani memiliki lahan kelapa sawit yang relatif kecil, yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Masalah keuangan terutama yang berkaitan pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh petani di Desa Padang Jaya cukup terbantu oleh keberadaan KUD. KUD berperan penting baik dalam memperlancar pemasaran hasil ke pabrik CPO, maupun dalam mengatasi kesulitan keuangan, termasuk peminjaman uang dalam jumlah kecil.

Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Koperasi yang menurut bentuknya dibedakan atas KUD dan Non KUD tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasir. Di Desa Padang Jaya terdapat sebuah KUD yang bernama KUD Rangan Jaya, dengan jumlah anggota 381 orang. Peranan KUD dalam pengelolaan kelapa sawit di Desa Padang Jaya cukup besar terutama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa.

Koperasi Unit Desa (KUD) di lokasi penelitian merupakan satu dari 7 KUD di Kecamatan Kuaro, yang didirikan sejak tahun 1992, sebagai pengganti dari Badan Koordinasi Tani Hamparan (BKTH). Pada tahun pertama pendirian KUD pelayanan kepada anggota lebih dikonsentrasikan pada proses penjualan/ pemasaran produksi kelapa sawit petani ke PTP XIII. Sebagai koperasi yang berada di tengah masyarakat pekebun, selain berperan dalam bidang pemasaran hasil, juga mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi kelapa sawit. Penyediaan sarana pupuk dan obat-obatan (pestisida) dapat dilayani dengan harga yang bersaing. Dalam tahapan dimana petani belum melunasi kreditnya, kegiatan KUD merupakan kepanjangan tangan dari PTPN dalam pengelolaan kelapa sawit dan proses pengembalian kreditnya. KUD merupakan tangan pertama yang berhubungan dengan petani dan menerima keluhan petani anggotanya dalam hubungannya dengan pola hubungan inti-plasma.

Peran KUD yang sangat penting bagi pengelolaan kebun kelapa sawit petani kelihatannya belum dilakukan secara optimal. Kenyataan selama ini KUD masih belum berdaya sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan petani dalam peningkatan produksi kelapa sawit. Penyediaan pupuk misalnya masih belum seperti diharapkan, selain kelancaran persediaan juga harga yang ditetapkan masih cukup tinggi dan hampir sama dengan harga pasaran. PTPN sebagai bagian dari peranan pemerintah belum berhasil untuk mendekatkan KUD dengan pihak pertama (pabrik pupuk) agar mendapatkan harga yang cukup baik. Selama ini baik pada saat petani masih dibawah pembinaan

langsung PTPN maupun setelah konversi, KUD menerima pupuk dari pihak kedua sehingga bagi kebanyakan petani harga pupuk yang ditetapkan kurang dapat dijangkau. Padahal pabrik pupuk terbesar berada di Kaltim, sehingga seharusnya KUD mampu mendapatkan harga dari tangan pertama agar cukup murah.

Namun KUD berperan cukup besar membantu petani dalam mengatasi masalah keuangan maupun kebutuhan sehari-hari. KUD memberi fasilitas simpan pinjam pada petani dan pinjaman dibayar pada saat panen. Selain simpan pinjam, pelayanan lainnya sejak berdirinya KUD ini antara lain Warung Serba Ada (Waserda) dan penggilingan padi. Kegiatan Waserda masih berlangsung sampai sekarang dan merupakan kegiatan yang sangat populer dan dirasakan menolong kehidupan sehari-hari terutama kebutuhan pangan. Sebagian besar petani memanfaatkan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui pinjaman dan kemudian dibayar dengan memotong penghasilan petani dari penjualan hasil produksi kelapa sawitnya. Keadaan ini berlangsung terus setiap bulan, terutama pada saat pendapatan petani kelapa sawit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Pola kehidupan petani dengan sistem meminjam kepada KUD lebih dulu dan membayar kemudian, seringkali berdampak sisa penghasilan kecil atau bahkan minus, terutama apabila penghasilan rendah. Keadaan semacam ini menjadikan peran KUD melalui kegiatan Waserda semakin penting dan sangat diharapkan karena banyak menolong anggota dalam kesulitan keuangan.

Kelompok tani

Dalam mengelola kebun plasma di Desa Padang Jaya, petani tergabung dalam 14 kelompok tani, yang dibentuk berdasarkan kesamaan hamparan kebun sawit. Setiap hamparan kebun luasnya bervariasi sekitar 50-60 Ha dan dikelola oleh sekelompok petani dengan jumlah anggota bervariasi antara 17 sampai 33 orang, dengan rata-rata garapan seluas 2 Ha per anggota kelompok. Pembentukan kelompok tani dalam pola PIR-Bun semula bertujuan terutama untuk

mempermudah pengorganisasian petani peserta oleh PTP XIII. Sehingga proses awal pembentukan bukan merupakan kehendak masyarakat, tetapi dibentuk oleh pihak Pembina yaitu perusahaan inti. Pembentukan lebih didasarkan pada satuan hamparan kebun yang merupakan hasil dari undian petani sewaktu konversi. Cara ini ditempuh untuk mempermudah pembinaan petani maupun pengelolaan kebunnya.

Anggota kelompok tani adalah anggota KUD, sehingga KUD berfungsi juga membina semua kelompok tani. Setiap kelompok tani mempunyai seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Ketua Kelompok Tani bertanggung jawab untuk membantu anggota kelompok pada saat panen, baik dalam menetapkan waktu panen, mencatat jumlah anggota yang akan panen sampai memberi informasi pada anggota. Selain itu, ketua juga menguasai lokasi 'hamparan' atau lokasi perkebunan kelapa sawit para anggota kelompok, sehingga mempermudah pengaturan transportasi dari lokasi hamparan ke pabrik. KUD juga berperan mengkoordinir kelompok tani dalam pembinaan usaha tani mulai dari penyediaan kebutuhan sarana produksi (seperti pupuk dan obat-obatan) sampai ke memfasilitasi penjualan TBS ke pabrik.

Pada tahap sebelum petani melunasi kredit pada perusahaan, kelompok tani berfungsi mempermudah KUD maupun PTP XIII berkomunikasi dengan petani peserta PIR-BUN. Penyampaian pembinaan maupun informasi dapat dilakukan melalui ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani kemudian mengadakan pertemuan dengan anggotanya untuk menyampaikan informasi atau merencanakan kegiatannya. Pola hubungan semacam ini terus berlangsung sampai saat ini dan telah tersosialisasi dengan baik di kalangan petani. Hampir tidak ada petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani.

2.5. KESIMPULAN

Kabupaten Pasir merupakan *leading* bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan dengan areal kelapa sawit

terluas dibandingkan kabupaten lainnya dimana separuh dari areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur terdapat di kabupaten ini. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan untuk ditanam kelapa sawit. Kondisi lahan yang ada cukup mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit meskipun kesuburan sebagian tanah kurang mendukung untuk perkebunan kelapa sawit, namun dengan keberadaan sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Pasir dapat meningkatkan kesuburan tanah disekitar aliran sungai.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit milik rakyat kurang didukung oleh sumber daya manusia. Secara kuantitas sumber daya manusia yang ada dapat mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit meskipun pada awal pengembangannya tahun 1986/87, tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit didatangkan dari Jawa. Akan tetapi, dengan kualitas SDM yang relatif rendah dan kurangnya minat generasi muda pada pekerjaan usahatani kelapa sawit maka hal ini dapat menjadi kendala bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit pada masa yang akan datang. Selain itu, masalah hak ulayat terhadap kepemilikan lahan merupakan potensial menjadi kendala bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Keberadaan lembaga perbankan kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh petani plasma kelapa sawit sehingga dalam mengatasi keuangan petani memanfaatkan KUD yang ada di desa. Disamping membantu petani mengatasi masalah keuangan (simpan-pinjam), peranan KUD cukup besar. Bersama dengan kelompok tani, KUD membantu pemasaran hasil kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit.

BAB III

DINAMIKA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: Perkembangan Kebijakan, Produksi dan Pemasaran

Pengembangan sub-sektor perkebunan dengan pola PIR-BUN merupakan program nasional yang bertujuan terutama untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaannya, pola PIR-BUN biasanya menggunakan tenaga kerja yang dikaitkan dengan program transmigrasi, sehingga pola yang juga biasa disebut PIR-TRANS, bermanfaat dalam membantu pemerataan penduduk ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, yang umumnya masih relatif jarang. Pola PIR-BUN melibatkan dua pihak utama yaitu perusahaan perkebunan sebagai inti dan petani sebagai plasma. Perbedaan fungsi kedua pihak (inti dan plasma) menandakan adanya pembagian tanggung jawab antara perusahaan besar (inti) dan petani (plasma). Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi, pemasaran hasil, manajemen pengelolaan kebun, sedangkan petani plasma bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun, penyediaan tenaga kerja dan melaksanakan panen hasil produksi sesuai dengan standar yang ditentukan. Dengan demikian perusahaan inti berkewajiban mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap petani plasma, sehingga menjadi pekebun kelapa sawit sesuai dengan standar yang diperlukan. Demikian pula perusahaan berkewajiban melakukan alih teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta pengolahan hasil produksi lebih lanjut. Perusahaan inti juga berperan penting dalam pemasaran hasil produksi kelapa sawit, sehingga perkembangan perekonomian yang terkait dengan kelapa sawit diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Petani sebagai pihak yang mengelola perkebunan plasma, bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya produksi kelapa sawit sesuai dengan standar yang dibutuhkan pabrik. Sikap dan motivasi

petani dalam mengelola kebun secara baik, akan menentukan sukses dan gagalnya usaha perkebunan kelapa sawit selanjutnya. Apabila masing masing pihak baik perusahaan inti maupun petani plasma dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, maka usaha perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mencapai tujuan pokoknya yaitu menyediakan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Pasir yang diawali dengan pola PIR-BUN, sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Bagaimana perkembangannya selama ini apakah cukup berhasil dalam mencapai tujuannya? Bagian ini akan membahas dinamika perkembangan perkebunan kelapa sawit di daerah ini, sehingga diharapkan dapat melengkapi analisis penyerapan tenaga kerja terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dinamika di sini dapat diartikan sebagai suatu perkembangan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilihat dari segi waktu. Dengan demikian dinamika merupakan gambaran perubahan perkebunan kelapa sawit dari waktu ke waktu, yang meliputi perkembangan kebijakan dan iklim investasi luas areal perkebunan kelapa sawit serta perkembangan produksi dan harga pasar.

3.1. KEBIJAKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN IKLIM INVESTASI

Perkembangan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit baik di tingkat provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat menggambarkan dinamika perkebunan kelapa sawit dan iklim investasi yang diciptakan oleh pemerintah agar dapat menarik investor dalam maupun luar negeri. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir dalam pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan antara lain melalui penekanan pada pengembangan perkebunan rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani kecil, mengundang investor untuk mengadakan investasi perkebunan besar dan meningkatkan produksi

maupun harga kelapa sawit yang menguntungkan semua pihak terutama petani kecil.

Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit

Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Kabupaten Pasir khususnya masih memiliki lahan yang cukup luas sebagai cadangan untuk pengembangan perkebunan

kelapa sawit. Luas kawasan budi daya non-kehutanan (KBNK) di Kabupaten Pasir yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit, baru sekitar 27,64 persen dikembangkan. Dengan demikian potensi kawasan untuk pengembangan perkebunan masih cukup luas yaitu sekitar 72,36 persen dari total kawasan.

Berdasarkan potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Pasir, pemerintah daerah Kabupaten Pasir menekankan kebijakan pembangunan daerah untuk mengembangkan sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan beberapa komoditi perkebunan, terutama kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang antara lain menekankan pada :

“Terwujudnya ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan keberpihakan kepada petani, pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta kemitraan dengan usaha besar dalam upaya peningkatan lapangan kerja “

Sejalan dengan sasaran pembangunan yang mengutamakan ekonomi kerakyatan, maka dalam kaitan dengan perkebunan rakyat pemerintah daerah juga mempunyai VISI dan Misi Pembangunan sebagai berikut:

” Terciptanya Kabupaten Pasir sebagai daerah pengembangan Agro industri yang berwawasan lingkungan dan masyarakat Pasir yang mandiri, bertaqwa dan berakhlak mulia, berkualitas, berdaya

*saing tinggi yang hidup dalam suasana damai
demokratis dan adil “*

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir lebih ditekankan pada perkebunan rakyat. Dalam perkembangannya perkebunan rakyat telah berkembang cukup pesat, baik yang dikembangkan melalui Perkebunan Kelapa sawit pola PIR-BUN yang didanai dari APBN maupun dengan pola PIR-Swadaya yang didanai dari APBD. Perkebunan Kelapa sawit dengan pola PIR-BUN sebagian besar sudah selesai programnya dan untuk terus meningkatkan perkebunan rakyat Pemda Kabupaten Pasir mengembangkan PIR-Swadaya. Perkebunan dengan pola PIR-swadaya ini merupakan kebijakan provinsi dan daerah, dengan lokasi perkebunan yang tersebar pada lima kecamatan yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Grogot dan Ps. Belengkong.

Kebijakan Pemda dalam pengembangan pola PIR Swadaya sangat penting karena dimaksudkan antara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kehidupan petani plasma (PIR-PTPN) dengan masyarakat di sekitarnya (petani lokal). Animo masyarakat untuk mengikuti jejak petani plasma dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan terbatasnya kemampuan PTPN dalam menampung petani lokal (hanya 20%), menyebabkan upaya Pemda mendapat sambutan positif dari masyarakat Pasir. Apalagi Kabupaten Pasir masih memiliki potensi lahan KBNK yang cukup luas untuk merealisasikan pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Program PIR-Swadaya dinilai strategis oleh berbagai pihak karena dapat mengurangi kecemburuan sosial antara penduduk setempat dan para pendatang (transmigran). Keadaan ini sangat penting karena keamanan dalam berusaha bagi para investor sangat diperlukan. Dengan pengembangan PIR-Swadaya berarti pemerintah daerah telah memprioritaskan keterlibatan petani dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah program PIR-Swadaya mulai menghasilkan, kebutuhan perluasan pasar TBS dilakukan Pemda Kabupaten dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha

besar. Kebijakan tersebut telah membantu petani untuk memperbaiki pendapatannya, karena adanya persaingan harga antara PTPN (yang selama ini memonopoli pemasaran) dengan perusahaan swasta.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya merupakan prioritas kebijakan pembangunan daerah, khususnya sub-sektor perkebunan. Dibandingkan dengan Kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN, yang merupakan bagian dari kebijakan PIR-nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat yaitu Departemen Perkebunan. Sumber dana berasal dari bank dunia dan BRI, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir sebagai pihak penerima proyek, menyediakan lahan melalui program transmigrasi nasional, dan bekerja sama dengan Departemen Perkebunan melalui PTPN menyiapkan lahan tersebut sebagai hamparan kebun kelapa sawit, di samping menyiapkan kebun inti di beberapa lokasi (Tajati dan Longkali). Semua paket untuk persiapan awal pengelolaan kelapa sawit disediakan oleh perusahaan inti (PTPN) yaitu bibit, pupuk, obat-obatan, yang akan dibayar kembali oleh petani setelah kelapa sawit menghasilkan. Penguasaan lahan perkebunan oleh PTPN dengan pola PIR-BUN merupakan bagian dari program nasional, yang melibatkan Departemen Perkebunan dan Departemen Transmigrasi. Sebelum otonomi daerah, semua ijin untuk pemanfaatan lahan negara menjadi wewenang pemerintah pusat. Pengembangan perkebunan Kelapa Sawit-Swadaya sepenuhnya dibiayai dari APBD Kabupaten Pasir.

Perbedaan sifat kedua pola tersebut, berdampak dalam proses selanjutnya. Pada PIR-Swadaya, peran Pemda sangat dominan terhadap pembinaan petani lokal dan pemasaran hasilnya, karena sumber dana berasal dari APBD provinsi dan kabupaten. Petani peserta menyediakan lahan sendiri, dan dilibatkan dalam pelaksanaan sejak awal yaitu persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan dan seterusnya. Untuk pembiayaan selama persiapan, petani menerima paket berupa bibit, pupuk, obat-obatan, dan pembinaan dari Dinas Perkebunan provinsi atau kabupaten. Sebagian paket ini harus dibayar kembali secara kredit oleh petani swadaya, setelah kebun menghasilkan. Sebagai manager pengelola PIR swadaya adalah Ketua

UPP PIR swadaya yang mendapat wewenang dari Disbun Provinsi dan dibantu oleh KUD di setiap kecamatan. Selain memimpin pengelolaan kebun kelapa sawit, kepala UPP juga berperan sebagai penghubung dalam pemasaran hasil ke pihak perusahaan pengolahan CPO atau ke perusahaan swasta yang berinvestasi di lokasi perkebunan.

Beberapa kebijakan pembangunan ekonomi rakyat di Kabupaten Pasir yang dapat menunjang pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah Kebijakan pengembangan agro industri dengan basis perkebunan rakyat. Sejalan dengan visi pembangunan di Kabupaten Pasir diharapkan kebijakan ini mampu mengembangkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk tercapainya tujuan tersebut salah satu kondisi yang diperlukan adalah sinkronisasi berbagai pihak sesuai dengan bidang masing masing dalam mencapai tujuan tersebut. Kerja sama antara pihak Pemerintah, Perkebunan Besar/Swasta dan Petani perkebunan kecil sangat perlu untuk dibina.

Pola dan sistem pengelolaan PIR-BUN

Pola dan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit PIR-Bun dimulai sejak pembangunan kebun untuk pesertanya sampai dengan peserta terakhir lunas membayar kreditnya (satu siklus proyek) (Dirjend perkebunan, 1982). Dalam satu siklus proyek terdapat dua (2) tahapan yaitu tahap pertama pembangunan kebun peserta dan tahap kedua pembayaran kredit. Antara dua tahap ini dibatasi tahap konversi yaitu penyerahan kebun kepada peserta dengan ditandai penandatanganan akad kredit dengan Bank. Dengan keadaan ini maka pola dan sistem pengelolaan baru dapat dimulai secara penuh setelah dilakukan konversi.

Pada tahap persiapan pembangunan kebun, tanggung jawab pelaksanaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan inti dan peserta (petani plasma) masih dianggap sebagai buruh. Dalam tahap ini proses pengalihan teknologi kepada petani sebenarnya sudah dapat dimulai. Sebelum konversi petani peserta memperoleh upah

karena bekerja dalam pembukaan kebun, penanaman dan pemeliharaan perkebunan. Biaya pembukaan perkebunan ini merupakan komponen kredit yang akan dibayar oleh petani.

Pola hubungan inti-plasma: sistim dan pelaku

Tujuan utama pembangunan perkebunan dengan pola PIR-Bun adalah meningkatkan kesejahteraan petani plasma yang menjadi pesertanya . Tujuan ini akan dapat tercapai bilamana petani berhasil dalam mengembangkan produksi tanaman pokoknya (kelapa sawit). Jadi keberhasilan tanaman kelapa sawit ini merupakan masalah pokoknya dan tujuan utamanya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sedang pengembangan wilayah merupakan dampak dari keberhasilan ini.

Pada prinsipnya pembangunan perkebunan dengan pola PIR-Bun merupakan upaya untuk memadukan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat dalam suatu proses produksi. Perusahaan perkebunan sebagai inti dan petani sebagai plasmanya. Sebagai perusahaan inti bertanggung jawab pada proses produksinya, pengolahan hasil dan pemasarannya. Sedang sebagai plasma bertanggung jawab pada hasil bahan yang diolah (Buah kelapa sawit-TBS) sebagai bahan mentah perusahaan inti. Prinsip hubungan mereka adalah saling menguntungkan.

Secara lebih rinci tanggung jawab perusahaan inti selama proses hubungan masih berlangsung (sebelum kredit lunas) dapat dibedakan dalam dua tahapan yaitu sebagai pelaksana dan sebagai inti. Sebagai pelaksana perusahaan perkebunan (PTP XIII) berkewajiban membangun kebun sampai dengan siap konversi menurut standar teknis, membangun rumah tinggal dan lahan pertanian pangan, mengatur penempatan peserta dan melaksanakan konversi. Sebagai inti maka perusahaan bertanggung jawab untuk membantu petani mendapatkan sarana produksi, membimbing peningkatan produksi, membeli dan mengolah hasil produksi termasuk menetapkan harga TBS dan membantu penyaluran kredit ke Bank.

Dari pembagian tugas seperti tersebut diatas maka sebagai suatu kesatuan usaha diharapkan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan. Dalam kenyataan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Perusahaan perkebunan sebagai inti sampai pada saat ini telah melakukan kewajiban seperti tersebut diatas meskipun demikian masih terdapat kendala yang berdampak pada kualitas pengelolaan perkebunan. Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan perkebunan seperti pupuk dirasakan petani kurang lancar dan mahal, sehingga petani merasa kesulitan. Pihak perusahaan tidak memberikan jalan keluar yang pasti sehingga pemupukan jarang dilakukan. Keadaan ini tentu akan berdampak pada produksi.

Sistim dan pelaku

Dari analisis sebelumnya terlihat bahwa pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun adalah pihak pemerintah, petani dan perbankan. Hubungan dari ketiga pihak harus harmonis untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan petani peserta. Pihak pemerintah, melalui PTP XIII selaku perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan petani plasma, petani plasma berkewajiban untuk memelihara kebun agar dapat berproduksi dengan baik untuk mensuplay bahan baku di perusahaan CPO. Perbankan berperan untuk menyediakan dana serta menerima dan mengatur pengembalian cicilan kredit. Bila hubungan ini dilakukan dengan baik maka akan timbul hubungan yang saling menguntungkan (Dirjen Perkebunan, 1982)

Pembinaan perkebunan kelapa sawit PIR-Bun dilaksanakan dengan pola pembangunan pedesaan. Pembinaan petani peserta dilakukan dengan pembangunan yang menyeluruh baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dari aspek sosial pengelolaan peserta PIR-Bun dilakukan dengan membangun pendidikan, kesehatan dan pengorganisasian masyarakat. Dari aspek ekonomi pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun dilakukan dengan pembinaan sistim usaha tani

(pembangunan pertanian) dengan sasaran peningkatan kualitas petani (professional) dan produksi pertanian. Oleh sebab itu sebagai petani yang professional harus dapat mengelola usahanya secara baik dan efisien. Dengan pendekatan semacam ini maka pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan akan semakin banyak baik dari instansi pemerintah maupun swasta/LSM.

Investor dan iklim investasi

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, strategi dan program pengembangan sektor perkebunan yang berbasis ketenagakerjaan. Pemda sebagai daerah otonom dapat memberikan berbagai kemudahan baik terhadap investor maupun masyarakat petani, antara lain kemudahan ijin, keringanan pajak dan peningkatan sarana dan prasarana, pemberian subsidi atau paket kredit untuk petani pemula. Melalui kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, Pemda melalui program pembangunan ekonomi rakyat juga dapat memberi dukungan berupa kemudahan untuk mengakses modal bagi petani plasma yang memerlukan dana untuk replanting atau perluasan lahan. Sebagai daerah otonom, Pemda kabupaten dengan melibatkan lembaga adat juga lebih berwenang untuk mengklarifikasi status tanah, sebagai tanah negara atau tanah adat, sehingga investor mempunyai kepastian status hukum penguasaan lahan sebelum mengelola perkebunannya. Kerancuan mengenai status tanah dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan sosial, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sub-sektor perkebunan.

Provinsi Kalimantan Timur telah merencanakan untuk mengembangkan perkebunan Kelapa Sawit dengan target seluas satu juta Ha. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan berbagai upaya menarik investor baik domestik maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Timur. Beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan antara lain berkaitan dengan letaknya yang strategis terutama karena Kalimantan Timur berbatasan langsung

dengan Malaysia, Brunei Darusalam, Filipina sehingga memungkinkan untuk mengembangkan jalur perdagangan internasional. Sumber daya alam yang melimpah dan tersedianya sarana komunikasi (transportasi, telepon, bandara dan pelabuhan internasional) dapat melancarkan proses investasi.

Berbagai pertimbangan yang juga dinilai kondusif untuk melakukan investasi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- Kondisi politik dan keamanan yang relatif stabil
- Dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kemudahan prosedur perijinan dan insentif yang menarik berupa pembebasan dan pengurangan dari pungutan impor atas proyek-proyek yang memperoleh persetujuan PMDN dan PMA
- Penangguhan pembayaran PPn dan PPnBM serta penundaan pelunasan PBB sampai 5 tahun pertama.
- Penyediaan lahan yang relatif luas untuk perkebunan kelapa sawit

Faktor-faktor tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia bagian timur pada umumnya. Dalam rangka untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi telah menyiapkan kawasan budidaya non-kehutanan (KBNK) seluas 5,32 juta Ha. Berdasarkan potensi lahan KBNK tersebut, telah dikeluarkan ijin lokasi terhadap 188 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan areal seluas 3,146 juta Ha. Akan tetapi realisasi tanam selama ini baru mencapai seluas 315.803 Ha pada tahun 2003 atau sekitar 10 persen dari keseluruhan areal di Kaltim. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, areal KBNK yang disediakan wilayah Kabupaten Pasir (termasuk PPU) seluas 609.015 Ha dan telah dikeluarkan ijin lokasi sebanyak 219.460 Ha atau sekitar 35 persen dari luas KBNK yang telah disediakan. Sedangkan realisasi tanam baru pada tahun 2003

mencapai 96.281 Ha atau sekitar 45 persen (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten telah mencoba untuk meningkatkan upaya menarik investor dengan mengeluarkan ijin lokasi pada sejumlah PBS namun realisasi tanam masih jauh dari harapan karena secara keseluruhan masih rendah. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengapa realisasi tanam rendah sedangkan lahan yang sudah memperoleh ijin lokasi cukup luas. Informasi dari berbagai pihak menunjukkan adanya dua kemungkinan yaitu: (1) pembukaan perkebunan memerlukan dana yang besar dan para investor belum siap untuk merealisasikan semua areal perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ijin lokasi. (2) Kemungkinan para investor lebih tertarik memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan lain seperti penebangan kayu, daripada untuk perkebunan kelapa sawit. Diperoleh informasi bahwa banyak lokasi hutan di Kalimantan Timur telah ditebang kemudian dibiarkan dan tidak ditanami tanaman pengganti. Keadaan ini berakibat semakin meluasnya kawasan hutan yang gundul dan menimbulkan banjir pada musim hujan untuk daerah tertentu. Penyimpangan pemanfaatan lahan tersebut selama ini kurang mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat menjadi kendala serius untuk mencapai target pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini. Dalam upaya untuk mengurangi penyimpangan tersebut, beberapa kabupaten telah melakukan pencabutan ijin lokasi terhadap investor yang tidak serius menggunakan lahan sesuai dengan ijin lokasi, dan menyediakannya bagi investor yang lebih serius.

3.2. PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: LUAS AREAL, PRODUKSI DAN HARGA PASAR.

Luas Areal Perkebunan

Di Indonesia perkembangan perkebunan kelapa sawit skala besar sudah cukup lama berlangsung yaitu sejak masa penjajahan (Belanda

maupun Inggris). Perkebunan-perkebunan besar berkembang dengan pesat di berbagai daerah di Indonesia terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Pada masa kolonial, perkembangan perkebunan sangat terkait dengan politik ekonomi penjajah yang memanfaatkan daerah jajahan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan ekonomi di negara asalnya. Petani pada masa penjajahan umumnya berstatus sebagai buruh/kuli kontrak yang lebih cocok disebut buruh paksa karena seringkali memperoleh perlakuan yang tidak adil. Buruh kontrak tersebut banyak didatangkan dari Pulau Jawa yang penduduknya lebih banyak dan lebih padat dibandingkan daerah lain di luar Pulau Jawa yang umumnya masih jarang. Di samping perkebunan besar, masyarakat sekitar juga mengembangkan perkebunan rakyat dengan skala kecil. Namun perkebunan rakyat ini sulit berkembang karena masih dikelola secara tradisional dan harus bersaing dengan perusahaan besar yang dikelola secara lebih profesional.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih perkebunan kelapa sawit besar yang sebelumnya dikuasai penjajah, di bawah koordinasi departemen terkait. Pada waktu itu perusahaan perkebunan besar dan perkebunan rakyat berjalan dan berkembang sendiri sendiri, sehingga terdapat ketimpangan yang besar antar kedua pola perkebunan tersebut. Banyak perkebunan besar yang berkembang sebagai raja di antara perkebunan rakyat yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah melakukan perubahan dalam sistim usaha perkebunan yang dapat meningkatkan usaha perkebunan rakyat. Sejak Repelita II (1974/75-1979/80), pemerintah mengembangkan progam PIR-BUN, yang bertujuan untuk memadukan perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat. Pelaksanaan pola PIR dimulai tahun 1977/78 (NES I) yang berlokasi di D.I. Aceh dan Sumatra Selatan (Dirjen Perkebunan, 1982).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang pembukaannya dimulai sejak tahun 1982/1983, merupakan realisasi pengembangan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN ke arah Indonesia bagian Timur, terutama Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR-BUN), adalah perkebunan kelapa sawit pertama yang melibatkan Perusahaan Negara yaitu PTPN XIII sebagai perusahaan inti dan melibatkan transmigran sebagai petani plasma. Pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir disiapkan sejak tahun 1982, dan beroperasi melibatkan transmigran sejak tahun 1987. Kerjasama antara Departemen Perkebunan dengan Departemen Transmigrasi, berhasil menempatkan sekitar 8500 KK transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai petani plasma yang ditempatkan di Unit Penempatan Transmigran (UPT) Kabupaten Pasir. Dari jumlah tersebut, sekitar 350 kepala keluarga ditempatkan di UPT Kecamatan Muara Kuaro yaitu tepatnya di Desa Padang Jaya (semula bernama Desa Ranah Jaya).

Program PIR-Transmigrasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengelola kebun kelapa sawit yang baru dibuka di Kabupaten Pasir, dan kemudian menjadi petani plasma (Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. 2003). Pada waktu itu masyarakat lokal umumnya tidak tertarik menjadi petani plasma perkebunan kelapa sawit. Pada tahap permulaan, kelapa sawit merupakan tanaman yang asing bagi penduduk Kaltim pada umumnya, bahkan juga bagi para transmigran yang umumnya sebagai petani tanaman pangan di tempat asalnya. Selama masa tanam (sebelum pohon berproduksi) para petani plasma yang masih berstatus 'buruh' perusahaan, memperoleh pembinaan atau bimbingan pengelolaan kelapa sawit sesuai standar perusahaan. Selama masa bimbingan, mekanisme pekerjaan telah diatur sesuai standar perusahaan, antara lain kegiatan pemupukan, pengobatan tanaman, pemeliharaan, panen bahkan pemasarannya. Setelah kelapa sawit menghasilkan TBS (setelah 5 tahun masa tanam), masing-masing petani bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan yang menjadi bagiannya (2 Ha), namun beberapa kegiatan masih dilakukan secara kolektif bersama kelompok masing-masing, terutama waktu panen dan pemasaran hasil ke pabrik, serta penerimaan hasil penjualan. Panen yang dilakukan secara periodik (setiap 2 minggu -1 bulan), menjadikan petani plasma tetap menganggap hasil penjualan TBS miliknya sebagai "bayaran atau

gajian”, karena biasanya hasil panen dibayar perusahaan secara serentak, setelah sebulan hasil TBS diserahkan ke pabrik. Hal ini berbeda dengan petani tanaman pangan yang memperoleh hasilnya setelah satu musim tanam-panen, dan tidak terikat pada kegiatan kelompok tani.

Sebelum masyarakat mengenal perkebunan kelapa sawit, kebanyakan penduduk setempat adalah petani pangan tradisional yang bercocok tanam dengan cara ladang berpindah. Pada waktu itu mereka belum tertarik dengan cara bertani yang modern dan menetap, karena pemilikan lahan masih luas, dan penduduk relatif jarang. Di samping petani pangan, mereka juga memanfaatkan hutan yang masih luas untuk berburu binatang dan mengambil hasil hutan seperti damar, rotan dan buah-buahan. Penduduk setempat baru tertarik dengan perkebunan kelapa sawit, setelah petani plasma (PIR-BUN) menghasilkan dan mengalami perbaikan kehidupan sosial ekonomi di Pasir. Timbulnya keinginan masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan sendiri menjadi kebun kelapa sawit, kemudian mendapat respon dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dengan melaksanakan program PIR-Swadaya yang dimulai sejak tahun 1992 dengan bantuan dari APBD I (Tingkat Provinsi), kemudian dilanjutkan dengan APBD II (tingkat kabupaten) pada tahun 2002.

Selama tahun 1998-2002, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir meningkat dari 46.680,19 menjadi 52.226,2 Ha (atau meningkat sekitar 12 persen). Perkembangan luas areal pada 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan kelapa sawit telah dapat memberikan hasil yang baik dan menarik bagi para investor dalam maupun luar negeri serta partisipasi masyarakat petani terutama penduduk setempat semakin besar. Keadaan ini juga didukung oleh kenyataan bahwa ternyata proporsi terbesar areal perkebunan kelapa sawit adalah Perkebunan rakyat. Perkebunan Besar milik Negara pada tahap awalnya memang mengembangkan perkebunan dengan pola pola PIR, sehingga setelah para petani plasma sudah mandiri (lepas dari kredit) perkebunan kelapa sawit yang dikuasai perusahaan hanya dari kebun inti saja yang luasnya relatif kecil. Dilihat dari pola

penguasaan lahan, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir dapat dikelompokkan pada 3 pola yaitu : (1) Perkebunan Rakyat; (2) Perkebunan Besar Negara (PTP) dan (3) Perkebunan Besar Swasta (PBS). Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasir (termasuk Penajam Pasir Utara) seluas 64.059,5 Ha, proporsi terbesar merupakan areal Perkebunan Rakyat (45,5%), dan proporsi terkecil adalah Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 23,4%) (Tabel 3.1).

Tabel 3.1.

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Pola Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pasir (termasuk Penajam Pasir Utara) Tahun 2002.

Kepemilikan	Luas Areal		Produksi	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Produksi (Kg)	Rata-rata Produksi/Ha (Kg)
Perkebunan Rakyat	29.187,7	45,5	227.348.133	12.519,76
Perkebunan Besar Negara atau PTP	14.987	23,4	156.395.772	13.367,16
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	19.884,8	31,1	98.277.743	7.705,52
Jumlah	64.059,5	100	482.021.648	

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir, 2003

Produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasir sebagian besar dihasilkan oleh Perkebunan Rakyat yaitu 46 persen dari total produksi sebanyak 482.021.648 Kg pada tahun 2002. Produksi terbesar kedua dihasilkan oleh perusahaan negara (32,4%) dan perusahaan swasta sebanyak (20,3%) (Tabel 3.1). Dengan demikian, perkebunan rakyat masih dominan dalam memberi kontribusi pada perekonomian daerah. Meskipun demikian ternyata produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat lebih rendah dari perkebunan besar negara. Rendahnya produktivitas kelapa sawit milik rakyat kemungkinan disebabkan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang masih kurang serta

penggunaan bibit yang kurang baik. Pemilihan bibit sawit merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam perkebunan kelapa sawit, karena sangat mempengaruhi kualitas hasil produksi. Bibit yang kurang bagus akan menghasilkan buah sawit yang kualitasnya juga kurang bagus yaitu bercangkang besar, sabut tipis dan isi kecil, sehingga hasil CPO juga relatif sedikit.

Perkebunan rakyat kelapa sawit yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari dua pola yaitu perkebunan rakyat dari petani plasma (PIR-BUN) dan petani rakyat yang dikembangkan dengan pola pola PIR-Swadaya. Perkebunan Inti Rakyat dengan pola Swadaya yang dikembangkan oleh Pemda Kabupaten Pasir dimaksudkan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat lokal menjadi petani plasma. Program ini dimulai pada tahun anggaran 1991/1992 dengan dana sebesar Rp. 3.364.600.000,- untuk pembangunan kebun seluas 4.324 Ha yang melibatkan 2.877 orang (Dinas Perkebunan Prop. Kaltim, 2003). Program PIR Swadaya direncanakan berjalan selama 10 tahun akan tetapi kenyataan baru dapat diselesaikan setelah berjalan selama lebih kurang 12 tahun. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan programnya mendapatkan kendala dalam pendanaan dari APBD Provinsi pada periode anggaran tahun 1996/1997 sampai tahun 2001/2002. Sejak tahun anggaran 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir melanjutkan program ini melalui dana dari APBD Kabupaten dengan menambah luas areal sebesar 100 Ha. Semua petani yang terlibat pada PIR-Swadaya adalah petani lokal yang memanfaatkan lahan milik sendiri, dan mendapat pembinaan dari Dinas Perkebunan Tk I dan II, dan pembiayaan dari APBD I dan APBD II. Setiap petani yang terlibat dalam pola PIR-Swadaya memperoleh bantuan berupa paket bibit, pupuk, obat-obatan dan bantuan uang (setengah biaya) untuk pembukaan lahan. Perkembangan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir sejak awal sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Luas Areal dan Petani Perkebunan Kelapa Sawit PIR-Swadaya
di Kabupaten Pasir Menurut Tahun Anggaran 1991/1992-
2002/2003.

Tahun Anggaran	Luas Areal (Ha)	Jumlah Petani (KK)
1991/1992	272,69	203
1992/1993	1.194,20	877
1993/1994	752,24	520
1994/1995	855,46	548
1995/1996	1.150,33	729
2002	100,00	67
Jumlah	4.324,92	2.937

Sumber: Dinas Perkebunan, Kabupaten Pasir, 2003

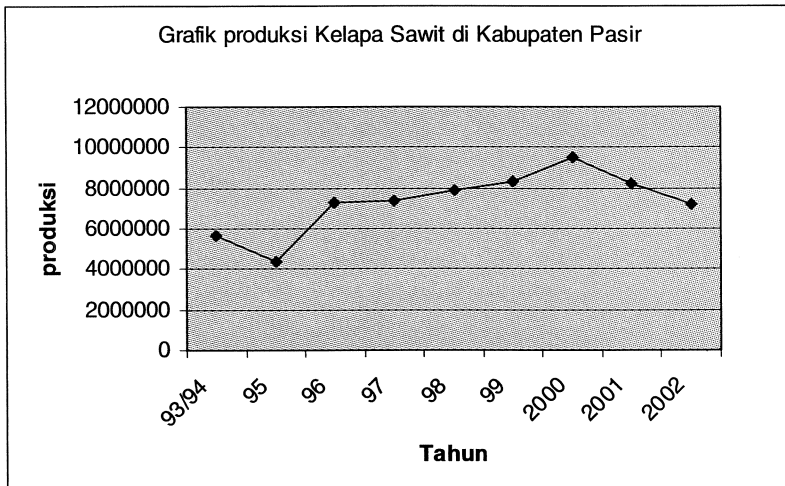
Perkebunan kelapa sawit milik rakyat terdiri dari perkebunan yang kini dimiliki petani plasma PTPN XIII, perkebunan petani PIR-Swadaya dan petani swadaya murni. Petani plasma dari PTPN XIII di Kabupaten Pasir yang berjumlah 8500 KK memperoleh kebun plasma seluas 17.000 Ha, sehingga masing-masing keluarga memperoleh lahan kelapa sawit seluas 2 Ha. Sebagian besar petani plasma (sekitar 80 persen) adalah transmigran dari Jawa, selebihnya merupakan transmigran lokal. Dalam proses pengelolaan kebun sawit, disinyalir banyak petani plasma dari masyarakat lokal yang meninggalkan lokasi begitu saja, atau digantikan oleh pendatang dengan harga murah. Sedangkan perkebunan rakyat pada PIR-Swadaya dan swadaya murni sesuai dengan maksud pembangunannya, hampir semua dimiliki oleh penduduk lokal (Pasir).

Produksi Kelapa Sawit

Dinamika perkebunan kelapa sawit juga dapat dilihat dari perkembangan produksi kelapa sawit selama 10 tahun terakhir (tahun 1993-2003). Dinamika produksi kelapa sawit dapat dilihat berdasarkan hasil produksi tahunan dari perkebunan di Desa Padang Jaya yang dikelola oleh KUD setempat. Sampai pada batas umur

tanaman tertentu, produksi kelapa sawit menunjukkan trend yang meningkat yaitu dari tahun 1993 - 2000. Pada tahun 1996-1998 hasil produksi relatif tidak berubah, mungkin sebagai dampak kurangnya pemeliharaan kebun sebelumnya Pada 4 tahun berikutnya (2000-2003), produksi cenderung menurun, yang menunjukkan semakin rendahnya kualitas pemeliharaan kebun. Hasil produksi kelapa sawit menunjukkan posisi tertinggi pada tahun 2000 yaitu 9.535.440 Kg atau rata rata 23.371 Kg/ unit/2 Ha. Menurut pihak KUD, hasil produksi ini tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan produksi yang seharusnya dihasilkan. Pada umur tanaman lebih dari 15 tahun, seharusnya produksi paling rendah sekitar 30.000 kg/unit/2 Ha.

Grafik 3.1.
Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir

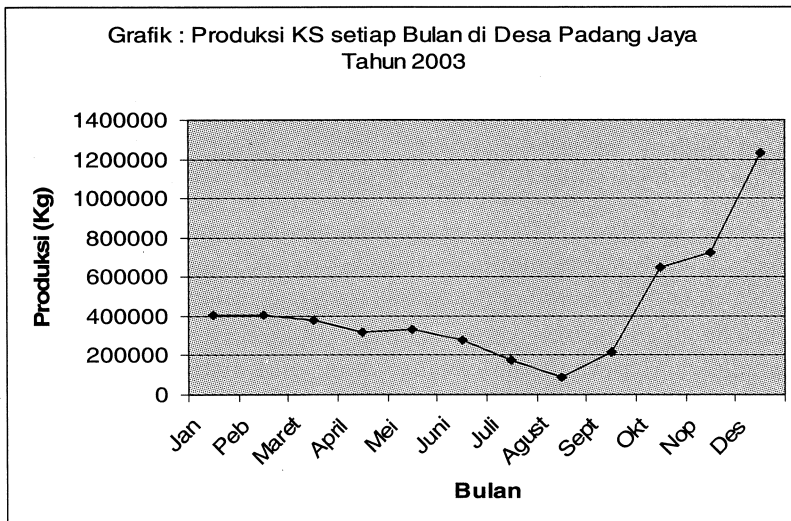


Sumber: diolah dari data KUD, 2003

Fluktuasi produksi kelapa sawit setiap bulan yang dihasilkan oleh petani juga dapat digambarkan dalam grafik produksi kelapa sawit tahun 2003. KUD bersama dengan pihak PTP mencoba meningkatkan produktivitas petani peserta yang diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan petani kelapa sawit. Penghasilan petani dari kelapa sawit sangat ditentukan dari produksi kelapa sawit yang diperoleh dari kebun plasmanya. Dari data yang diperoleh produksi kelapa sawit petani selama tahun 2003, untuk luas areal 700 Ha milik petani rata rata produksi pada tahun itu sebesar 437.583 kg/bulan atau 625 kg/Ha/bulan. Produksi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2003 yaitu sebesar 1.230.430 Kg atau 1.757 Kg/Ha dan produksi terendah pada bulan Agustus 2003 sebesar 90.680 kg atau 129 kg/Ha. Keadaan ini menggambarkan rendahnya produksi kelapa sawit di daerah ini Dengan harga kelapa sawit sebesar Rp.522,10/kg pada bulan Agustus 2003 maka pendapatan petani di desa ini sebesar Rp 67.350,-/ Ha Penghasilan tertinggi dari kelapa sawit terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp.1.106.772,-/Ha di mana harga kelapa sawit relatif lebih tinggi yaitu Rp.694,14/kg (KUD. 2003)(Lihat Grafik 2)

Grafik 3.2
 Produksi Kelapa Sawit Per Bulan di Desa Padang Jaya,
 Tahun 2003



Sumber: diolah dari data KUD, 2003

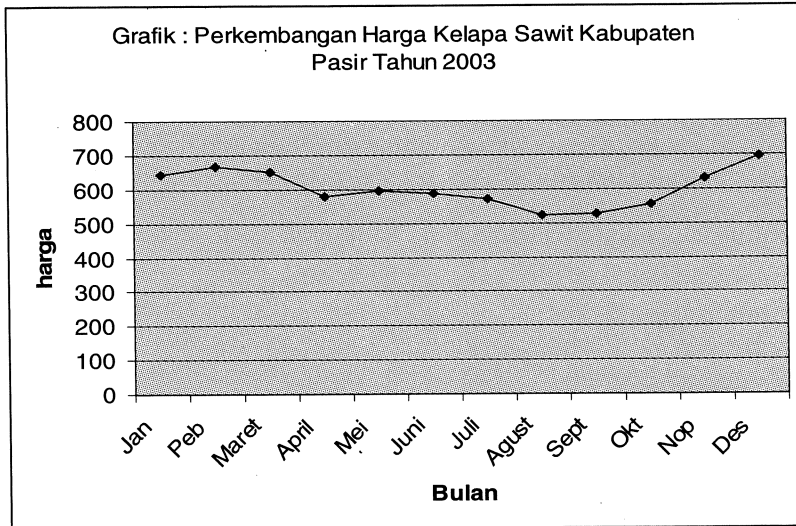
Pemasaran dan Harga Produksi

Pemasaran kelapa sawit (TBS) dalam pola PIR-Bun merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah khususnya PTP XIII. Ketentuan ini berlaku selama kredit pinjaman petani belum lunas. Sesuai dengan ketentuan proyek PIR-Bun hubungan inti-plasma dalam pemasaran akan berakhir bila petani telah melunasi angsuran kreditnya. Di Kabupaten Pasir sebagian perkebunan plasma masih belum lunas oleh sebab itu mereka harus menjual hasil produksi kelapa sawit kepada pihak PTP. Bagi perkebunan yang telah lunas, misalnya desa Padang Jaya sesuai dengan ketentuan dapat bebas menjual kelapa sawit kemana saja, akan tetapi dalam kenyataan mereka masih tergantung pada PTP XIII karena keterbatasan perusahaan yang bersedia membeli hasil produksinya.

Pola pemasaran yang berlangsung selama ini dilakukan melalui KUD kemudian disalurkan ke pabrik PTP. Bagi petani yang sudah melunasi kreditnya pada saat ini KUD dapat menjual produk anggotanya kepada pihak perusahaan Swasta. Perkembangan pendapatan petani disamping ditentukan jumlah produksinya juga perkembangan harga TBS yang ditetapkan. Harga Kelapa sawit ditentukan oleh sebuah konsorsium yang diputuskan oleh Bupati Kepala daerah berdasarkan peraturan menteri. Dengan adanya koperasi yang aktif membantu petani dalam memasarkan hasil kelapa sawit maka pedagang pengumpul tidak dapat ikut serta membeli hasil panen.

Harga kelapa sawit (TBS) untuk tanaman berumur 10s/d20 tahun setiap bulan di Kabupaten Pasir pada tahun 2003 menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada bulan Desember yaitu Rp.694,14, dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp.522,10. Keadaan ini menunjukkan bahwa harga kelapa sawit di Kabupaten pasir tidak terlalu berfluktuasi meskipun dalam nilai harga yang relatif rendah yaitu dibawah Rp.700,-. bila dibandingkan dengan harga TBS di Langkat sebesar Rp.829,- (lihat Grafik 3)

Grafik 3.3.
Perkembangan Harga Kelapa Sawit Kabupaten Pasir,
Tahun 2003



Sumber: Diolah dari data Dinas Perkebunan Kab. Pasir, 2003

Proses Penentuan Harga Kelapa Sawit

Harga tandan buah segar (TBS) di Kabupaten Pasir pada saat ini ditentukan melalui sebuah konsorsium yang dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pasir (KPTS Bupati Pasir no 210 Tahun 2004). Dalam keputusan tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

“ bahwa didalam ketetapan rumus harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terhadap beberapa komponen variable yang selalu berubah dan secara langsung akan menentukan perbedaan besarnya harga pembelian TBS kelapa sawit produksi petani tersebut sehingga untuk

penetapan besarnya variabel-variabel tersebut perlu adanya pemantauan dan pengkajian secara berkala maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penghitung dan Penetapan Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Kabupaten Pasir”.

Dengan pertimbangan semacam ini sebenarnya pihak pemerintah mempunyai kemauan baik untuk dapat menguntungkan semua pihak terutama petani sebagai produsen kelapa sawit.

Pertimbangan untuk membentuk kelompok kerja guna menghitung dan menentukan harga TBS dalam SK Bupati tersebut diatas mengandung pengertian bahwa SK ini dikeluarkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses penentuan harga TBS yang selama ini oleh berbagai pihak dinilai kurang transparan. Dalam Keputusan Bupati no, 210 tahun 2004 tugas kelompok kerja penghitungan dan penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit antara lain membantu tugas teknis tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Hal hal yang disampaikan kepada tim penetapan yang berada di Provinsi Kaltim adalah :

1. Perhitungan dan penetapan faktor “K”
2. Data pengeluaran Pabrik Minyak Sawit (PMS)
3. Rendemen CPO dan inti kelapa sawit
4. Hasil perhitungan pembelian TBS kelapa sawit di Kabupaten Pasir.

Dari ketentuan tersebut diatas secara jelas menunjukkan bahwa harga pembelian TBS untuk Kabupaten Pasir masih harus di ajukan dan ditetapkan oleh Tim Kerja di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dari Keputusan Bupati Pasir pihak-pihak yang dilibatkan dalam kelompok kerja penghitungan dan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Kabupaten cukup luas terdiri dari berbagai pihak baik unsur pemerintah, perusahaan dan petani.

Dari daftar anggota kelompok kerja tersebut di atas sebenarnya cukup banyak pihak-pihak yang terkait baik dari pemerintah, PTP, Perusahaan dan Asosiasi Petani terlibat dalam penentuan harga TBS. Yang menjadi masalah apakah mereka cukup mempertimbangkan kepentingan masing masing pihak hingga terjadi suasana yang saling menguntungkan. Misalnya apakah Asosiasi petani cukup tahu dan menyadari kepentingan dan kebutuhan petani.

Proses penetapan harga TBS ditingkat kabupaten Pasir (tim kerja) dapat datang dari penerapan rumus yang ditetapkan dalam penghitungan harga TBS, sebagai berikut:

$$HTBS = K(Hcpo \times Rcpo + His \times Ris)$$

Dengan pengertian :

- HTBS** : harga TBS yang diterima oleh Petani ditingkat Pabrik dinyatakan dalam Rp/Kg.
- K** : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani dinyatakan dalam persentase (%)
- Hcpo** : Harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) minyak Kelapa sawit kasar (CPO) masing masing perusahaan selama 1 (satu) bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- Rcpo** : Rendemen minyak sawit, dinyatakan dalam persentase (%)
- His** : Harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan ekspor dan local Inti sawit selama 1 (satu) bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- Ris** : Rendemen inti sawit dinyatakan dalam persentase (%)

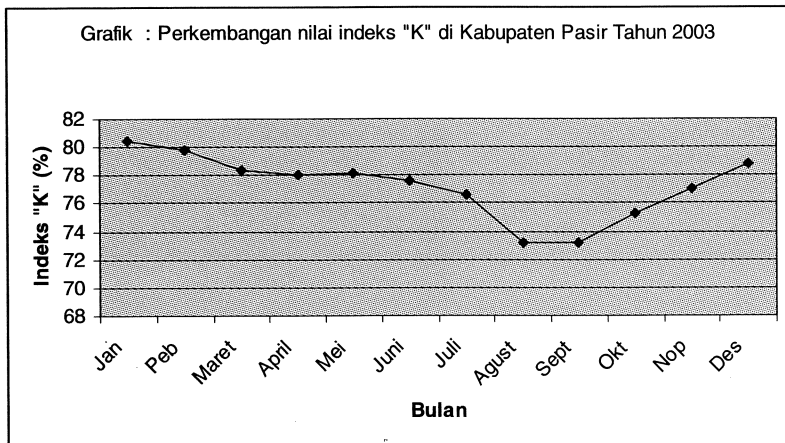
Perhitungan besarnya indeks “K” berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak dan inti sawit serta biaya penyusutan. Rumus perhitungannya adalah :

$$K = \frac{HTBS}{(HcpoxRcpo) + (HIxRI)} \times 100 \%$$

Dari rumus perhitungan diatas terlihat bahwa peranan indeks “K” dalam penentuan harga TBS yang akan diterima sangat penting. Komponen biaya pengolahan ikut menentukan besarnya persentase harga yang harus diterima petani. Biaya pengolahan ini dipengaruhi oleh tingkat efisiensi dan proses manajemen yang baik. Disamping

itu biasanya pihak perusahaan menghadapi masalah komponen “high cost” yang memperbesar komponen biaya. Bila hal ini terjadi maka yang akan banyak dirugikan adalah petani, karena akan berakibat pada harga TBS yang dihasilkan petani. Kelemahan lain dari penentuan harga TBS adalah kurang disepakatinya ketetapan harga yang telah di bahas secara bersama sama dari banyak pihak. Namun dalam 2 bulan terakhir sejak Pemda memberi ijin kepada sebuah perusahaan swasta untuk menampung hasil TBS dari PIR-Swadaya, cenderung terjadi perang harga antara perusahaan swasta dengan PTPN. Perusahaan swasta berani membeli dengan harga di atas harga yang telah di tentukan tersebut. Keadaan ini sebenarnya menguntungkan pihak petani, akan tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa harga yang telah ditetapkan dalam Pokja bukan harga mati, karena apabila perusahaan lain diberi kesempatan untuk menampung hasil TBS, akan berdampak positif bagi penetapan harga pasar, karena lebih kompetitif. Hal ini terjadi di daerah lain seperti Sumatera Utara, harga TBS benar-benar ditentukan oleh pasar yang lebih kompetitif, sehingga lebih menguntungkan petani.

Grafik 3.4.
Perkembangan nilai indeks “K” Kabupaten Pasir, 2003



Sumber: diolah dari data Dinas Perkebunan Kab. Pasir, 2003

Bila keadaan diatas tidak diwaspadai maka harga kelapa sawit tidak menjadi daya tarik bagi petani untuk meningkatkan produksinya. Hal ini disebabkan karena kepentingan petani kurang terakomodir terutama dalam upaya untuk mendapatkan pupuk yang murah untuk menekan biaya pemeliharaan kelapa sawit. Bila harga TBS relatif rendah sementara biaya pemeliharaan tinggi maka petani merasa dirugikan

3.3. KESIMPULAN

Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-BUN di Kalimantan Timur dan khususnya di Kabupaten Pasir relatif baru (1982-2004) dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Keadaan ini berpengaruh pada perkembangan luas perkebunan kelapa sawit terutama di Kabupaten Pasir yang masih mencapai 27 persen dari luas areal yang disediakan. Diperlukan daya tarik dan promosi yang lebih besar untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasir.

Tawaran kemudahan investasi di Kalimantan Timur cukup menarik, akan tetapi realisasi tanam relatif rendah. Secara keseluruhan baru 10 persen (Kaltim) dan Kabupaten Pasir mencapai sekitar 45 persen, perlu dicari solusinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir secara positif menanggapi keinginan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun dengan mencanangkan program/proyek PIR-Swadaya dengan dana dari Pemda Kabupaten dan Provinsi. Pengembangan program ini dapat meningkatkan ekonomi petani kecil dan memperluas kesempatan kerja.

Penetapan harga TBS masih dirasakan kurang transparan karena petani dan berbagai pihak terkait merasa tidak diikutsertakan. Meskipun demikian Pemda Kabupaten telah menerbitkan SK Bupati No. 220 Tahun 2004 untuk membentuk tim penetapan harga TBS yang lebih transparan.

BAB IV

TENAGA KERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA PIR – BUN: KASUS DESA PADANG JAYA

Salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pasir adalah pengembangan perkebunan terutama sub sektor perkebunan kelapa sawit. Selain untuk mendukung perekonomian daerah, pengembangan perkebunan kelapa sawit juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, baik lapangan pekerjaan yang disediakan oleh perkebunan itu sendiri maupun kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh industri hilir yang menggunakan hasil kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Perkebunan kelapa sawit mulai dikembangkan di Kabupaten Pasir pada tahun 1982/1983, oleh perusahaan milik negara yaitu PTPN XIII, dengan pola Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan (PIR-BUN). Dalam pola PIR-BUN ini PTPN XIII sebagai perusahaan inti dan sebagai plasma adalah masyarakat /petani. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir kemudian tidak hanya didominasi oleh perusahaan negara tetapi juga dilakukan oleh perusahaan swasta dan masyarakat setempat. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir menurut pola pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit seperti PTPN XIII, Perkebunan Plasma, dan PIR- Swadaya) serta penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan kelapa sawit (CPO). Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja dan latar belakang sosial ekonomi pekerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit, digunakan data primer terutama dari hasil survei terhadap 150 petani plasma PIR-BUN di Desa Padang Jaya. Sumber data lainnya adalah wawancara mendalam terhadap staf perusahaan PTPN XIII, pengelola PIR-Swadaya, dan perusahaan swasta yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir.

4.1. PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, salah satu tujuan adalah menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan bukan hanya terbatas pada usaha perkebunan kelapa sawit, akan tetapi juga kesempatan kerja dari industri pengolahan hasil kelapa sawit (CPO). Besarnya tenaga kerja yang terserap sangat ditentukan oleh perkembangan perkebunan kelapa sawit dilihat dari peningkatan areal tanaman kelapa sawit. Dilain pihak jumlah maupun karakteristik tenaga kerja yang ada dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berbeda sesuai dengan pola pengelolaan dan lingkungan masyarakat sekitar perkebunan.

Pola-pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasir antara lain perusahaan perkebunan PTPN XIII, perkebunan plasma pola PIR-BUN dan perkebunan pola PIR-Swadaya

Pengelolaan Perkebunan pada Perusahaan Inti (PTPN XIII)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang pertama yaitu pada tahun 1982/1983 merupakan perkebunan dengan pola PIR-BUN dengan PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) sebagai perusahaan inti. Tenaga kerja yang terlibat dalam awal pembangunan kebun kelapa sawit terdiri dari pekerja kebun inti dan pekerja kebun plasma. Pekerja kebun inti merupakan hasil kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja dan Direksi BUMN. Sedangkan pekerja kebun plasma merupakan hasil kerja sama Dirjen Transmigrasi dan Dirjen Perkebunan, sehingga pola perkebunan demikian juga disebut sebagai pola PIR-Trans. Tenaga kerja yang terserap di PTPN XIII terdiri dari tenaga kerja yang bekerja di kebun inti kelapa sawit dan pekerja di pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO). Pada saat ini di Kabupaten Pasir, PTPN XIII memiliki tiga lokasi perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN yaitu Kebun Tajati, Kebun Tabara dan Kebun Long Kali. Sedangkan pabrik pengolahan kelapa sawit CPO juga berjumlah 3 buah yaitu Pabrik

Minyak Sawit (PMS) Long Pinang, PMS Long Kali dan PMS Semuntai. Tenaga kerja yang bekerja di PTPN XIII ini terdiri dari tenaga kerja tetap (staf) dan tenaga kerja harian lepas (pekebun)..

Berdasarkan wawancara mendalam dengan staf perusahaan PTPN XIII dan data sekunder dari bagian personalia yang tersedia, secara keseluruhan tenaga kerja yang terserap di PTPN XIII saat ini (Th 2004) berjumlah 2.258 orang, terdiri dari tenaga kerja di kebun inti sebanyak 1.749 orang, di pabrik sebanyak 495 orang dan sebagai staf perusahaan sebanyak 14 orang (distrik manager). Sebagai tenaga pelaksana di perusahaan, sekitar separuhnya merupakan tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja musiman. Sistem pengupahan untuk kelompok pekerja kebun yang berstatus harian lepas ini, biasanya memberi upah sesuai dengan jumlah hari kerja yang dilakukan dan besarnya disesuaikan dengan besarnya UMR (Upah Minimum Regional) di daerah tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh pekerja kebun kelapa sawit sejak masa penanaman sampai sekarang adalah menanam bibit, mendongkel, nunas, memupuk, menyiangi/membersihkan gulma, menyemprot obat anti hama, panen dan mengantar hasil panen yaitu tandan buah segar (TBS) ke pabrik CPO segera sesudah dipetik.

Sebagai tenaga kerja harian lepas dan musiman ini biasanya adalah penduduk yang tinggal di sekitar kebun kelapa sawit, baik mereka yang sudah bekerja sejak awal pembangunan kebun maupun yang dibutuhkan pada saat panen atau penyemprotan obat anti hama. Sebagian pekerja ini sudah bekerja di kebun sejak masa persiapan kebun dan dilanjutkan sebagai pekerja kebun inti milik perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di PTPN XIII, tampaknya tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti, mengingat umur tanaman yang semakin tua dan jenis kegiatan yang dilakukan tidak sebanyak pada masa persiapan dan penanaman. Penambahan tenaga kerja biasanya dilakukan pada musim-musim tertentu seperti panen atau apabila perusahaan akan memperluas areal perkebunan inti kelapa sawit. Namun melihat perencanaan perkembangan areal kebun kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang cenderung ke perkebunan rakyat dan perkebunan swasta besar (PBS), maka penyerapan tenaga

kerja di PTPN XIII akan lebih terbatas dibandingkan penyerapan tenaga kerja pada pola perkebunan swasta. Bahkan kasus tanah perkebunan yang semula merupakan kebun inti milik PTPN XIII seluas 2000 Ha, dan kemudian beralih menjadi milik rakyat dari 10 desa, kemungkinan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di kebun inti. Sampai sekarang upaya PTPN untuk mengganti kebun inti dengan pembukaan kebun inti baru sedang dalam proses pengurusan ijin lokasi. Penyiapan kembali dan pemeliharaan selama belum menghasilkan, akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan..

Keberadaan 3 buah pabrik pengolahan minyak sawit (PMS) atau CPO milik PTP XIII juga merupakan industri hilir terkait dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Pabrik CPO tersebut juga mampu menyediakan tambahan lapangan kerja bagi penduduk setempat, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit. Jumlah tenaga kerja yang terlibat di pabrik CPO ini mencapai sebanyak 495 orang. Penyerapan tenaga kerja di pengolahan kelapa sawit pasca panen masih potensial untuk ditingkatkan, karena masih belum terpenuhinya kebutuhan pabrik CPO, yang idealnya berjumlah 6 buah. Demikian pula di Kabupaten Pasir dan Kaltim pada umumnya industri pengolahan hasil kelapa sawit masih terbatas pada industri CPO, belum mengarah pada perkembangan industri hilir turunan CPO lain, seperti minyak goreng dan olein seperti di daerah lain. Rencana pemerintah daerah untuk menambah 3 buah pabrik CPO dalam memenuhi kebutuhan pengolahan hasil TBS yang ada, dapat diharapkan akan menyerap lebih banyak pekerja di pabrik CPO, minimal sejumlah pekerja di pabrik CPO yang ada yaitu 495 orang.

Pengelolaan pada Perkebunan plasma pola PIR-BUN

Pada awal pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir yaitu pada tahun 1982/1983, kegiatan utama di perkebunan adalah menyiapkan lahan perkebunan dan penanaman bibit kelapa sawit baik di kebun inti maupun kebun plasma. Kegiatan perkebunan pada masa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh PTPN XIII

dengan melibatkan masyarakat sebagai buruh di perusahaan. Namun pengelolaan kebun plasma selanjutnya, dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai petani plasma. Sebagian besar kebutuhan tenaga kerja sebagai pengelola kebun plasma dengan mendatangkan transmigran dari Pulau Jawa pada tahun 1987. Masyarakat lokal yang dilibatkan sebagai petani plasma relatif kecil, yaitu sekitar 20 %, karena waktu itu belum banyak yang tertarik untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pada awal dimulai dengan pembibitan dan penanaman pohon kelapa sawit baik pada kebun inti maupun plasma. Dalam mengembangkan proyek perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Departemen Perkebunan bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mendatangkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan proyek, dalam hal ini “transmigrasi menjadi proyek derivatifnya sebagai penyedia tenaga kerja terampil” Transmigrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun pusat pertumbuhan baru untuk memperluas kesempatan kerja (Swasono, dikutip dari Purwono dan Siregar, 2004).

Salah satu lokasi penempatan transmigran pada awal pengembangan perkebunan di Kabupaten Pasir adalah Desa Padang Jaya (semula Desa Rangan Jaya), Kecamatan Kuaro. Lokasi ini merupakan UPT yang menampung rombongan angkatan pertama yang datang pada tahun 1987 dan berjumlah 350 keluarga, terdiri dari 300 KK transmigran dari Jawa, dan 50 KK transmigran lokal. Transmigran berasal dari Jawa Barat 200 KK dan Jawa Tengah 100 KK. Sesuai dengan konsep program PIR-BUN, selain memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha per KK, petani juga memperoleh hak-hak lainnya yaitu: lahan pangan seluas 0,75 ha, lahan pekarangan seluas 0,25 Ha dan rumah tinggal, serta jaminan hidup selama setahun berupa beras dan lauk pauk melalui Departemen Transmigrasi. Selama kebun kelapa sawit belum menghasilkan, petani plasma melakukan kegiatan di kebun plasma secara berkelompok dengan mendapatkan upah kerja dari perusahaan inti yaitu PTPN XIII. Berdasarkan data dari PTPN XIII pada tahun 2004, luas areal kebun inti milik PTPN XIII mencapai 13.270 Ha dan luas kebun

plasma mencapai 17.640 Ha yaitu 9.146 Ha di Samuntai dan 8494 Ha di Long Pinang. Kebun plasma ini melibatkan sekitar 8.820 KK petani. Apabila masing-masing keluarga mempunyai jumlah anggota rumah tangga rata-rata 2 orang (suami dan Isteri) untuk mengerjakan kebun plasma, maka jumlah tenaga kerja yang terserap di perkebunan plasma kelapa sawit sekitar 17.640 orang.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di perkebunan plasma, terutama pada masa panen kemungkinan lebih besar dari 17.640 orang, karena sebagian petani plasma menggunakan tenaga kerja di luar anggota keluarga sebagai buruh untuk mengerjakan kebun kelapa sawit mereka. Hal ini juga terjadi di Desa Padang Jaya, dimana pada masa panen banyak petani mempekerjakan buruh paling sedikit 2 orang terutama pada waktu panen. Sebagai buruh pada waktu panen biasanya diambil dari pecahan KK yang umumnya tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit. Tenaga kerja sebagai buruh pada waktu panen mudah diperoleh, karena pada umumnya para pemuda tidak memiliki pekerjaan tetap di luar perkebunan kelapa sawit milik orang tuanya. Seiring dengan anak-anak keluarga petani yang makin dewasa, orang tua juga semakin tua, sehingga memerlukan bantuan keluarganya di lokasi.

Pada awal pengelolaan kebun kelapa sawit, terutama sejak tahun kedua dimana jaminan hidup selesai diberikan, banyak petani plasma menghadapi kesulitan hidup sehingga banyak petani meninggalkan lokasi perkebunan, dengan menelantarkan kebunnya. Faktor lain yang mendorong mereka meninggalkan lokasi adalah upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Menurut informasi dari informan (petani plasma), upah yang semula diterima dengan sistem harian, berubah menjadi sistem borongan, yang nilainya lebih kecil dari sebelumnya. Upah harian sebesar Rp1500 sehari juga dinilai terlalu kecil untuk hidup bersama keluarganya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dikemukakan oleh beberapa informan, antara lain Kepala Unit Pelaksana Proyek (KUPP) sebagai berikut:

“Pada tahun 90 an belum konversi, masih konsolidasi, padahal jatah hidup habis, upah kecil. Pada saat itulah banyak yang pulang, yang masih bertahan membuka lahan pangan dengan cara membakar. Kemudian ditanami padi atau palawija dengan peralatan sederhana”.

Pada saat itu merupakan kondisi yang penuh dengan ‘perjuangan hidup’, meskipun demikian untuk kesehatan masih ditanggung oleh perusahaan. Mereka yang tidak tahan dengan kondisi tersebut, meninggalkan lokasi, sebagian pulang ke daerah asalnya. Kemungkinan mereka memutuskan pulang karena ‘harapan untuk merubah nasib’ tidak terpenuhi. Padahal tujuan dan harapan mereka pindah ke Kalimantan pada umumnya adalah ingin merubah nasib dengan menjadi petani kebun kelapa sawit. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei terhadap 150 responden petani plasma bahwa mayoritas petani plasma memutuskan pindah bekerja di perkebunan kelapa sawit, dengan alasan utama ‘ingin merubah nasib’ (50 persen) dan ‘ingin meningkatkan taraf hidup / penghasilan’ (40 persen) (Tabel 4.1). Dengan demikian nampak bahwa dengan tujuan merubah nasib dan meningkatkan taraf hidup, pada umumnya petani memutuskan pindah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Namun sesampai di lokasi perkebunan mereka tidak membayangkan bahwa masih dibutuhkan perjuangan hidup yang sulit sehingga yang tidak tahan dengan perjuangannya pulang kembali ke daerah asal.

Keputusan petani plasma untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan alasan ingin merubah nasib dan meningkatkan taraf hidup / penghasilan ini merupakan harapan seseorang yang wajar, sehingga mereka harus meninggalkan daerah asalnya. Alasan seseorang meninggalkan daerah asal karena didorong oleh harapan meningkatkan kesejahteraan, sejalan dengan teori migrasi yang dikemukakan Todaro, yaitu harapan kesejahteraan merupakan pertimbangan utama seseorang untuk bermigrasi (dikutip dari Nuhung, 2003).

Tabel 4.1.
Alasan Responden Pindah Bekerja ke Kebun Kelapa Sawit

Alasan Pindah	Persen
Merubah Nasib	49,6
Meningkatkan penghasilan/ taraf hidup	40,3
Mengikuti program transmigrasi	2,5
Mencari pengalaman	2,5
PHK	0,8
Ikut Orang tua/ keluarga	2,5
Ingin memiliki Lahan sendiri	1,7
Jumlah	100
	(N =150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit di Pasir, Kaltim PPK – LIPI, 2004

Pada tahun-tahun berikut, bahkan setelah konversi meskipun tanaman sawit sudah menghasilkan, masih banyak petani yang kembali ke daerah asal di Jawa., terutama yang berasal dari Jawa Barat. Kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang di daerah asal sebagai petani lahan pangan, bukan sebagai petani perkebunan. Pekerjaan di kebun mungkin dirasakan lebih berat bila dibandingkan kegiatan di lahan pangan . Hal ini juga disampaikan oleh mantan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) bahwa :

“ Yang banyak meninggalkan lokasi itu orang Jawa Barat karena pindahan dari Proyek Cirata (proyek bendungan), mereka biasa bertani di sawah. Pada waktu itu persyaratannya hanya kesehatan, surat nikah dan umur maksimal 50 tahun. Memang tidak ada persyaratan berasal dari petani perkebunan, makanya mereka kaget kerja di kebun”.

Pada saat ini petani plasma yang merupakan transmigran asli hanya tinggal sekitar 50 persen dari jumlah transmigran yang datang pada tahun 1987. Sebagai transmigran asli nama mereka terdaftar di KUD sejak awal hingga saat ini. Sedangkan petani pengganti biasanya namanya sudah berbeda dan datang sesudah tahun 1997. Menurut pendapat salah satu informan (mantan KUPT), pola demikian yaitu meninggalkan lokasi dan digantikan orang lain, biasa terjadi di setiap kebun plasma. Adanya peraturan tentang pencabutan hak yang

diperoleh petani transmigran, apabila meninggalkan lokasi selama 3 bulan berturut-turut, tidak menghalangi petani untuk meninggalkan kebun plasma, dan menggantinya dengan pemilik lainnya.

Motif lainnya petani meninggalkan kebun plasmanya, adalah nilai jual kebun yang makin meningkat setelah kebun menghasilkan. Motif memperjual belikan kebun yang menjadi jatah petani transmigran, dilakukan oleh beberapa petani yang terbiasa menyalahgunakan haknya, tanpa mau memenuhi kewajibannya. Setelah hak-hak sebagai transmigran diperoleh, mereka kembali ke daerah asal dengan membawa hasil penjualan lahannya. Wawancara mendalam dengan beberapa informan dari KUD dan keluarga petani plasma, menunjukkan beberapa kasus petani menjual kebun yang menjadi haknya, dengan motif penjualan untuk memenuhi persyaratan perkawinan, yang diminta keluarga pengantin perempuan, atau untuk membayar hutang yang semakin banyak baik kepada KUD atau lainnya.

Berdasarkan status kepemilikan lahan, sebagian kebun plasma yang ada di Padang Jaya, sudah berpindah tangan ke pihak lain. Berpindahnya hak kepemilikan kebun plasma ini juga didukung oleh catatan nama-nama anggota KUD maupun hasil survei. Berdasarkan tahun kedatangan responden ke lokasi, dapat dikatakan mereka yang datang sesudah tahun 1987, adalah petani plasma pengganti. Transmigran sebagai petani plasma yang asli datang ke lokasi berombongan sebagai peserta PIR-Trans atau PIR-BUN tahun 1987. Data survei menunjukkan sekitar 44 persen responden datang sesudah tahun 1987, dan lebih dari separuhnya datang sesudah tanaman menghasilkan (sesudah tahun 1990). Hal ini berarti petani plasma yang asli tinggal 56 persen, dan selebihnya merupakan petani pengganti (Tabel 4.2). Data kepemilikan lahan terkait dengan tahun kedatangan petani pada Tabel 4.2, juga menunjukkan petani pengganti terutama yang datang sesudah tahun 1990, sebagian besar (sekitar 64%) memiliki lahan perkebunan di atas 3 Ha. Sementara transmigran yang asli mayoritas (di atas 60%) hanya memiliki lahan plasma dan pekarangan sesuai dengan jatah petani plasma (maksimal 3 Ha). Keadaan ini makin meyakinkan bahwa sebagai petani plasma

pengganti mereka mendapatkan lahan perkebunan dengan jalan membeli kebun plasma. Pemilikan lahan kebun plasma para pengganti ini relatif lebih besar dari jatah transmigran (2 Ha), mereka umumnya datang dengan membawa modal, sehingga kemungkinan sebagai investor, bukan sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari para pengganti transmigran yang umumnya melaksanakan kegiatan kebun plasma, terutama waktu panen, dengan jalan diupahkan atau menggunakan tenaga di luar keluarga.

Tabel 4.2.
Luas Pemilikan Lahan Menurut Tahun Kedatangan
di Desa Padang Jaya

Luas Pemilikan Lahan	Th 1987	Th 1988 - 1990	Th > 1990	Jumlah
2 - 3 Ha	60,7	68,7	36,4	57,0
3,01 - 7 Ha	28,6	15,6	48,5	30,2
7,01 + Ha	10,7	15,6	15,2	12,7
Jumlah	100 (84)	100 (32)	100 (33)	100 (149)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK - LIPI 2004.

Kasus petani plasma meninggalkan lokasi kebunnya juga dialami transmigran lokal yang berada di Desa Padang Jaya. Adapun yang dimaksud dengan transmigran lokal pada penelitian ini adalah petani plasma yang merupakan penduduk asli Pasir, baik yang berasal dari desa di sekitar lokasi, atau bahkan juga berasal dari luar Kabupaten Pasir, tapi orang asli Kalimantan. Jumlah transmigran lokal yang semula berjumlah 50 KK di Desa Padang Jaya, kini hanya tinggal 30 KK. Seorang informan menjelaskan, bagi transmigran lokal, meninggalkan lokasi transmigran merupakan hal yang biasa, karena mereka memiliki tempat tinggal dan lahan di lokasi asalnya. Petani lokal juga biasa hidup dengan ladang berpindah, apabila di suatu lokasi ladang yang digarapnya sudah tidak menghasilkan, mereka akan pindah untuk mencari ladang baru. Kemungkinan mereka meninggalkan kebun plasmanya hanya bersifat sementara, mengikuti

pola gilir balik yaitu “mengistirahatkan” satu lokasi *pahumanan*, dan beberapa tahun kemudian mereka akan kembali (*pahumanan* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah perladangan) (Kompas, 2004). Kebiasaan seperti ini juga dilakukan di lokasi PIR – Trans Padang Jaya, terutama sejak tahun kedua yaitu sesudah jatah hidup habis. Meskipun mereka telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai petani plasma, namun kebanyakan petani lokal tidak mau dianggap telah meninggalkan lokasi. Perbedaan transmigran lokal dengan transmigran dari Jawa, ketika meninggalkan lokasi transmigran lokal biasanya meninggalkan begitu saja dan tidak menjual lahannya. Menurut informan (mantan KUPT) transmigran lokal pada umumnya tidak melaporkan waktu meninggalkan lokasi, karena khawatir harus mengembalikan uang. *“Orang lokal banyak yang pergi meninggalkan plasma begitu saja, karena bayangannya takut kalau disuruh bayar sekian juta”*.

Harapan untuk ‘perubahan taraf hidup’ yang merupakan alasan petani untuk pindah bekerja atau memilih menjadi petani plasma kelapa sawit, masih dirasakan belum terpenuhi sampai sekarang, meskipun petani plasma sudah memanfaatkan hasil kelapa sawit sejak tahun 1990 (mulai panen). Hasil survei menunjukkan proporsi terbesar responden (44 persen) menyatakan bahwa keadaan ekonomi rumah tangga sekarang ini ‘sama saja’ bila dibandingkan dengan keadaan ekonomi pada sekitar tahun 1997 (Tabel 4.3). Hanya sekitar sepertiga responden merasakan keadaan ekonomi lebih baik (28,7 persen) dari keadaan sebelum krisis, bahkan sekitar 27 persen merasa keadaannya lebih buruk. Namun demikian pada umumnya petani plasma yang masih bertahan merasakan keadaan sekarang lebih baik daripada perjuangan hidup mereka di tahun awal kedatangan mereka ke lokasi. Kesulitan hidup mulai dirasakan kembali setelah hasil produksi kelapa sawit mulai menurun dan kebutuhan hidup makin meningkat sejalan dengan kebutuhan anak-anak yang meningkat untuk pendidikan. Hal ini dirasakan oleh beberapa petani plasma yang menganggap kepindahan mereka ke lokasi tidak banyak mengalami perubahan taraf hidup.

Tabel 4. 3.
Perbandingan Perekonomian Rumah Tangga Responden Saat ini dan
Sebelum Krisis Ekonomi (1997)

Keadaan ekonomi RT	Persen
Sama saja	44,0
Lebih baik	28,7
Lebih buruk	27,3
Jumlah	100 (N =150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Koperasi (KUD) pada petani plasma

Didalam konsep PIR-BUN, petani plasma merupakan mitra kerja (*partner*) perusahaan inti. Petani diharapkan dapat menjadi petani yang mandiri dan mampu mengelola dan mengembangkan usahanya. Dalam mengembangkan usahanya tersebut petani plasma membentuk kelompok tani yang dikoordinir oleh KUD setempat. Di Desa Padang Jaya terdapat sebuah KUD dengan nama 'KUD Rangan Jaya' yang dibentuk pada tahun 1992, sebagai badan usaha yang mempunyai fungsi pokok untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota yaitu petani plasma. Sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan kegiatan manajemen dan kegiatan usaha, maka KUD di desa ini mengikuti prinsip dasar dan cara-cara seperti yang biasa dilakukan pada badan usaha pada umumnya. Hal ini wajar karena dibentuknya KUD dengan tujuan sebagai penghubung antara petani dengan perusahaan, terutama sesudah kebun kelapa sawit menghasilkan.

Pembentukan organisasi KUD tersebut tidak terlepas dari strategi perusahaan dalam memudahkan koordinasi petani plasma. Baik pengurus maupun anggota KUD adalah petani plasma di daerah tersebut. Sebagai gambaran, susunan organisasi KUD terdiri dari 5

orang pengurus, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, II dan Bendahara, kemudian 3 orang pengawas serta 12 orang karyawan mengelola unit-unit usaha, antara lain (Unit Waserda 3 orang, Unit Plasma 1 orang, Unit Simpan Pinjam 1 orang, Unit RMU 2 orang, Unit Angkutan 3 orang, Unit Saprodi 1 orang, Penjaga 1 orang). Hal ini berarti selain kegiatan mereka sebagai petani plasma, mereka juga dapat merangkap melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kelapa sawit milik bersama. Kegiatan yang dilakukan pengurus KUD bervariasi antara lain kegiatan di Waserda, mengurus angkutan dari kebun ke pabrik, menerima pembayaran dari pabrik CPO, mengurus cicilan petani, penyaluran pupuk dari agen ke petani, dan sebagai perantara dari petani ke PTPN atau swasta dalam penjualan tandan buah segar. Dengan kata lain petani plasma masih mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan sebagai petani plasma, apabila tersedia kesempatan kerja lain di luar pekerjaan sebagai pekebun. Apabila dapat diciptakan kesempatan kerja lain, baik dengan perluasan kebun kelapa sawit, maupun di luar kebun (off farm), petani dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga dapat mempercepat perubahan taraf hidup yang diharapkan.

Pengelolaan pada Perkebunan pola PIR- Swadaya

Sesudah tahun 1990, animo masyarakat setempat semakin besar untuk terlibat sebagai petani kelapa sawit, sementara proyek PIR-BUN sudah tidak mampu melibatkan lebih banyak petani plasma. Untuk mengantisipasi pengembangan kelapa sawit dilanjutkan dengan pola PIR-Swadaya yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Pasir dengan dana dari APBD I dan APBD II. Proyek PIR-Swadaya yang dimulai sejak tahun 1991/1992, memanfaatkan lahan petani setempat seluas 4.324 Ha (APBD I) dan 1.499 Ha (APBD II), dan 1.147 Ha (swadaya murni), dengan melibatkan masyarakat lokal sebanyak 3863 orang (Disbun Kaltim, 2003). Lokasi PIR-Swadaya mencakup 5 Kecamatan, yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot serta Kecamatan Pasir Belenkong.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi pembangunan perkebunan yang memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat. Apabila pada pola BIR-BUN mayoritas petani peserta adalah transmigran, pada pola PIR-Swadaya semua peserta adalah penduduk lokal, yang belum pernah berkebun kelapa sawit. Pembinaan pada petani peserta proyek dilakukan oleh petugas UPP (Unit Pelaksana Proyek) yang merupakan aparat pemerintah (Dinas Perkebunan Provinsi). Untuk memudahkan bimbingan dan pembinaan, petugas UPP juga membentuk kelompok tani dan koperasi sebagai penghubung antara petani dan petugas UPP. Melalui upaya tersebut diharapkan petani dapat membangun kebunnya dan mengelola usaha mereka secara berkesinambungan dan menguntungkan sehingga menjadi petani mandiri. Dalam proses awal proyek PIR-Swadaya, petani secara kelompok diwajibkan memiliki lahan berupa satu hamparan minimal 10 Ha dilengkapi dengan sertifikat, tidak bermasalah / sengketa. Kemudian mendaftarkan ke petugas perkebunan di desa dan kemudian diseleksi pihak UPP. Seleksi calon peserta antara lain diutamakan lahan berupa satu hamparan, lokasinya tidak mengganggu kelancaran (seperti di pinggir jalan), tanah tidak sedang dalam sengketa dengan pembuktian sertifikat, umur petani juga menjadi pertimbangan seleksi.

Pembinaan dan pelayanan kepada petani dilakukan oleh petugas UPP mulai dari pengolahan tanah sampai pemungutan hasil. Jenis pembinaan antara lain *land clearing* / pembukaan lahan dengan cara berkelompok, pembuatan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Fasilitas / hak yang diperoleh petani berupa paket kredit lengkap antara lain dalam bentuk bibit, obat-obatan untuk pengendalian hama dan rumput, serta pupuk. Sedangkan kewajiban petani setelah panen yaitu mengembalikan biaya bibit tergantung dari banyaknya bibit yang diambil. "*1 ha diperlukan 128 pohon x harga bibit Rp 2.500.*"

Kegiatan panen dan pemasaran hasil produksi dilakukan oleh kelompok tani dan koperasi masyarakat setempat bekerjasama dengan pihak perusahaan baik swasta atau PTPN (melalui KUD). Karena

keberadaan perusahaan swasta belum lama (baru 3 bulan yang lalu), maka petani PIR-Swadaya ini sebagian besar masih menjual ke pabrik CPO milik PTPN. Kendala utama penjualan hasil PIR-Swadaya ke PTPN adalah antrian terlalu panjang dan dihargai lebih rendah dibandingkan dengan produksi dari PIR-BUN. Alasannya karena usia kebun relatif muda sehingga rendemen rendah. Kondisi ini disebut oleh pihak swasta yang bersedia menampung hasil TBS (tandan buah segar) PIR-Swadaya. Situasi ini berdampak positif terhadap petani karena harga TBS lebih kompetitif. Hal dapat berpengaruh terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasir. Sejalan dengan penambahan luas areal perkebunan, sebagai konsekuensi logis adalah adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha perkebunan tersebut. Bahkan banyak petani lokal yang mengupahkannya pada pekerja di luar keluarga, karena tidak terbiasa mengelola kebun kelapa sawit.

Pengembangan kebun kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya juga dimaksudkan untuk mengurangi kecemburuan sosial dengan pendatang (transmigran), yang lebih dulu berhasil dengan kebun plasmanya. Dikuatirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan gangguan-gangguan sosial yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. Peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 2000 – 2001, tentang status pemilikan lahan perkebunan inti milik PTPN XIII yang diklaim sebagai milik masyarakat lokal, menimbulkan ketegangan sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

4.2. KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

Tenaga kerja di bidang pertanian, yang biasa disebut petani adalah mereka yang selama seminggu sebelum dilakukan penelitian melakukan pekerjaan atau bekerja paling sedikit selama satu jam (BPS, 2003). Pekerjaan pada sektor pertanian atau disebut juga sektor tradisional pada umumnya merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu pekerjaan pada sektor pertanian atau perkebunan lebih

mudah melibatkan tenaga kerja tanpa persyaratan keahlian dan pendidikan tertentu. Dengan mengetahui latar belakang sosial demografi petani yang terlibat di perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat menambah pemahaman tentang ketenagakerjaan di perkebunan sawit, sehingga kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dapat lebih mengarah pada sasaran. Penduduk desa yang merupakan sampel penelitian, sebagian besar mempunyai pekerjaan utama sebagai petani plasma kelapa sawit. Untuk perbandingan juga akan dilihat karakteristik penduduk Desa Padang Jaya antara lain dilihat dari umur, jenis kelamin dan pendidikan.

Jumlah penduduk, jenis kelamin dan umur

Berdasarkan data penduduk dari profil desa. pada tahun 2000 jumlah penduduk Desa Padang Jaya sebanyak 1.402 jiwa (346 KK), yang terdiri dari 725 orang laki-laki dan 677 orang perempuan, atau rasio jenis kelamin di atas 100 (sekitar 100,7). Jumlah 346 KK ini sudah berkurang, karena semula berjumlah 350 KK, dan sebagian besar merupakan pendatang dari Jawa, termasuk petani plasma yang merupakan pengganti transmigran asli. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur, mayoritas penduduk Desa Padang Jaya berada pada usia produktif atau usia kerja (di atas 15 tahun), dan hanya sekitar 4 persen yang berusia di atas 60 tahun, atau sekitar 8 persen yang berusia di atas 50 tahun. Hal ini wajar karena biasanya umur menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pada waktu seleksi transmigran.

Besarnya proporsi penduduk pada usia produktif sangat menguntungkan, dilihat dari dampaknya pada beban tanggungan keluarga yang menjadi relatif rendah, dibandingkan komposisi penduduk muda. Penduduk pada umur produktif juga diharapkan mempunyai beberapa kelebihan, karena dapat meningkatkan produktivitas kerja, dibandingkan dengan mereka yang umurnya lebih tua. Produktivitas ini dapat kita lihat pada penghasilan rumah tangga mereka.

Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Padang Jaya relatif rendah, karena mayoritas berpendidikan SD kebawah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Diantara penduduk yang berpendidikan rendah, sekitar 15 persen belum atau tidak sekolah. Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang umumnya petani ini wajar, karena sebagai petani tidak diperlukan keahlian dan ketrampilan tertentu serta persyaratan pendidikan. Demikian pula seleksi untuk menjadi transmigran pada saat itu, tidak memerlukan persyaratan pendidikan tertentu. Dilihat dari perspektif jender, kecenderungan laki-laki lebih tinggi tingkat pendidikannya dari perempuan. Tampak untuk pendidikan ditingkat SLTP ke atas yaitu laki-laki sekitar 31 dan perempuan sekitar 26 persen.

Data tentang karakteristik responden berdasarkan hasil survei menunjukkan keadaan yang tidak jauh berbeda dengan keadaan penduduk desa pada umumnya. Tingkat pendidikan responden pada umumnya relatif rendah, yaitu mayoritas berpendidikan SD kebawah (sekitar 64 persen). Hal ini menunjukkan bahwa petani di desa ini pada umumnya tamatan SD saja. Data survei juga menunjukkan proporsi laki-laki yang berpendidikan SLTP ke atas jauh lebih tinggi dari perempuan, hal ini biasa terjadi pada masyarakat petani pedesaan.

Rendahnya pendidikan petani sebenarnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil produksi, karena akan memperlambat adopsi teknologi . Adopsi teknologi dalam hal ini sangat penting bagi petani kebun, karena dalam kegiatan perkebunan memerlukan pelatihan-pelatihan yang belum pernah diperoleh di daerah asal. Pelatihan-pelatihan ini biasanya berupa penyuluhan tertulis atau praktek di kebun. Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, para petani merasa kurang bisa menyerap pengetahuan yang disampaikan dalam pelatihan.

Tabel 4. 4.
Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden Menurut Umur 15
keatas, dan Jenis Kelamin

Tk Pendidikan/ Jenis Kelamin	Umur		Total
	15-64 th	65 th keatas	
Laki-laki			
SD Kebawah	62,6	100	63,9
SLTP	19,0	-	18,3
SLTA	18,4	-	17,7
Total	100 (163)	100 (6)	100 (169)
Perempuan			
SD Kebawah	69,7	-	69,7
SLTP	4,6	-	4,6
SLTA	25,7	-	25,7
Total	100 (43)	-	100 (43)
L + P			
SD Kebawah	64,1	100	65,1
SLTP	16,0	-	16,0
SLTA	19,9	-	19,0
Total	100 (206)	100 (206)	100 (212)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Responden yang berusia 65 tahun ke atas yang berpendidikan hanya pada responden laki-laki. Kemungkinan mereka adalah pengganti petani plasma yang pulang / meninggalkan lokasi, yang umumnya bukan petani, tetapi pegawai negeri yang sudah pensiun atau karyawan swasta yang memiliki modal untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Sedangkan di daerah asal latar belakang ketrampilan yang mereka miliki (bertani di lahan pangan baik sawah maupun palawija) berbeda dengan di perkebunan. Mengenai ketrampilan berkebun yang telah dimiliki para petani, pada umumnya mereka mengakui bisa berkebun kelapa sawit karena belajar sendiri (42 persen), ada juga sebagian petani (26 persen) yang mengaku belajar bersama kelompok tani dan dari perusahaan (15 persen).

Karakteristik responden berdasarkan daerah asal menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (85 persen). Selebihnya berasal dari daerah masyarakat setempat (Kalimantan), yaitu termasuk dalam kategori transmigran lokal. Kondisi ini mendukung pernyataan sebelumnya tentang adanya transmigran lokal yang telah meninggalkan lokasi, sehingga jumlahnya berkurang dari jumlah pada awal pengelolaan kebun plasma di lokasi.

4.3. KEGIATAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Konsep perkebunan dengan pola PIR-BUN merupakan pelaksanaan pengembangan perkebunan, dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti perkebunan besar membantu dan membimbing perkebunan plasma sebagai pelaksana dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Perusahaan inti di Kabupaten Pasir ini adalah perusahaan perkebunan besar milik negara yaitu PTPN XIII. Perusahaan inti berkewajiban membina petani plasma dalam mengelola perkebunan kelapa sawit.

Beberapa tahap kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit meliputi 5 tahapan kegiatan yaitu :

1. Persiapan dan Pengolahan Lahan
2. Penanaman
3. Pemeliharaan
4. Masa Panen
5. Pasca Panen

Persiapan dan penanaman

Pada tahap ini pemerintah berperan dalam pembentukan proyek dengan penentuan wilayah tertentu dan lengkap dengan pengorganisasian serta penyediaan dana. Secara administrasi dalam persiapan ini dibutuhkan beberapa ketentuan sebagai dasar hukum

pelaksanaan proyek PIR (Ditjen Perkebunan, 1986). Ketentuan tersebut antara lain :

- Surat Keputusan dari Menteri Pertanian
- Penyediaan lahan berdasarkan SK Gubernur KDH Tk I
- Pengesahan anggaran proyek oleh Menteri Keuangan dan Bappenas
- Kontrak/perjanjian kerja antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan perusahaan inti.
- Perjanjian antara perusahaan inti dan petani plasma.

Pembiayaan untuk kegiatan proyek PIR-BUN terdiri dari :

- Biaya lapangan yang disediakan dengan dana kredit perbankan.
- Biaya non kredit yang disediakan dengan anggaran pemerintah. Meliputi : pembangunan sarana pemukiman, jalan, studi kelayakan.

Pada tahap persiapan saat itu lokasi ditetapkan terletak di daerah terpencil dan diarahkan untuk membuka areal yang belum dimanfaatkan. Penetapan areal ditentukan oleh Gubernur / KDH Kalimantan Timur yang menjabat pada saat itu, dan dibebaskan dari rencana penggunaan yang lain. Dengan demikian areal itu digunakan khusus untuk pelaksanaan perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini areal tersebut merupakan wilayah pemukiman petani perkebunan plasma yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jalan, sarana sosial. Untuk kepentingan petani plasma diberikan tempat pemukiman, lahan pekarangan, lahan kebun kelapa sawit, dan lahan pangan. Sarana/fasilitas sosial disediakan bangunan balai desa, sekolah SD, tempat ibadah. Pada tahap ini, yang dilakukan oleh pihak inti berupa pembersihan lahan kemudian dilanjutkan penanaman. Pada tahap ini pihak inti hanya menerima lokasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dijadikan areal PIR, kemudian menyiapkan unit-unit pengolahan produk, meliputi pabrik pengolahan, gudang penyimpanan, dan alat transportasi.

Dalam pengembangan perkebunan plasma di Kabupaten Pasir, tahap penanaman kelapa sawit merupakan tugas dan kewajiban perusahaan inti. Penanaman kebun kelapa sawit di Kabupaten Pasir dimulai sejak tahun 1982/1983, dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan tenaga kerja lepas, sebelum petani peserta datang ke lokasi kebun. Jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam di kebun plasma sebanyak 256 pohon untuk setiap 2 Ha lahan. Pada pola PIR-Swadaya, petani peserta dilibatkan pada semua tahap kegiatan, sejak persiapan sampai paska panen, dengan bimbingan petugas dari Dinas Perkebunan Pemda Kabupaten Pasir.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan kebun kelapa sawit pada pola PIR-BUN mulai melibatkan petani peserta yang didatangkan setelah masa penanaman pohon selesai. Dalam persiapan menerima kebun plasma setelah konversi, petani diwajibkan untuk memelihara kebun kelapa sawit sesuai dengan bimbingan perusahaan melalui mandor-mandor yang bertugas. Adapun kegiatan dalam masa pemeliharaan kebun kelapa sawit antara lain meliputi :

- Pengendalian gulma
- Pemupukan
- Pengendalian hama penyakit
- Pemeliharaan jalan, gorong-gorong dan parit-parit drainase.

Dalam kegiatan pemeliharaan kebun kelapa sawit termasuk kegiatan pengadaan sarana produksi (pupuk, pestisida), beban biaya pemeliharaan sebelum tanaman menghasilkan dibiayai oleh perusahaan inti, yang dibayar kemudian waktu konversi. Sedangkan setelah tanaman sawit menghasilkan, sepenuhnya dibiayai sendiri oleh petani peserta dengan bantuan pengadaan oleh KUD. Dipihak perusahaan inti sebagai lembaga yang langsung menangani pengembangan perkebunan berperan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan PIR-BUN. Sebagai perusahaan milik negara

(BUMN), orientasi proyek selain komersial juga sosial. Sebagai BUMN berkewajiban untuk tetap meraih keuntungan, di samping tugas lainnya yaitu sebagai perusahaan inti yang berkewajiban membantu dan membina petani peserta PIR-BUN, agar mampu mandiri setelah konversi.

Pembinaan utama dari perusahaan inti dilakukan sebelum dilakukan konversi yaitu bimbingan langsung dengan menempatkan petani peserta sebagai pekerja kebun, yang melakukan kegiatan sesuai dengan standar perusahaan. Idealnya bimbingan tersebut tidak terbatas pada sebelum konversi, tetapi berkelanjutan bahkan sampai pada tahap *replanting* atau peremajaan. Sesudah konversi hubungan antara perusahaan inti dan plasma cenderung sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan. Namun dalam praktek setelah pelunasan kredit, hubungan dengan perusahaan inti terbatas pada kegiatan paska panen yaitu pemasaran hasil produksi TBS ke pabrik. Kegiatan lain seperti pemeliharaan diserahkan sepenuhnya pada kemauan petani dengan bantuan KUD. Hal ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas hasil produksi, terutama apabila petani plasma tidak melakukan kegiatan sesuai standar perusahaan. Bahkan untuk penyediaan pupuk, perusahaan lepas tangan dan KUD tidak berdaya untuk mengusahakan pupuk dengan harga pabrik. Akibatnya banyak petani plasma melakukan kegiatan kebun yang terbatas, hanya mengutamakan kegiatan panen, dan mengabaikan kegiatan pemeliharaan.

Pada masa awal pelaksanaan kebun kelapa sawit yaitu tahun 1987, sebelum konversi, petani mengelola kebun secara kelompok, menurut hamparan kebun masing-masing kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 25 - 30 orang, mengerjakan satu hamparan dengan luas sekitar 50 - 60 ha. Sesudah konversi setiap petani mengelola 2 Ha dari hamparan kebun plasma masing-masing kelompok, yang ditentukan dengan sistem undian. Pembagian lahan yang dilakukan sesudah konversi ini berdampak kurang menguntungkan, karena petani kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lahan hamparan (terutama kegiatan pemupukan) yang dianggap bukan miliknya. Kebiasaan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan

standar, berlanjut sesudah konversi, sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi. Dengan demikian kegiatan pemupukan sejak sebelum konversi dilakukan dengan cara tidak efektif. Karena petani menganggap kebun yang dikerjakan belum tentu miliknya, sehingga pemupukan asal-asal saja tidak mengena pada sasaran pohon tetapi terbuang dan akhirnya terbawa air hujan masuk ke saluran air. Hal ini berarti pembiayaan yang telah diperhitungkan dalam konversi, tidak menghasilkan sesuai dengan standar produksi, karena banyak dibuang oleh petani. Pelaksanaan kegiatan yang tidak profesional tersebut merugikan semua pihak baik perusahaan maupun petani plasma, terutama berkaitan dengan produktivitas hasil produksi. Kondisi demikian dapat dihindari apabila sejak awal mereka mengetahui hak dan kewajibannya serta dampak dari penyimpangan yang dilakukan selama pembinaan.

Tidak efektifnya masa pembinaan untuk petani plasma juga disebabkan oleh ulah petugas perusahaan/mandor dan lemahnya sistem pengawasan. Dalam hal ini petugas hanya mengutamakan pencapaian target, tanpa peduli pada ketepatan sasaran target. Misalnya kegiatan pemupukan dilakukan dengan sistem instruksi, bukan bimbingan agar petani dapat melakukan kegiatan pemupukan dengan benar. Bagi petani yang masih baru dalam hal berkebun kelapa sawit, instruksi pemupukan dari mandor tanpa pengawasan, akan dilaksanakan sesuai target, tanpa peduli hasilnya. Kegiatan pemupukan kelapa sawit sebelum berproduksi, harusnya mengikuti aturan pupuk ditabur dalam piringan sekitar pokok pohon dari jarak 20 cm sampai ujung tajuk (sudah tentu piringan harus dipersiapkan sebelumnya). Sedangkan petani melaksanakannya dengan menaburkan pupuk sampai habis tanpa peduli sasarannya, sehingga banyak terbuang karena ditumpuk di tempat yang mudah dijangkau,

Pemberian pupuk yang tidak tepat pada sasaran pokok pohon ini menurut standar pengelolaan perkebunan yang secara profesional akan menghambat pertumbuhan kelapa sawit sehingga tanaman menjadi kerdil. Selain itu pemberian pupuk satu tahun hanya dua kali, dengan demikian kesempatan dan waktu yang ada pun terbuang sia-

sia. Kondisi demikian ini yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi kelapa sawit.

Selain pemupukan, faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit adalah kegiatan pemeliharaan lainnya, misal pengendalian gulma, pengendalian hama/penyakit dan pemeliharaan sarana jalan dan drainase. Nampaknya petani plasma Desa Padang Jaya dalam hal pemeliharaan lain tentang kebun kelapa sawit masih kurang. Dari pengamatan yang telah dilakukan di kebun, nampak disekeliling dan di pohon kelapa sawit masih banyak ditumbuhi tanaman liar yang merambat. Banyaknya tumbuhan liar di ranting pohon kelapa sawit ini sebagai akibat tidak dilakukan pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan agar tanaman bersih dan memudahkan panen. Kegiatan pemeliharaan ini seharusnya dilakukan oleh petani agar supaya produksi dapat tercapai sesuai standar. Namun para petani tidak melakukannya, hal ini kemungkinan disebabkan karena sejak awal tidak terbiasa memelihara kebun sesuai standar. Hal inilah yang menyebabkan produksi kelapa sawit yang mereka hasilkan tidak maksimal.

Kegiatan *ngoret* atau menyiangi yaitu membersihkan rumput di sekitar pohon, meskipun seharusnya dilaksanakan secara rutin, kurang diperhatikan oleh kebanyakan petani plasma sehingga kegiatan pengendalian gulma sering diabaikan. Mengenai kegiatan pengendalian penyakit antara lain dengan cara menyemprotkan obat-obatan, biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki modal, karena biaya yang dikeluarkan relatif besar baik untuk obat-obatan maupun peralatannya. Pemeliharaan dengan pemberian air pada kebun plasma dimusim kemarau, biasanya sulit dilakukan petani plasma Hal ini karena kondisi saluran air yang letaknya sulit terjangkau dari kebun, meskipun relatif mudah terjangkau dari pemukiman petani.

Bagi petani plasma yang memiliki modal, kegiatan pemeliharaan kebun biasanya dipercayakan kepada pihak lain dengan sistem borongan. Namun hasilnya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, atau kualitas hasil pekerjaan borongan masih rendah. Biasanya pemborong hanya melakukan pemeliharaan terbatas pada

lokasi di sekitar jalan, sehingga nampak bersih hanya di permukaan, tidak pada semua kebun plasma sesuai dengan perjanjian kerja borongan.

Pemetikan tandan buah segar (panen)

Menurut standar pengelolaan perkebunan yang profesional, kelapa sawit berbuah setelah berumur 2,5 tahun dan buahnya masak setelah 5,5 bulan dari terjadinya penyerbukan. Suatu areal sudah dapat dipanen jika tanaman telah berusia 31 bulan. Tanaman kelapa sawit di PIR-BUN Desa Padang Jaya yang ditanam sebelum transmigran datang pada tahun 1987, mulai dipetik hasilnya sekitar tahun 1990. Karena hasil TBS (tandan buah segar) yang dipanen harus segera diolah menjadi CPO, maka masalah pengangkutan dan kelancaran penampungan TBS menjadi hal yang penting bagi petani plasma. Sebagai perusahaan inti berkewajiban menyediakan unit pengolahan hasil guna menampung hasil produksi petani plasma PTPN XIII. Tersedianya unit pengolahan dan penampungan/pemasaran hasil produksi tersebut, dapat memberikan peluang kepada petani untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang optimal. Namun banyak kendala yang menyebabkan hasil produksi tidak sesuai dengan yang diharapkan baik secara kuantitas dan kualitas. Salah satu kendala adalah sistem pemeliharaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, sehingga produksi kelapa sawit yang dihasilkan memiliki kualitas yang relatif rendah, sehingga mempengaruhi harga TBS yang ditetapkan. Menurut informasi harga TBS yang ditetapkan untuk kawasan perkebunan di Kaltim, lebih rendah dibandingkan dengan hasil dari daerah lain seperti Sumatera, karena pengaruh kualitas hasil produksi.

Kegiatan panen dilakukan petani plasma setiap dua minggu sekali. Namun pada saat dilakukan penelitian, menurut informasi karena produksi mulai menurun, sebagian kebun hanya panen sekali sebulan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani pada saat panen relatif berat, karena meliputi kegiatan antara lain : *mendongkel* yaitu memetik dengan cara mencongkel tandan buah segar yang rata-rata

beratnya sekitar 10 kg. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk mendongkel dengan *egrek*. Waktu panen dilakukan per kelompok hamparan (satu kelompok tani), dan bergiliran dengan kelompok tani lainnya. Kegiatan panen dilakukan secara bergantian antar kelompok tani, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kemampuan pabrik CPO untuk mengolahnya, sehingga kualitas TBS tetap terjaga. Pada waktu pelaksanaan survei, sebagian besar responden (87 persen) menyatakan sedang melakukan kegiatan panen, selebihnya sedang melakukan kegiatan pemeliharaan antara lain menyiangi.

Dalam mengerjakan / mengelola kebun, tenaga kerja yang digunakan dari masing-masing keluarga petani berlainan. Tenaga kerja yang terlibat dalam mengelola/ mengerjakan lahan kebun kelapa sawit sangat bervariasi, ada yang dikerjakan sendiri dengan anggota keluarganya dan ada yang dikerjakan orang lain dengan buruh. Yang paling besar prosentase petani dalam mengelola kebun dibantu oleh orang lain yang bukan anggota keluarganya yaitu dengan membayar tenaga kerja buruh (35 persen), kemudian ada yang dikerjakan sendiri (18 persen) dan atau dibantu anggota keluarganya yaitu anak atau keponakan (20 dan 11 persen) (Tabel 4.5).

Tabel 4.5
Keterlibatan Tenaga Kerja Dalam Pengelolaan Kebun Plasma

Status TK Dalam RT	Jumlah Tenaga Kerja					Total
	1	2	3	4	5-10	
Sendiri	50,0	0,0	0,0	0,0	0	18,0
Dibantu ART	14,8	11,1	0,0	0,0	0	10,7
Sendiri dan ART	0,0	36,1	30,8	14,3	0	20,7
Dibantu non ART	35,2	30,6	38,5	71,4	25,0	34,7
Sendiri dan non ART	0,0	16,7	23,1	14,3	25,0	11,3
ART dan non ART	0,0	5,6	7,7	0,0	0,0	3,3
Sendiri+ART + non ART	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1,3
Total	100	100	100	100	100	100
	(54)	(72)	(13)	(7)	(4)	(150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir separuh responden (48 persen) menyatakan bahwa untuk pengelolaan kebun plasma dikerjakan oleh dua orang tenaga kerja, baik itu dikerjakan oleh orang

lain / buruh dan dikerjakan sendiri dibantu orang lain. Sedangkan petani plasma yang mengerjakan sendiri lahan plasmanya sekitar 18 persen. Meskipun ada pula yang dikerjakan oleh lebih dari 3 orang tenaga kerja, biasanya lahan mereka luas sehingga harus dikerjakan oleh beberapa orang. Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang pemuda lulusan SLTA yang bekerja sebagai buruh kebun sambil mencari pekerjaan yang tetap sebagai karyawan perusahaan. Penuturannya sebagai berikut :

“Wah kalau kerja di kebun sendiri tidak sanggup, karena kalau kerja sendiri rasanya sepi nggak ada yang diajak ngobrol, jadi cepet capek” .

Para pemuda pada umumnya mengaku untuk mengisi waktu mereka bekerja sebagai buruh perkebunan, terutama pada saat panen uang yang diterima lumayan, pada saat panen raya biasanya mereka dalam 1 bulan kadang bisa memperoleh uang 1,5 juta rupiah. Sedangkan pada saat-saat belum panen relatif kecil, dalam sebulan informan mengaku cuma memperoleh uang sekitar 500 ribu rupiah. Sebenarnya anak muda di perkebunan kelapa sawit Desa Padang Jaya ini pada umumnya punya cita-cita bekerja di perusahaan disekitar yaitu perusahaan batu bara. Meskipun peluang ada tetapi karena mereka murni melamar sendiri dengan ijazah SLTA dan pelamar / saingan relatif besar dan kemungkinan memang selektif, sehingga mereka sulit diterima. Dalam penuturannya salah satu informan mengatakan :

“ Cita-cita anak muda disini kerja di perusahaan batu bara, karena lebih tetap, tinggalnya di mess, berangkat kerja antar jemput. Tetapi kalau mau kerja di sana harus punya kenalan orang dalam dan punya uang. La kalau terus-terusan kerja di pertanian ya remuk badannya”

Petani di Desa Padang Jaya dalam satu tahun biasanya panen dari bulan Januari sampai Desember, tetapi pemetikan sawit tandan buah segar selama seminggu satu kali. Pada tahap ini perusahaan inti berkewajiban menampung seluruh hasil produksi petani plasma. Oleh

karena itu sejak tanaman menghasilkan, perusahaan inti menyediakan atau membangun pabrik pengolahan. Sedangkan untuk kelancaran pengangkutan dan pemasaran hasil, perusahaan pengolahan bekerjasama dengan KUD Desa Padang Jaya Perusahaan inti membeli hasil produksi kelapa sawit dengan harga yang ditetapkan oleh tim konsorsium (POKJA), yang terdiri dari pihak pemerintah (dinas terkait) dan perusahaan. Namun dalam praktek peran PTPN paling dominan dalam penetapan harga TBS, sebenarnya pemerintah menetapkan harga melalui tim konsorsium dengan tujuan agar dapat menguntungkan berbagai pihak terutama petani sebagai produsen. Kenyataannya dengan harga yang telah ditentukan tim konsorsium, petani masih kurang beruntung. Dalam hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai komponen biaya produksi yang dikeluarkan oleh perkebunan yang ada di perusahaan.

4.4. KESEJAHTERAAN DAN STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP PETANI

Pendapatan Petani

Kesejahteraan keluarga petani dapat tercermin dari pendapatan dan penggunaannya atau pengeluaran. Pendapatan keluarga (rumah tangga) petani terdiri dari berbagai sumber baik dari kebun plasma maupun usaha pertanian atau non pertanian diluar kebun plasma, yang diperinci sebagai berikut. Sumber dari pendapatan / penghasilan bagi petani PIR-Trans di Desa Padang Jaya yang berasal dari sektor pertanian ini bisa saja terdiri dari hasil perkebunan plasma, hasil tanaman pangan dari lahan pangan dan hasil dari lahan pekarangan. Sedangkan sumber dari non pertanian bisa terdiri dari berbagai usaha lainnya diluar pertanian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 150 responden petani plasma, pada umumnya pendapatan petani dari hasil kebun plasma seluas 2 ha, pada panen terakhir paling rendah Rp120.000,- sedangkan paling tinggi Rp 4.000.000,- . Lebih separo petani (85 persen) berpendapatan maksimal sejuta rupiah, diantara mereka ini 53 persen hanya berpendapatan Rp 500.000,- kebawah dan 32 persen

yang berpendapatan di atas Rp 500.000,- dan lainnya di atas sejuta rupiah (Tabel 4.6). Pendapatan petani plasma kelapa sawit di Desa Padang Jaya ini masih lebih rendah bila dibanding dengan pendapatan rata-rata petani kelapa sawit / ha di Kabupaten Pasir pada tahun 2002 (Rp 6.923.804,64 / ha). Meskipun pendapatan tertinggi petani plasma sebesar Rp 4.000.000,- dengan luas 2 ha, masih lebih rendah dari rata-rata petani kelapa sawit di Kabupaten Pasir setiap luas 1 ha. Namun demikian kalau dibandingkan dengan pendapatan rata-rata petani perkebunan pada komoditas lain seperti kelapa dalam, karet, kopi, atau kakao, maka pendapatan petani plasma kelapa sawit masih lebih tinggi (Statistik Perkebunan Kab. Pasir, 2002). Dengan demikian bahwa pendapatan petani pada umumnya di Kabupaten Pasir ada dibawah UMP di Provinsi Kaltim (Rp 572,652,-).

Kalau ditinjau dari tahun kedatangan petani atau pertama kali menjadi petani plasma nampak bahwa lebih separo dari mereka yang datang sejak awal yaitu 1987 berpendapatan dibawah satu juta. Namun demikian ada pula diantara mereka yang sejak pertama datang memiliki pendapatan lebih besar dari sejuta rupiah (Tabel 4.6). Perbedaan pendapatan petani dari hasil kebun plasma ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya minat menjadi petani. Kalau mereka mempunyai minat tentunya mereka benar-benar mengerjakan / mengelola kebun (memelihara) kelapa sawit dengan sungguh-sungguh dan profesional. Hal ini akan mempengaruhi keadaan tanaman dan akhirnya hasil produksi kelapa sawit maksimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Tabel 4.6
Pendapatan Petani Menurut Tahun Kedatangan (Persen)

Jumlah Pendapatan	1987/sblm	1988 - 1990	> 1990	Jumlah
120.000 - 1.000.000	69,4	68,7	43,7	63,3
1.001.000 - 2.000.000	24,7	15,6	34,4	24,6
2.001.000 - 3.000.000	2,4	6,3	15,6	0,6
3.001.000 - 4.000.000	2,4	-	-	0,1
4.001.000 +	1,2	9,3	9,3	0,05
Jumlah	100	100	100	100
	(85)	(32)	(32)	(150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK - LIPI 2004.

Relatif rendahnya pendapatan petani plasma tersebut disebabkan oleh rendahnya hasil produksi kelapa sawit pada saat dilakukan penelitian, meskipun harga jual tandan buah segar pada posisi relatif tinggi dibandingkan harga pada bulan-bulan sebelumnya. Pertambahan nilai dengan menjual hasil kelapa sawit dalam bentuk lain (pelepah atau daun) tidak dapat dilakukan oleh petani. Penyebabnya antara lain karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, minimnya informasi pasar. Disamping itu faktor alam dan kondisi tanah di Kalimantan Timur (dibandingkan dengan daerah lain) juga mempengaruhi rendahnya hasil produksi. Meskipun harga pada saat dilakukan penelitian mencapai harga tertinggi dibanding sebelumnya, tetapi hasil produksi minim, kondisi ini tidak dapat mengangkat pendapatan petani. Hal inilah yang mendorong petani plasma untuk berusaha diluar sektor pertanian dengan harapan dapat menambah pendapatan untuk rumah tangga. Situasi demikian juga dikemukakan oleh Sawit (dikutip oleh Yuliati, 2003), bahwa penyebab dari keluarnya petani untuk bekerja di luar sektor pertanian adalah tidak cukupnya pekerjaan dan pendapatan usaha tani. Menurut mereka sifat pekerjaan musiman yang banyak mengandung resiko, sehingga pendapatannya juga tidak pasti. Hal ini juga terjadi pada petani plasma perkebunan kelapa sawit, bahwa pada saat panen penghasilan yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena minimnya pekerjaan pertanian (perkebunan) yang bisa diharapkan di desa, maka wajar apabila petani meninggalkan desanya untuk bekerja dan beralih profesi untuk memperoleh tambahan penghasilan. Sebagian bekerja sebagai buruh bangunan di kota kecamatan atau di kota kabupaten. Ada juga yang beralih profesi di sektor jasa di desa sendiri dengan menarik ojek. Biasanya mereka yang bekerja meninggalkan desa ini masih berusia produktif (dibawah 50 tahun), atau pecahan KK (anak petani).

Kalau ditinjau dari pekerjaan para petani plasma diluar perkebunan plasma, nampak bahwa pada umumnya mereka bekerja masih terbatas pada pertanian juga, yaitu pada lahan pangan (31 persen), terutama bagi petani yang menjadi petani plasma sejak tahun 1987 (40 persen). Sedangkan mereka yang datang sesudah tahun 1988 sampai tahun

1990an, persentase terbesar adalah bekerja sebagai pegawai/karyawan atau tenaga jasa (31 persen) (Tabel 4.7), begitu juga mereka yang datangnya sesudah tahun 1990. Dari pengamatan di lokasi pendatang yang datang kemudian, umumnya adalah pegawai baik pegawai negeri ataupun swasta.

Tabel 4.7
Status Pekerjaan Petani Di Luar Perkebunan Plasma Menurut
Tahun Kedatangan di Lokasi

Status Pekerjaan	1987/ sblm	1988 – 1990	> 1990	Jumlah
Tidak Bekerja	20,0	25,0	21,4	21,4
Tata Laksana & Jasa	17,6	31,3	28,6	22,7
Tenaga Perkebunan	11,7	6,3	14,3	11,0
Tenaga Pertanian	40,0	15,6	21,4	31,0
Peternakan & Lainnya	10,6	21,8	14,3	13,8
Jumlah	100 (85)	100 (32)	100 (28)	100 (145)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Lapangan pekerjaan diluar sektor pertanian di daerah sekitar penelitian sebenarnya tersedia bagi angkatan kerja lulusan SLTA, misalnya saja di perusahaan-perusahaan swasta seperti pertambangan batubara. Kondisi ini sebenarnya memberi kesempatan pada mereka khususnya anggota rumah tangga petani (anak-anak petani lulusan SLTA) untuk terserap dalam kesempatan kerja setempat dan secara tidak langsung akan meningkatkan penghasilan petani. Meski demikian secara umum mereka tidak diterima sebagai tenaga kerja tersebut. Kemungkinan karena besarnya pelamar sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan terbatas, sehingga penerimaannya sangat selektif. Namun keadaan ini dipandang lain oleh para pelamar yang tidak diterima, mereka menganggap tidak diterimanya di perusahaan karena tidak punya koneksi. Hal ini dikemukakan oleh informan salah satu pelamar yang tidak diterima sebagai berikut : *“Kalau mau bekerja di perusahaan batubara harus punya kenalan orang dalam”* .

Dengan terbatasnya keluarga petani plasma yang terserap diluar sektor pertanian ini maka sumber pendapatan mereka juga terbatas pada perkebunan kelapa sawit saja.

Data tentang jumlah pendapatan rumah tangga petani yaitu pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber (termasuk anggota rumah tangga lain), menunjukkan bahwa sebagian besar (63 persen) responden memperoleh penghasilan maksimal satu juta rupiah pada satu bulan yang lalu (sebelum dilakukan penelitian). Sedangkan responden yang berpenghasilan dua juta rupiah relatif kecil (12 persen).

Ditinjau dari jumlah tanggungan keluarga rata-rata petani plasma PIR-BUN Desa Padang Jaya adalah sekitar 4 orang terdiri dari laki-laki (sekitar 2 orang) dan perempuan sekitar 2 orang. Jumlah tanggungan keluarga antara 1 sampai 9 orang. Berdasarkan hasil survei, sekitar 31 persen petani memiliki tanggungan keluarga di atas rata-rata dan persentase terbesar (37 persen) memiliki jumlah tanggungan 4 orang. Sedangkan petani yang pada umumnya berpenghasilan maksimal satu juta, memiliki beban tanggungan 2 orang atau lebih (Tabel 4.8). Dengan pendapatan dan beban tanggungan yang ada dan didukung oleh kebutuhan keluarga, alokasi pengeluaran rumah tangga kemungkinan didominasi oleh pengeluaran untuk pangan.

Tabel 4.8
Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Pendapatan

Pendapatan	Jumlah ART				
	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	> 5 orang
Kurang 1 juta	89,5	61,5	57,1	72,0	52,3
1 – 2 juta	10,5	23,1	33,9	16,0	23,8
Diatas 2 juta	-	15,2	9,0	12,0	23,8
Jumlah	100	100	100	100	100
	(19)	(26)	(56)	(49)	(21)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Pasir, Kaltim PPK – LIPI 2004

Pemilikan Lahan

Pemilikan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan. Setelah konversi, petani plasma berhak memiliki lahan plasma seluas 2 Ha dan mengelola perkebunan kelapa sawit miliknya sesuai dengan strategi masing-masing. Sebagian responden terutama sebagai petani pengganti, memiliki lahan kebun sawit lebih dari jatah awal, baik berupa kebun plasma maupun non plasma diluar lokasi transmigrasi. Pemilikan kebun sawit oleh responden paling rendah 1 Ha dan paling tinggi 22 Ha.

Berdasarkan pemilikan lahan oleh responden di Desa Padang Jaya, pada umumnya (79 persen) responden hanya memiliki lahan perkebunan plasma yang telah konversi seluas 2 Ha. Hanya sekitar 22 persen yang telah berhasil memperluas lahan plasma, umumnya pengelolaan lahannya diupahkan (dikerjakan oleh buruh). Pada umumnya mereka ini adalah petani pemilik modal. Status kegiatan para pemilik modal ini biasanya adalah seorang pegawai baik itu pegawai negeri sipil ataupun swasta. Kemudian tempat tinggal mereka ada yang tinggal dilokasi plasma dan ada pula yang tinggal di luar desa (di kota). Diantara mereka yang tinggal di lokasi biasanya mereka ini adalah guru, penyuluh lapangan atau tokoh agama.

Para pemilik modal ini pada umumnya merupakan pengganti pemilik lahan karena berbagai alasan. Seorang informan yang juga memiliki lahan plasma dengan membeli, kini punya usaha lain yaitu pembibitan kelapa sawit. Sebagai pemilik modal dia menggantikan lahan milik petani plasma satu paket seharga Rp 400.000,- Pemodal ini menyatakan bahwa harga itu dapat dikatakan murah, dan sebagai perbandingan dia menyatakan "*harga beras pada waktu itu Rp 300,- per kilo gram*". Saat ini dia mengembangkan usaha penangkaran bibit, dengan melibatkan tenaga kerja tetap setiap harinya enam orang. Sedangkan pada saat sibuk (seperti mengisi polibek), jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar tiga puluh orang.

Mengenai harga lahan plasma pada saat itu hingga saat ini sebenarnya tidak ada standar yang pasti, menurut informasi harga lahan plasma kebun kelapa sawit in tergantung dari kebutuhan orang yang akan

menjual. Namun ada pula yang memberikan harga tergantung dari letak kebun tersebut, apabila terletak di dekat aliran sungai berarti kebun tersebut relatif subur sehingga hasil produksi pun relatif lebih baik, maka harga ditawarkan tinggi pula. Sebaliknya bila letak kebun di perbukitan yang berarti lokasi pada tanah yang tandus, dengan demikian kebun sulit mendapatkan air sehingga hasil produksi sawit baik kuantitas maupun kualitas rendah, maka biasanya penawaranpun dengan harga rendah.

Pemilikan Barang-barang Berharga

Berdasarkan pengamatan di lokasi PIR-BUN di Desa Padang Jaya, rumah tangga petani yang memiliki berbagai barang-barang berharga relatif masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan sekitar sepertiga (29 persen) responden yang telah memiliki barang-barang berharga seperti elektronik (televisi, radio, VCD), sepeda motor, ternak dan perhiasan. Kalau melihat proporsi mereka yang memiliki barang berharga ini nampaknya sama dengan proporsi mereka yang memiliki luas lahan lebih dari dua Ha. Kemungkinan mereka adalah para pemodal yang tinggal di desa ini. Dengan demikian wajar kalau mereka memiliki barang-barang berharga, karena selain memiliki kebun plasma lebih 2 Ha, mereka juga bekerja atau berusaha diluar perkebunan plasma. Kalaupun ada petani plasma yang memiliki barang-barang berharga tersebut kemungkinan mereka memilikinya dengan cara kredit, baik dari bank, dealer sepeda motor ataupun dari koperasi. Kondisi petani dengan cara kredit seperti ini juga nampak dari strategi petani dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Pengamatan pada kondisi rumah tinggal para petani, pada umumnya masih beratapkan seng (80 persen). Sedangkan dinding rumah sebagian besar masih papan (87 persen) dan lantainya masih papan pula (58 persen). Melihat kondisi rumah tinggal yang demikian ini menunjukkan bahwa rumah mereka masih asli dari sejak mereka datang sekitar 17 tahun yang lalu. Kalau diamati dengan besarnya persentase kondisi rumah yang masih asli ini memang masih ditempati oleh pemilik yang asli. Persentase ini juga hampir sama

dengan pemilikan dua Ha lahan plasma. Dengan demikian nampak bahwa petani plasma yang asli pada umumnya masih memiliki lahan kebun dan ditandai dengan kondisi rumah tinggal yang masih asli pula.

Kondisi rumah yang sudah diperbaiki biasanya mereka ini bukan petani transmigran asli, melainkan yang meneruskan atau membeli. Berbeda dengan rumah asli, rumah yang sudah diperbaiki kondisi atap dengan genteng, dinding dengan tembok batu bata, sedang lantainya menggunakan keramik serta perabotan rumah tangga lengkap.

Strategi kelangsungan hidup petani

Keadaan perekonomian rumah tangga petani plasma menurut pengalaman mereka ada perubahan sejak mereka tinggal di lokasi PIR-Trans ini. Hal ini nampak dari keadaan ekonomi sekarang dibanding dengan keadaan sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997. Hampir separo (44 persen) dari petani merasakan keadaan perekonomiannya sama saja antara sekarang dan keadaan sebelum krisis tersebut. Kemudian dalam waktu satu tahun ini hampir semua rumah tangga petani (86 persen) pernah mengalami kesulitan keuangan.

Dalam menghadapi kesulitan hidup, strategi / upaya yang dilakukan pada umumnya adalah pinjam ke koperasi (maksudnya KUD), baik pinjam dalam bentuk uang kas atau membeli kebutuhan pokok lainnya dengan meminjam. Hampir semua responden mengaku pernah mengalami kesulitan, dan sebagian besar (67 persen) diantaranya mengaku jalan satu-satunya untuk menghadapi kesulitan keuangan adalah dengan cara meminjam uang ke KUD atau langsung mengambil barang-barang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Nampaknya KUD di desa ini merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat menjadi tumpuan harapan perekonomian petani plasma kelapa sawit. KUD dengan Warung Serba Ada (Waserda) menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, sabun, atau makanan kering/

diawetkan. Mengenai harga yang telah ditetapkan KUD, petani tidak pernah memperhitungkan, karena membeli dengan kredit dianggap sebagai penolong dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi petani. Pembayaran hutang-hutang tersebut, dilakukan melalui pemotongan langsung pada waktu menerima bayaran dari pabrik CPO.

Selain kebutuhan pokok dan perumahan, kebutuhan petani lainnya adalah untuk pendidikan anaknya. Untuk pendidikan SD sudah tersedia di desa, SLTP di kota kecamatan, dan tingkat SLTA tersedia di kota kabupaten (Tanah Grogot) atau Balikpapan. Untuk mencapai kecamatan masyarakat petani biasa menempuh dengan ojek atau dengan angkutan anak sekolah. Sedangkan SD pada umumnya ditempuh dengan jalan kaki atau sepeda motor, karena lokasinya berada di desa.

Dengan adanya fasilitas pendidikan hingga tingkat SLTA ini nampak bahwa anak-anak petani dapat berhasil mencapai pendidikan hingga SLTA. Dari semua responden dengan anggota rumah tangga yang berjumlah 611 orang, 11 persen diantaranya berhasil lulus hingga SLTA. Lulusan SLTA ini nampaknya dari SMU, meskipun di Kabupaten Pasir sudah tersedia sekolah kejuruan (Kejuruan Pertanian, Kejuruan Ekonomi), namun kurang diminati. Di daerah perkebunan kelapa sawit dengan potensi sumber daya manusia yang pada umumnya masih rendah, tetapi tidak mendapat dukungan dan minat dari masyarakat untuk meningkatkan keahliannya ataupun ketrampilan di bidang perkebunan meskipun sekolah kejuruan sudah tersedia.

Sebenarnya kalau petani mau bekerja keras, kebiasaan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara hutang dapat dihindari. Sebagai contoh beberapa kasus petani yang berhasil sebagai petani plasma, didahului dengan bekerja keras mengerjakan apa saja sebelum kebun sawit menghasikan, misalnya berdagang hasil tanaman pekarangan ke pasar, berdagang apa saja, atau menjadi buruh bangunan, tukang ojek. Hasilnya dapat untuk menambah penghasilan sehari-hari. Sedangkan sebagian hasil kelapa sawit ditabung untuk memperluas lahan. Kondisi seperti ini dialami oleh salah seorang informan dengan

pengalaman bekerja mulai dari menjual sendiri hasil lahan pangan ke pasar di Kecamatan Kuaro. Kini dia menikmati kerja kerasnya dengan memiliki kebun sawit yang luas dan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke Jawa.

4.5. KESIMPULAN

Perusahaan Perkebunan Nusantara XIII, di dalam perusahaan milik negara ini dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan. Selain itu terdapat pula tenaga kerja buruh lepas yang digaji sesuai jumlah hari atau system borongan. Sedangkan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, yang merupakan petani plasma terjadi pergantian petani (pemilikan lahan), sampai saat ini telah mencapai separonya. Kondisi ini disebabkan nasib mereka yang dirasakan tidak ada perubahan selama tinggal di lokasi, sedangkan tujuan mereka datang ke lokasi adalah ingin merubah nasib. Tidak adanya perubahan dirasakan terutama ketika tidak terima jatah hidup sedangkan penghasilan yang diperoleh relatif minim, akhirnya diantara mereka meninggalkan lokasi kembali ke daerah asal atau kerja di luar lokasi. Setelah konversi terjadinya pergantian pemilikan disebabkan masuknya pemilik modal, yang berani membeli kebun kelapa sawit meskipun pekerjaannya diupahkan oleh buruh.

Petani pada umumnya masih berumur produktif, namun tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan petani pada umumnya relatif rendah sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit, alasannya bahwa dengan pendidikan rendah tersebut akan memperlambat adopsi teknologi. Adopsi teknologi yang dimaksud penting bagi petani karena dalam kegiatan perkebunan memerlukan pelatihan-pelatihan yang belum pernah diperoleh di daerah asal. Sedangkan latar belakang ketrampilan yang dimiliki di daerah asal berbeda, petani terbiasa mengolah lahan pangan.

Kegiatan petani tentang pengolahan kebun sawit terutama dalam hal pemeliharaan, sejak awal tidak sesuai dengan standar pengelolaan yang benar dan profesional. Pemeliharaan yang tidak efektif ini

terutama dalam hal pemupukan yang mengakibatkan rendahnya hasil produksi kebun kelapa sawit. Rendahnya hasil produksi ini juga dipengaruhi oleh faktor alam dan kondisi kesuburan tanah di Kalimantan Timur. Keadaan cuaca yang relatif lebih rendah dibanding provinsi lain untuk penanaman kelapa sawit, hal ini mempengaruhi pertumbuhan pohon dan kualitas produksi kelapa sawit. Rendahnya hasil produksi tandan buah segar ini yang akhirnya juga mengakibatkan rendahnya penghasilan mereka. Rendahnya penghasilan petani juga dipengaruhi oleh harga yang kurang menguntungkan bagi petani. Rendahnya penghasilan petani akhirnya mengakibatkan rendahnya kesejahteraan mereka. Dilain pihak kebutuhan keluarga petani semakin besar sebagai akibat anak-anak mereka semakin besar sehingga semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Kebutuhan ini baik untuk pendidikan maupun kebutuhan pokok sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Strategi mereka dalam menghadapi kesulitan pada umumnya lari ke koperasi (KUD), ada yang meminjam berupa uang atau mengambil langsung bahan-bahan kebutuhan pokok.

Dalam mengerjakan/mengelola kebun kelapa sawit, tenaga kerja yang digunakan oleh petani sangat bervariasi. Di satu pihak petani mengerjakan sendiri dengan dibantu anggota keluarga, ada pula yang melibatkan tenaga kerja orang lain atau diburuhkan dengan dikerjakan oleh dua orang setiap kapling.

BAB V

PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA TERKAIT PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam tiga dekade terakhir. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit yaitu dari 106.000 ha pada akhir tahun 1960 an menjadi 2,7 juta ha pada tahun 1997. Pertumbuhan pesat ini telah menjadikan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar kedua sesudah Malaysia, dan menyumbang sekitar 30% dari persediaan minyak global pada tahun 1997 (Casson, 2000). Dari segi ekonomi perkembangan ini sangat penting, karena menjadi salah satu sumber devisa yang menguntungkan berbagai pihak, serta menyediakan lapangan kerja yang cukup besar karena sifat perkebunan yang cenderung padat karya. CPO juga dianggap sebagai komoditi strategis karena merupakan bahan baku minyak yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia (Sarjono, 1996). Hal ini dapat menjadi komoditi andalan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, sekaligus menyediakan lapangan kerja di kawasan tersebut dan sekitarnya.

Sebelum krisis tahun 1997, Indonesia diprediksikan mampu menggantikan posisi Malaysia sebagai negara produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Untuk mencapai maksud tersebut, Indonesia bertekad untuk mencapai posisi tersebut dengan memperluas areal perkebunan kelapa sawit ke wilayah timur Indonesia. Pada akhir era Orde Baru, berbagai kemudahan diberikan kepada para investor dan para pelaku ekspor CPO, terutama untuk investasi kelapa sawit di wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun perkembangan ini agak tersendat

sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi dan perubahan politik di Indonesia, bahkan tahun 1998 Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan kelapa sawit dan produksi CPO yang cukup signifikan. Banyak perkebunan swasta besar yang terpaksa menjual perkebunannya, atau menunda pembukaan lahan baru, karena menghadapi berbagai permasalahan dalam perbankan. Namun Malaysia mengambil manfaat dari keadaan ini yaitu melakukan ekspansi ke Indonesia, dengan mengambil alih perkebunan yang menghadapi masalah dengan BPPN. Keadaan demikian dapat mengganggu rencana besar Indonesia untuk menggantikan posisi Malaysia sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia di bidang kelapa sawit.

Kini Indonesia memiliki kebun sawit seluas 3,5 juta Ha yang tersebar di 16 provinsi, namun masih banyak kendala untuk perkembangannya, baik dilihat dari kondisi lahan, kematangan SDM maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Bidang transportasi dan logistik mempunyai peranan penting dalam perkembangan dan penyebaran kelapa sawit di Indonesia (Djoko Pitono dkk., 2002). Dukungan infrastruktur / sarana prasarana di lokasi kegiatan sangat penting, mengingat kondisi infrastruktur di luar Jawa, terutama Kawasan Indonesia Timur, masih kurang memadai untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit, termasuk kebutuhan untuk penyebaran industri hilir ke daerah perkembangan kelapa sawit di luar Jawa dan Sumatera.

Seiring dengan era otonomi daerah dan makin pulihnya ekonomi nasional, tampaknya rencana perkembangan perkebunan kelapa sawit ke Indonesia Timur terus berlanjut, termasuk perkembangan kelapa sawit ke Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Pasir sebagai primadona provinsi. Meskipun di kawasan tersebut potensi lahan masih cukup luas untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit lebih lanjut, namun banyak pihak mencemaskan dampak perkembangan ini, karena sebagian besar perluasan merupakan hasil konvensi hutan tropis basah di Indonesia. Di daerah seperti Kalimantan dan Papua, banyak lahan hutan yang sedianya dikonvensikan sebagai perkebunan kelapa sawit, kemudian

diperlakukan oleh investor semacam HPH, yaitu dimanfaatkan kayu yang ada di lahan konvensi, tanpa kejelasan pengelolaan kelapa sawitnya, sehingga potensial menambah kerusakan lingkungan (Casson, 2000).

Bagian ini akan menganalisis prospek penyerapan tenaga kerja dalam kaitan dengan keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama di Kabupaten Pasir, dan Kalimantan Timur pada umumnya. Untuk mendapatkan gambaran lengkap, pembahasan tentang prospek pengembangan, tidak dapat lepas dengan kondisi dan kebijakan makro dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik nasional maupun regional. Untuk itu akan dibahas beberapa hal terkait dengan prospek penyerapan tenaga kerja yaitu keberlangsungan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, perkembangan pengelolaan perkebunan, baik hulu maupun hilir. Bagian akhir tulisan akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penyerapan tenaga kerja terkait dengan prospek pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta isu pokok sebagai kesimpulan. Sebagai sumber data terutama berasal dari data primer terutama data kualitatif dan review kepustakaan termasuk hasil-hasil penelitian terkait sebelumnya.

5.1. KEBERLANGSUNGAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tergolong baru apabila dibandingkan dengan perkebunan sejenis di Sumatera maupun wilayah Kalimantan lainnya. Namun dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kaltim, pengelolaan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir yang dikembangkan sejak awal tahun 1980 an, merupakan pionir dan kini kelapa sawit menjadi unggulan komoditi perkebunan. Sampai kini Kabupaten Pasir merupakan sentra produksi kelapa sawit di kawasan ini. Sekitar separuh produksi kelapa sawit di seluruh Kaltim dihasilkan oleh wilayah Pasir yang kini menjadi dua kabupaten yaitu Pasir dan Penajam Pasir Utara. Dengan demikian komoditi kelapa

sawit yang merupakan bagian penting dari sub sektor perkebunan, juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Pasir. Sektor pertanian merupakan penyumbang APBD terbesar kedua sesudah sektor pertambangan dan diperkirakan untuk periode 2001-2005, kontribusi sektor pertanian mencapai sekitar 32%, dan tanaman perkebunan sekitar 6% (Propeda Kabupaten Pasir 2001-2005: 15). Dalam perkembangannya selain pola PIR-BUN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Pasir juga telah mengembangkan pola PIR- Swadaya, terutama untuk masyarakat lokal di Kabupaten Pasir.

Sebagai komoditi yang mempunyai peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pasir, maka keberlangsungan perkebunan kelapa sawit perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait, seperti petani, pihak perusahaan, koperasi dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan peran yang saling terkait dalam menopang keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut, sehingga diharapkan prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit juga terjamin. Petani sawit diharapkan mampu untuk mengelola kebun kelapa sawit secara optimal, agar hasilnya memadai baik untuk menopang kehidupan petani beserta keluarganya, maupun mampu melakukan penanaman kembali (*replanting*) pada waktunya. Kemampuan petani untuk menjaga keberlangsungan kebun sawit ini sangat tergantung pada kesiapan mereka dalam mengelola kelapa sawit sesuai dengan standar pengelolaan secara professional, sehingga hasil yang diperoleh dapat optimal. Hasil yang diperoleh petani dari pemasaran TBS ke perusahaan, juga dipengaruhi oleh harga TBS yang penetapannya sangat tergantung pada itikad baik dari perusahaan baik PTPN ataupun swasta. Sedangkan pihak koperasi petani berperan penting dalam membantu kelancaran bahan kebutuhan petani sebagai penghubung antara pihak petani dan perusahaan, terutama dalam pemasaran hasil. Pihak Pemda berkepentingan dalam mensukseskan perencanaan pembangunan termasuk keberlangsungan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit, karena komoditi tersebut merupakan salah satu sumber ekonomi utama daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi

masyarakat. Di bawah ini akan dibahas kondisi masing-masing pihak terkait dan perannya dalam mengupayakan keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan Kabupaten Pasir.

Peran petani

Data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir pada tahun 2002, menunjukkan luas areal perkebunan kelapa sawit di daerah ini mencapai 52.226,20 Ha (BPS Kab. Pasir, 2003: 181). Pembangunan perkebunan yang pertama di Kaltim adalah Kabupaten Pasir yang dilaksanakan sejak tahun 1982/1983, dengan pola PIR/NES yang luas arealnya mencapai 30.270 Ha terdiri dari kebun inti seluas 13.270 Ha dan kebun plasma seluas 17000 Ha (Disbun. Kaltim, 2003). Semula yang bertindak sebagai perusahaan inti adalah PTPN VII, kini dikelola oleh PTPN XIII yang berkantor pusat di Pontianak, Kalimantan Barat. Perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR ini melibatkan sekitar 12.357 KK sebagai petani plasma, terdiri dari transmigran (80%) dan sisanya masyarakat lokal (20%). Rata-rata petani plasma memperoleh lahan untuk kelapa sawit sebanyak 2 Ha, sehingga jumlah petani plasma yang terserap sebanyak 8500 KK. Selebihnya adalah petani lepas baik dari masyarakat lokal maupun pendatang. Status mereka pada waktu itu adalah pekerja borongan atau kontrak dengan sistem upah borongan atau harian. Menurut laporan dari PTPN di lokasi Tajati, pada tahun 2004 kebun inti Tajati menyerap tenaga kerja sebanyak 444 orang, terdiri dari pimpinan dan para pelaksana.

Selama masa persiapan pola PIR-BUN, yaitu 3 tahun pertama penanaman, petani melakukan berbagai kegiatan di perkebunan plasma, dibawah bimbingan dan pengawasan mandor-mandor perusahaan inti. Pengalaman dan bimbingan ketrampilan selama masa ini, dapat dianggap sebagai pemberdayaan terhadap petani plasma, sehingga diharapkan setelah konversi petani mampu mandiri dengan melakukan berbagai kegiatan di perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar perusahaan. Keberhasilan petani dalam menyerap pengetahuan dan ketrampilan, sangat berpengaruh terhadap

produktivitas dan keberlangsungan pengelolaan kebun plasma yang menjadi miliknya. Beberapa kegiatan yang dilakukan petani selama masa persiapan antara lain *nunas* (pelepasan pelepah), *nebas* (menebang gulma dan semprot), garuk piring (membersihkan semak), pemupukan, dan panen. Sedangkan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman bibit dilakukan sendiri oleh perusahaan inti, tanpa melibatkan petani plasma. Masa persiapan ini sangat berarti buat petani, karena umumnya transmigran hanya berpengalaman sebagai petani tanaman pangan di daerah asalnya. Namun seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, tidak semua kegiatan dilakukan sesuai dengan standard perusahaan, terutama untuk kegiatan pemupukan dan pemeliharaan lainnya. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas hasil kelapa sawit, mengingat pemupukan merupakan faktor dominan (60%) dalam mencapai hasil optimal. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap produktivitas adalah kualitas bibit/benih, umur tanaman dan kualitas tenaga kerja. Ulah para mandor dan ketidakseriusan petani pada masa persiapan ini selain merugikan perusahaan inti, juga merugikan petani sendiri karena berpengaruh terhadap penghasilan mereka selanjutnya. Pada saat ini produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasir hanya mencapai 14 ton per Ha per tahun, sementara produktivitas di Malaysia dapat mencapai 35 ton per Ha per tahun.

Sejak konversi (setelah kelapa sawit menghasilkan), petani plasma berkewajiban membayar biaya pengelolaan kebun dengan sistem kredit. Hal ini berarti kegiatan selanjutnya menjadi tanggung jawab petani sesuai dengan kelompok hamparan masing-masing. Kebiasaan untuk melakukan kegiatan tanpa mengikuti standar perusahaan berlanjut, karena pengeluaran biaya pemeliharaan terutama untuk pupuk dan obat-obatan, kini menjadi beban petani. Demikian pula kegiatan pemeliharaan kebun lainnya sering diabaikan petani, baik karena kurang tenaga maupun kurang menyadari akibatnya terhadap kelangsungan usaha perkebunan. Kegiatan petani yang paling menonjol adalah kegiatan panen yang dilakukan setiap dua minggu sekali, dengan mengikut sertakan anggota keluarga atau diupahkan. Minimnya kegiatan petani dalam kegiatan pemeliharaan juga

dipengaruhi oleh penghasilan petani yang tidak tentu, dan tergantung pada persediaan pupuk dan harga yang ditetapkan oleh KUD. Kualitas hasil TBS yang ditengarai oleh tingkat rendemen yang ditentukan perusahaan, biasanya dipengaruhi oleh umur pohon, pola pemeliharaan dan waktu dan cara panen. Apabila kualitas kelapa sawit tidak sesuai dengan standar perusahaan, harga menjadi lebih rendah karena dikenai penalti oleh perusahaan. Akibatnya penghasilan petani cenderung menurun setelah beberapa tahun, baik karena menurunnya kuantitas dan kualitas kelapa sawit, maupun karena adanya fluktuasi harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam setahun terakhir petani umumnya merasakan kecenderungan menurunnya hasil TBS dan semakin lamanya masa panen (sebulan sekali).

Peran perusahaan

Kelangsungan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir sangat tergantung pada perusahaan yang menjadi mitra petani baik PTPN maupun swasta. Dalam hal perkebunan yang dikelola PTPN, peran penting perusahaan dilakukan sejak awal, yaitu dari masa penanaman, pemeliharaan, sampai dengan paska panen yaitu pemasaran dan pengolahan CPO. Demikian pula untuk perusahaan swasta yang biasanya berperan aktif dalam mengolah hasil petani (CPO). Pemasaran hasil sangat tergantung pada kemampuan perusahaan CPO untuk menampungnya, sementara untuk mendirikan perusahaan memerlukan modal besar, karena ketentuan pusat yang mensyaratkan pemilikan perkebunan inti untuk pendirian pabrik CPO. Dengan demikian peran perusahaan dalam upaya memelihara kelangsungan perkebunan kelapa sawit, mencakup industri dari hulu ke hilir.

Selama ini pemasaran hasil TBS dari Kabupaten Pasir dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan CPO yang dimiliki perusahaan inti. Di Kabupaten Pasir terdapat 3 pabrik pengolahan CPO milik PTPN. Sebetulnya Pemerintah daerah pernah menjalin kontrak penjualan TBS hasil PIR-Swadaya ke PTPN XIII, namun kini tidak dilanjutkan, karena petani harus menghadapi antrian

panjang di pabrik pengolahan CPO, dan perbedaan harga yang ditentukan untuk petani dari PIR-Swadaya lebih rendah dari petani plasma PIR-BUN. Keadaan ini menunjukkan pabrik CPO yang tersedia sudah tidak mampu lagi menampung hasil TBS, terutama setelah PIR-Swadaya mulai menghasilkan. PTPN berperan dominan terhadap pemasaran hasil produksi petani plasma terutama dalam menentukan harga TBS, baik sebelum maupun sesudah pelunasan kredit.. Padahal setelah petani memperoleh sertifikat tanda pemilikan kebun, pemasaran dapat dilakukan secara bebas melalui KUD, baik ke perusahaan inti maupun pihak swasta. Namun sampai penelitian dilakukan, hampir semua petani plasma masih tetap menjadikan PTPN sebagai mitra utama dalam pemasaran hasil, walaupun banyak petani yang sudah melunasi kreditnya. Ikatan kemitraan antara plasma dan inti yang sudah terbina selama ini, tetap dipertahankan meskipun sebatas hubungan pemasaran hasil. Bahkan masuknya perusahaan swasta sebagai penampung hasil TBS (baru 6 bulan), tidak mempengaruhi KUD untuk mengalihkan pemasarannya, karena harga yang ditentukan oleh PTPN masih cukup bersaing dengan perusahaan swasta. Menurut informan dari KUD, apabila dalam perkembangannya harga yang ditentukan PTPN tidak menguntungkan petani, KUD bebas untuk mengalihkannya ke pihak swasta yang lebih menguntungkan. Dominannya perusahaan dalam penentuan harga selama ini cenderung kurang menguntungkan petani, sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam kelangsungan pengelolaan kebun, karena pemeliharaan dan penanaman kembali membutuhkan biaya besar, sementara hasil produksi kurang mencukupi. Meskipun terdapat kelompok kerja (Pokja) untuk penetapan harga TBS, namun peran PTPN tetap sangat dominan, sehingga Pokja kesulitan dalam memperjuangkan harga yang lebih baik bagi petani.

Peran koperasi

Posisi koperasi (KUD) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sangat strategis, terutama sebagai penghubung antara perusahaan inti dan plasma, baik dalam mengkoordinir cicilan kredit pada

perusahaan, maupun fungsi koordinasi dalam pemasaran hasil. Sejak konversi, koperasi juga berfungsi dalam penyuluhan di samping sebagai penyalur pupuk dan obat-obatan, menyediakan transportasi untuk pengangkut kelapa sawit dari kebun ke pabrik pengolahan. Koperasi juga menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari petani. Sebagai anggota koperasi, petani mendapat berbagai kemudahan kredit (sampai setahun), dan mendapat prioritas dalam pemasaran ke PTP.

Peran KUD sangat besar dalam proses pemasaran TBS sejak dari kebun ke pabrik CPO, karena perusahaan hanya mau menerima apabila melalui KUD. KUD juga berkepentingan karena pada umumnya petani memiliki hutang pada KUD, baik untuk keperluan pengelolaan kebun maupun untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena pembayaran hasil penjualan TBS baru diterima KUD setelah sebulan TBS diserahkan ke pabrik, bersamaan dengan penetapan harga oleh PTPN, maka petani menerima hasil sesudah dilakukan berbagai potongan hutang masing-masing petani. Akibatnya petani hanya menerima sisa penghasilan yang sangat berfluktuasi, tergantung hasil panen dan harga yang ditetapkan. Besar kecilnya hasil panen tidak selalu berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani, karena seringkali pada saat panen raya, harga cenderung turun. Penghasilan yang berfluktuasi ini menjadi kendala bagi petani untuk melakukan pengelolaan sesuai standar, sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam melakukan *replanting* kelak. Biasanya KUD memperoleh informasi harga TBS, setelah sebulan pengiriman TBS ke pabrik, sehingga KUD kesulitan untuk membandingkan harga dengan pihak lain.

Peran Koperasi sangat strategis baik sebagai wakil petani dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun, maupun sebagai penghubung antara petani dan perusahaan. Namun demikian upaya KUD dengan mengikut sertakan petani dalam asuransi untuk peremajaan pohon, terancam gagal, karena banyak dana yang sudah dikumpulkan KUD, ditarik kembali oleh sebagian petani akibat menurunnya hasil kelapa sawit dalam setahun terakhir. Padahal asuransi ini dimaksudkan untuk membantu petani melaksanakan

persiapan *replanting*, guna menjaga kelangsungan perkebunan plasmanya. Kondisi ekonomi petani plasma juga dapat dilihat dari data survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani plasma terutama transmigran asli (tahun 1987), pemilikan lahannya tidak bertambah yaitu rata-rata 3 Ha (kebun dan pangan). Sementara pengganti petani (yang datang sesudah tahun 1990) mayoritas memiliki lahan di atas 3 Ha. Besar kemungkinan mereka memiliki modal sehingga mampu mengembangkan kebun kelapa sawit. Sebaliknya petani yang hanya mengandalkan hasil kebun plasma saja, dengan hasil yang cenderung menurun, akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan keberlangsungan kebunnya, karena dalam waktu dekat harus melaksanakan penanaman kembali (*replanting*).

Pemerintah daerah

Salah satu semangat dalam visi pembangunan Kabupaten Pasir adalah 'menjadikan Kabupaten Pasir sebagai kawasan agroindustri terkemuka' (Propeda Kab. Pasir 2001-2005: 20). Dalam mewujudkan visi ini, pemda berkepentingan untuk menjaga kelangsungan hasil pertanian dalam arti luas di kawasan ini, sehingga memungkinkan untuk berkembangnya industri hilir di wilayahnya. Perkembangan agro industri sangat strategis baik dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, maupun menyediakan kesempatan kerja baik pada industri hulu maupun hilir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir, tidak terlepas dari strategi untuk mencapai visi atau sasaran pembangunan tersebut. Perkebunan dengan pola PIR-Swadaya ini merupakan kebijakan provinsi dan daerah tingkat II, dengan lokasi perkebunan yang tersebar pada lima kecamatan yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Grogot dan Ps. Belengkong. Sejak tahun 1990, pemerintah daerah membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR Swadaya (PIR Lokal) dan PIR swadaya murni. PIR swadaya ini dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi (APBD I)

dengan luas 4324 Ha dan menjadi 6872 Ha pada tahun 2002. Tambahan luas areal berasal dari dana pemerintah daerah (APBD II) seluas 1499 Ha dan swadaya murni petani seluas 1148 Ha (Disbun. Kaltim, 2003:2). PIR-Swadaya ini melibatkan peserta sebanyak 3863 yang tergabung dalam 89 kelompok tani.

Peran pemda dalam pengembangan pola PIR-Swadaya sangat penting karena dimaksudkan antara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kehidupan petani plasma (PIR- PTPN) dengan masyarakat di sekitarnya (petani lokal). Animo masyarakat untuk mengikuti jejak petani plasma dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan terbatasnya kemampuan PTPN dalam menampung petani lokal (hanya 20%), menyebabkan upaya Pemda mendapat sambutan positif dari masyarakat Pasir. Apalagi Kabupaten Pasir masih memiliki potensi lahan yang cukup untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam era otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, strategi dan program pengembangan sektor perkebunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pemda sebagai daerah otonom dapat memberikan berbagai kemudahan baik terhadap investor maupun masyarakat petani, antara lain kemudahan ijin, keringanan pajak dan peningkatan sarana dan prasarana, pemberian subsidi atau paket kredit untuk petani pemula. Pemda juga dapat memberi dukungan berupa kemudahan untuk mengakses modal bagi petani plasma yang memerlukan dana untuk *replanting* atau perluasan lahan. Pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha per keluarga, kini dianggap kurang mencukupi untuk kesejahteraan petani dan keluarganya. Keadaan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pecahan KK, keterbatasan kesempatan kerja di luar pertanian, serta fluktuasi harga yang cenderung kurang menguntungkan petani. Kemampuan petani untuk perluasan kebun sangat berarti baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, juga sekaligus berarti menyediakan lapangan kerja yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya, termasuk pecahan KK yang umumnya tidak memiliki lahan. Keadaan ini juga dapat membantu petani plasma dalam merencanakan penanaman kembali perkebunan plasma,

yang semakin dekat waktunya. Apabila dalam kebijakan sub-sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dapat diarahkan untuk membantu mempersiapkan penanaman kembali kelapa sawit, baik petani plasma PTPN maupun petani swadaya, maka keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan menurunnya produksi dan kesejahteraan petani plasma akhir-akhir ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan pengelolaan kelapa sawit, yang berarti prospek penyediaan lapangan kerja dari perkebunan sawit turut terganggu.

Selama ini peran Pemda berbeda dalam menghadapi kedua pola perkebunan (PIR-BUN dan PIR-Swadaya). Keadaan ini disebabkan adanya perbedaan secara substansial antara kedua pola tersebut, baik dalam sumber pendanaan maupun penanggung jawab pengelolannya. Pada pola PIR-BUN, sumber dana berasal dari bank dunia dan BRI, serta dikelola sebagai bagian dari PIR-nasional. Semua paket untuk persiapan awal pengelolaan kelapa sawit disediakan oleh perusahaan inti (PTPN) yaitu bibit, pupuk, obat-obatan, yang akan dibayar kembali oleh petani setelah menghasilkan. Namun sejak pengelolaan lahan menjadi tanggung jawab petani plasma, hubungan petani plasma dengan perusahaan inti hanya terbatas pada kegiatan pemasaran.

Pada pola PIR-Swadaya, peran Pemda sangat dominan karena sumber dana berasal dari APBD provinsi dan kabupaten, dengan substansi pengelolaan seperti pada pola PIR. Sebagai petani plasma adalah masyarakat lokal yang menyediakan lahan sendiri dan sejak awal petani dilibatkan dalam persiapan lahan dan penanaman bibit. Untuk pembiayaan selama persiapan, petani menerima paket berupa bibit, pupuk, obat-obatan, dan pembinaan dari Dinas Perkebunan provinsi atau kabupaten. Sebagian paket ini harus dibayar kembali secara kredit oleh petani swadaya, setelah kebun menghasilkan. Sebagai manager pengelola PIR swadaya adalah Ketua UPP PIR swadaya yang mendapat wewenang dari Disbun Provinsi dan dibantu oleh KUD di setiap kecamatan. Selain memimpin pengelolaan kebun kelapa sawit, kepala UPP juga berperan sebagai penghubung dalam pemasaran hasil ke pihak perusahaan pengolahan CPO atau ke

perusahaan swasta yang berinvestasi di lokasi perkebunan. Perbedaan kedua pola PIR inilah yang menyebabkan Pemda lebih memprioritaskan pemberdayaan petani lokal daripada petani plasma pola PIR-BUN, yang pembinaan sebelumnya menjadi tanggung jawab PTPN sebagai perusahaan inti. Namun pada saat ini kedua kelompok petani ini menjadi sasaran kebijakan dinas perkebunan pada umumnya, meskipun dengan porsi pembinaan yang berbeda. Dikuatirkan kurangnya pembinaan pada salah satu kelompok petani akan berdampak pada kualitas hasil dan kelangsungan perkebunan, sehingga peningkatan daya saing kelapa sawit di kawasan tersebut sulit tercapai.

Dalam era otonomi daerah, Pemda juga mempunyai wewenang lebih besar dalam mengklarifikasi status tanah (tanah negara atau tanah adat), sehingga investor mempunyai kepastian sebelum mengelola perkebunannya. Kerancuan mengenai status tanah dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan sosial, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sub-sektor perkebunan. Penguasaan lahan perkebunan oleh PTPN dengan pola PIR-BUN merupakan bagian dari program nasional, yang melibatkan Departemen Perkebunan dan Departemen Transmigrasi. Sebelum otonomi daerah, semua izin untuk pemanfaatan lahan negara menjadi wewenang pemerintah pusat. Banyak tanah adat atau hak ulayat yang diklaim sebagai tanah negara, sehingga masyarakat setempat tidak berdaya untuk mempertahankan hak ulayat mereka, karena tidak ada bukti nyata yang mendukungnya. Pengakuan undang-undang akan hak ulayat atau adat baru mendapat ruang dalam era reformasi, sebagai koreksi atas pengabaian hak-hak masyarakat adat sebelumnya. Pengakuan hak adat tersebut di satu pihak sangat menguntungkan masyarakat lokal karena dapat mengembalikan hak-hak mereka yang hilang, tetapi di lain pihak dapat menghambat investor dalam keberlangsungan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan ini. Dalam beberapa kasus, tuntutan terhadap hak adat juga potensial disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

Meningkatnya harga lahan perkebunan juga potensial untuk praktek penyalahgunaan hak adat oleh berbagai kelompok kepentingan dalam

masyarakat. Menurut informasi dari tetua adat di Pasir, hak adat biasanya diperoleh secara turun temurun terutama berkaitan dengan hutan rotan dan buah-buahan. Hak-hak adat diketahui oleh kelompok masyarakat bersangkutan, namun belum diakui pemerintah karena tidak jelas kriterianya. Ketidakjelasan aturan hak adat dan melemahnya kekuatan adat, sering menimbulkan gejolak dalam masyarakat, karena merasa hak-haknya terabaikan. Sebagai contoh pada pembukaan pertambangan yang dianggap banyak mengabaikan hak adat. Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemda berwenang untuk meningkatkan kerja sama dengan tokoh adat setempat untuk meninjau status tanah hak negara. Hal ini dilakukan agar para investor tidak menghadapi resiko setelah proyek dilaksanakan. Kepastian akan status lahan yang diminati investor dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan di kemudian hari, sehingga tidak menghambat penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

Dalam 6 bulan terakhir, Pemda telah berhasil menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk berinvestasi di bidang pemasaran kelapa sawit lengkap dengan sarana dan prasarana untuk penimbangannya. Persaingan antara PTPN dan pihak swasta dalam pemasaran kelapa sawit cukup positif bagi petani plasma, karena harga menjadi lebih kompetitif. Apalagi dalam promosinya PT swasta tidak melakukan penalti dan harga ditentukan di muka berdasarkan harga pasar dunia, sehingga dapat bersaing dengan harga dari PTPN. Upaya pemda untuk menambah pabrik pengolahan CPO agar dapat menampung kelebihan hasil kelapa sawit, sampai sekarang belum berhasil karena terbentur dengan peraturan pusat yang mewajibkan adanya perkebunan inti bagi pabrik pengolahan CPO. Padahal untuk menampung kelapa sawit dari perkebunan seluas 56.000 Ha, diperlukan 6 buah pabrik CPO, sementara pabrik CPO milik PTPN hanya 3 buah. Kasus demo petani yang pernah terjadi disebabkan oleh hasil produksi TBS yang melebihi daya tampung CPO, sehingga mengakibatkan antrian panjang yang mempengaruhi kualitas TBS dan menurunkan harga TBS. Tertundanya pendirian pabrik CPO, dapat diartikan berkurangnya kesempatan Pemda untuk memperluas kesempatan kerja pada industri hilir, dan meniadakan nilai tambah

hasil produksi di wilayah Kabupaten Pasir. Sementara hasil TBS yang ditampung oleh perusahaan swasta lebih menguntungkan daerah lain, karena TBS diproses di pabrik CPO yang lokasinya di luar Kabupaten Pasir.

5.2. PROSPEK PENGELOLAAN KELAPA SAWIT : HULU DAN HILIR

Prospek perkebunan kelapa sawit

Di tingkat nasional

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit di Indonesia terkait erat dengan makin meningkatnya permintaan CPO, dan permintaan minyak goreng nabati baik di pasar domestik maupun global, yang merupakan hasil pengolahan dari industri hulu. Sampai tahun 1997 produksi CPO di tingkat nasional juga mengalami perkembangan pesat yaitu meningkat rata-rata sekitar 12% setahun (Casson, 2000).

Indonesia bertekad untuk dapat mengganti posisi Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Untuk mencapai posisi tersebut, secara nasional dilakukan perencanaan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sampai 5,5 juta Ha pada tahun 2000, yang diarahkan ke wilayah Indonesia bagian timur terutama Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Irian Jaya). Hal yang sama direncanakan pula untuk meningkatkan produksi CPO sampai 7,2 juta ton pada tahun 2000 dan 10,6 juta ton pada tahun 2005 (Arifin dan Susila, 1998). Perkembangan yang pesat di berbagai wilayah terjadi pada semua jenis perkebunan baik milik Negara (PTPN), swasta maupun perkebunan rakyat. Wilayah yang sudah lama mengalami perkembangan kelapa sawit, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya perkebunan swasta besar, sementara untuk daerah yang baru berkembang, lebih banyak didominasi oleh perusahaan Negara. Namun demikian sampai tahun 1997, lahan perkebunan yang sudah ditanami kurang dari 30% nya, dari lahan yang disediakan. Sebagian disebabkan investor kurang serius dalam mengusahakan kebun sawit baik karena pengaruh krisis, atau mereka cenderung lebih memanfaatkan hutan konversi untuk keperluan lain (seperti

pengambilan kayu) daripada membuka dan mengembangkan perkebunan sesuai dengan ijin lokasi.

Berbagai kebijakan dilakukan untuk menarik investor memperluas perkebunan kelapa sawit ke arah Indonesia bagian timur, antara lain dengan menurunkan pajak ekspor produk CPO sampai 5%, mempromosikan pengembangan kebun sawit di Indonesia Timur dan mengalokasikan lahan yang luas melalui Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), bahkan penguasaan lahan sampai 40.000 Ha (dua kali lipat daerah lain) bagi para investor yang bersedia mengembangkan kebun sawit di Irian Jaya. Dengan dukungan kebijakan pusat, prospek perkembangan perkebunan kelapa sawit sesudah krisis masih terbuka lebar, terutama di Kalimantan dan Irian Jaya. Perkembangan sub-sektor kelapa sawit merupakan komoditi strategis, yang selain menghasilkan devisa, juga bersifat padat karya, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian apabila kebijakan tersebut tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, maka daerah berpeluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus mengatasi pengangguran di wilayahnya.

Di tingkat daerah

Perkembangan pesat kelapa sawit di tingkat nasional, tidak berarti sama dengan perkembangan di tingkat daerah seperti Kalimantan Timur. Luas areal perkebunan kelapa sawit di luar Sumatera relatif masih kecil (kurang dari 100.000 Ha.) (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1998). Bahkan dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan, pada tahun 1997 Provinsi Kaltim memiliki areal perkebunan terkecil yaitu 49.219 Ha, sementara Provinsi Kalbar memiliki areal kebun sawit dan produksi CPO terbesar yaitu 227.712 Ha dan 295.477 ton (Deptan. Dirjen Perkebunan, 1998). Kalimantan Timur sebagai bagian dari rencana pengembangan, merupakan kawasan perkembangan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Sesudah krisis (1998-2002) perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mengalami perkembangan luas areal dan jumlah produksi yang relatif

tinggi dibandingkan dengan perkembangan rata-rata luas areal dan produksi komoditi perkebunan lainnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kaltim berkembang dari 91.571 Ha menjadi 132.178,5 Ha selama 5 tahun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 11,08 % per tahun, merupakan pertumbuhan rata-rata tertinggi sesudah komoditi lada (14,38%). Sedangkan pertumbuhan rata-rata produksi kelapa sawit tertinggi dibandingkan komoditi lain yaitu mencapai 58.76% (Tabel 1 dan 3 laporan Disbun Kaltim, 2003). Dilihat dari perkembangan luas areal kebun sawit di Kaltim selama tahun 1992-2002, perkembangan terjadi pada semua jenis/pola perkebunan yaitu perkebunan rakyat (26,12%), PTPN (11,67%) dan PBS (48,42%), dengan kecenderungan perkembangan terbesar pada jenis perkebunan swasta, yaitu sekitar 48% selama 10 tahun (1992-2002) (Renstra Disbun Provinsi Kaltim, 2003:8). Daerah yang mengalami perkembangan kelapa sawit terluas di Kaltim adalah Kabupaten Pasir (sekarang menjadi Pasir dan Penajam Pasir Utara-PPU), yang mencapai sekitar separuh dari luas kelapa sawit di Kaltim.

Rencana perkembangan lebih lanjut perkebunan kelapa sawit di Kaltim ditetapkan pada tahun 1998, dengan luas 1 juta Ha (1,5 juta di Kalbar), untuk jangka waktu 15 tahun (2003-2018). Pada tahun 2003 realisasi kebun sawit di Kaltim baru mencapai luas sebesar 148.000 Ha atau 14,8%, sehingga untuk mencapai target 1 juta Ha pada tahun 2018, diperlukan kebijakan yang komprehensif dari masing-masing daerah untuk mendukung rencana tersebut. Rencana perluasan ini tersebar ke berbagai kabupaten, terutama Kutai Timur, Berau, Pasir dan Bulungan. Lebih dari separuh rencana perluasan terdapat di kabupaten-kabupaten ex- Kutai, terutama Kutai Timur (Tabel 5.1.).

Kawasan Pasir (Pasir dan PPU) saat ini mendominasi perkebunan kelapa sawit di Kaltim, karena pada tahun 2002 memiliki luas areal lebih dari separuh luas kebun sawit di Kaltim (64.059,5 Ha). Kondisi ini menempatkan komoditi ini sebagai primadona dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Meskipun banyak pihak meragukan Kaltim dapat mencapai target 1 juta Ha pada tahun 2018, namun melihat potensi lahan di Kabupaten Pasir, tampaknya target perluasan 25.000 Ha tidak terlalu sulit untuk dicapai. Hal ini didasarkan pada

masih tersedianya Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang dapat dikonversikan untuk usaha perkebunan dan sudah mendapat ijin lokasi seluas 374.199 Ha (Pasir dan PPU), sementara realisasi tanam baru sekitar 96.360,5 Ha. Demikian pula kawasan ini masih memiliki sisa lahan KBNK dan lokasi yang ijin usahanya telah dicabut seluas 278.282 Ha. Namun banyaknya lahan yang dicabut ijin lokasinya, juga menunjukkan ketidak seriusan investor untuk pengembangan kebun kelapa sawit di wilayah ini. Keengganan para investor juga disebabkan terjadinya konflik yang meluas antara perusahaan (PTPN) dengan masyarakat lokal, berkaitan dengan tanah adat atau hak ulayat. Keadaan ini dapat berpengaruh terhadap percepatan rencana perkembangan kebun sawit di masa depan.

Tabel 5.1.

Rencana Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

NO.	LOKASI	Jumlah areal (Ha)
1	Kabupaten Pasir	25.000
2	Kabupaten Kutai Timur	500.000
3	Kabupaten Kutai Kertanegara	40.000
4	Kabupaten Kutai Barat	35.000
5	Kabupaten Nunukan	25.000
6	Kabupaten Berau	81.000
7	Kabupaten Bulungan	25.000
8	Kabupaten Malinau	4.500
9	Diabun Provinsi	10.000
TOTAL		745.500

Sumber: Laporan Disbun Provinsi Kaltim, 2003.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Perkebunan Pasir, target untuk mengembangkan areal kelapa sawit seluas 25.000 Ha di Kabupaten Pasir, terdiri dari 1.200 Ha untuk PIR Swadaya, 5.000 Ha yang akan dikembangkan oleh Koperasi Pegawai Negeri dan sisanya 18.800 Ha disediakan untuk perusahaan swasta yang berminat serius untuk menanamkan investasi di perkebunan kelapa sawit. Sedangkan perluasan perkebunan kelapa sawit dengan

pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir ditargetkan seluas 10.000 Ha dengan lokasi terutama sepanjang jalan (kiri-kanan) antara Tanah Grogot – Long Kali.

Sebagai komoditi andalan di Pasir, pemda berkepentingan untuk mendorong percepatan perluasan kelapa sawit di wilayahnya. Peran komoditi ini makin strategis di masa depan mengingat adanya ketersediaan lahan yang memadai untuk perkebunan, didukung oleh agroklimat yang sesuai untuk budidaya perkebunan. Di sisi lain komoditi yang dapat diperbaharui ini dapat menjadi andalan pengganti dari SDA yang ketersediaannya makin menipis seperti kayu dan pertambangan, sehingga sulit/tidak dapat diperbaharui lagi. Sebagai primadona, kelapa sawit di Pasir sangat diandalkan sebagai pengganti pemasok pendapatan daerah, di samping peran pentingnya dalam penyediaan lapangan kerja di daerah tersebut. Karena pengelolaan perkebunan cenderung bersifat padat karya, maka perkembangan lebih lanjut dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi. Namun demikian prospek perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut juga terkait erat dengan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, seperti potensi dan kondisi lahan, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pusat, masalah lingkungan, serta kesiapan sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah (termasuk adat budaya).

Prospek industri pengolahan kelapa sawit .

CPO merupakan komoditi yang strategis, karena selain menghasilkan devisa, juga merupakan bahan baku pembuatan minyak masak utama yang banyak dikonsumsi dalam negeri. Dari perspektif investor, pasar CPO yang luas baik di dalam negeri maupun internasional, dapat diandalkan bagi keberlangsungan dan perkembangan usaha pengelolaan kelapa sawit dari hulu ke hilir. Sebagai komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan oleh pasar baik domestik dan global, keberlangsungan dan perkembangan pengelolaan kelapa sawit dari hulu ke hilir sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekspor pemerintah,

pajak dan kebijakan lainnya yang mendukung perkembangan industri terkait dalam negeri, termasuk penyebarannya ke daerah-daerah penghasil kelapa sawit.

Indonesia dianggap dapat menghasilkan kelapa sawit dengan biaya produksi yang efisien, karena dukungan berbagai faktor seperti ketersediaan dan kondisi lahan, tenaga kerja yang relatif murah dan potensi panen sepanjang panen. Selain sebagai produsen minyak sawit, Indonesia juga merupakan pasar minyak sawit terbesar di dunia, karena data tahun 1997 menunjukkan pasar Indonesia mengkonsumsi lebih dari separuh produksi CPO domestik, atau sekitar 20% produksi global. Sebelum krisis, pertumbuhan rata-rata permintaan global minyak sawit tercatat paling tinggi dibandingkan minyak lainnya. Dengan kondisi tersebut, prospek perkembangan minyak sawit di Indonesia masih cerah, karena luasnya permintaan pasar akan minyak kelapa sawit, baik karena pertambahan penduduk, maupun meningkatnya rata-rata penghasilan penduduk per kapita.

Dalam hal pengolahan hasil yang berkaitan dengan komoditi kelapa sawit, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Malaysia. Selama ini Indonesia lebih memfokuskan pada upaya perkembangan di sub-sektor perkebunan daripada untuk industri hilirnya. Sampai sekarang Indonesia hanya mampu mengembangkan industri pengolahan sederhana untuk minyak goreng dan olein, itupun masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Padahal data menunjukkan relatif tingginya nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan industri hilir yaitu industri minyak goreng yang mencapai sekitar 23-35% dari nilai input, selama periode 1987-1994 (Sarjono, 1996:15). Sementara negara produsen minyak sawit lainnya seperti Malaysia, selain minyak goreng juga mengembangkan industri pengolahan dengan teknologi tinggi untuk menghasilkan berbagai produk turunannya seperti margarine, *shortening*, *oleokimia* dan sabun. Indonesia dengan potensi ketersediaan lahan dan efisiensi produksi (biaya SDM yang relatif murah), seharusnya lebih prospektif dibandingkan Malaysia, yang kini semakin jenuh karena keterbatasan lahan produktif.

Dalam hal menangkap peluang pasar yang besar berkaitan dengan kelapa sawit, penekanan strategi Indonesia berbeda dengan Malaysia. Malaysia lebih memfokuskan pada pengembangan industri hilir, sementara ekspansi pengadaan bahan baku diperoleh dengan kecenderungan melakukan relokasi perkebunan dan industri CPO ke Indonesia. Sebaliknya Indonesia menangkap peluang itu dengan strategi memperluas industri hulunya. Dalam hal ini Malaysia relatif lebih maju karena terjadinya proses *dynamic comparative advantage* di bidang kelapa sawit, yang sangat menguntungkan baik dari segi meningkatnya nilai tambah maupun perluasan kesempatan kerja (Arifin, 2004: 195). Sementara Indonesia perluasan kesempatan kerja masih mengandalkan pada sektor primer atau industri hulu yang relatif terbatas kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dan menciptakan lapangan kerja.

Ketertinggalan Indonesia dalam perkembangan Industri hilir, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada era orde baru yang hanya menguntungkan sekelompok kecil pengusaha konglomerat, termasuk penguasaan industri minyak goreng dengan jaringan pemasarannya sampai ke pelosok tanah air. Sekitar 60% pangsa pasar minyak goreng dikuasai oleh 2 kelompok besar konglomerat yaitu grup Salim dan Sinar Mas, yang juga secara terintegrasi menguasai industri dari hulu ke hilir, yaitu perkebunan, pengolahan CPO, industri minyak goreng, hingga ke pemasaran minyak gorengnya. Penguasaan secara total ini berpengaruh besar terhadap kebijakan berkaitan ekspor pemerintah serta penetapan harga TBS di tingkat petani (Arifin, 2004). Kebijakan pengembangan agroindustri dengan pola tersebut tidak banyak memberi manfaat bagi kelompok besar masyarakat petani, baik dalam penyediaan kesempatan kerja maupun kesejahteraan petani. Kebijakan demikian bahkan memperlebar jurang perbedaan social-ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit, terutama antara segelintir konglomerat dengan masyarakat pekebun.

Di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten, perkembangan industri hilir hanya terbatas pada pengolahan minyak inti sawit (CPO), yang memang harus dilakukan di lokasi perkebunan untuk

menjaga kualitas TBS. Pesatnya permintaan terhadap CPO baik di pasar domestik dan global, menyebabkan para investor di daerah lebih tertarik untuk mengembangkan areal perkebunan dan pendirian pabrik CPO, daripada berkonsentrasi ke pengembangan industri hilirnya. Dalam skala kecil, industri seperti minyak goreng juga sulit bersaing dengan para pengusaha yang cenderung oligopolistik. Kendala yang dihadapi pengusaha agro-industri skala kecil adalah terbatasnya akses informasi pasar dan modal, sehingga cenderung inefisien dalam pengelolaannya, dan kalah bersaing dengan pemodal yang memiliki banyak akses dan menguasai pangsa pasar yang luas. Dalam pengembangan industri pengolahan, para pemodal besar juga lebih memilih berkonsentrasi di Jawa, dengan alasan mendekati pasar potensial. Apabila kegiatan industri hilir tersebut dapat didorong penyebarannya ke daerah perkembangan kelapa sawit lainnya, maka peran pengembangan sub-sektor agro-industri sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah makin dapat terwujud.

Meningkatnya hasil produksi kelapa sawit sebagai dampak perluasan areal kebun kelapa sawit, telah meningkatkan kebutuhan daerah untuk pengolahan CPO. Kabupaten Pasir kini hanya memiliki 3 buah pabrik CPO milik PTPN, dan Idealnya diperlukan sedikitnya 6 pabrik CPO, namun pemda menghadapi kendala pengadaannya, karena peraturan pusat yang kurang akomodatif dengan perkembangan ekonomi daerah. Persyaratan pemilikan kebun inti untuk setiap pendirian pabrik CPO, tidak sejalan dengan kebijakan Pemda yang telah berhasil dalam pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Swadaya. Pada saat ini yang dibutuhkan adalah pendirian pabrik CPO di Pasir, untuk menampung peningkatan hasil produksi kelapa sawit di kawasan ini. Bertambahnya pabrik CPO yang dikelola oleh pihak swasta, juga dapat mengurangi distorsi harga di tingkat petani yang selama ini didominasi oleh PTPN. Benturan kepentingan antar sektor (misal industri dan perkebunan) juga berpengaruh terhadap kemungkinan peningkatan agro-industri terkait dengan kelapa sawit. Kebijakan yang dirintis dinas perindustrian untuk memproses CPO skala kecil, sulit direalisasikan tanpa berbenturan dengan kepentingan pusat (diwakili oleh PTPN) di kawasan tersebut. Padahal

pengembangan agro-industri di kawasan penghasil komoditi strategis ini sangat diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja bagi keluarga petani dan masyarakat di sekitarnya, terutama angkatan muda yang relatif terdidik.

Mengacu pada PROPERDA Kabupaten Pasir periode 2001-2005, tampaknya kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit sejalan dengan kebijakan umum yang cenderung lebih menekankan pada 'pemberdayaan industri hulu, yang berorientasi pada pasar dengan meningkatkan partisipasi masyarakat'. Sedangkan peran pemerintah lebih pada penyediaan fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana, IPTEK dan regulasi yang didasarkan pada mekanisme insentif dan disinsentif (Pemda Kab. Pasir, 2002). Strategi kebijakan lainnya dalam PROPERDA yaitu 'memperkuat industri hilir guna menciptakan nilai tambah', tampaknya belum difokuskan untuk komoditi kelapa sawit, karena lebih dimaksudkan untuk skala makro perkebunan. Sebagai komoditi strategis yang dibutuhkan pasar luas, kebijakan penekanan pada industri hulu, memang dapat menjamin keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut. Namun demikian prospek penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dan peningkatan nilai tambah produk, membutuhkan pengembangan industri hilir yang lebih luas. Demikian pula masih banyak potensi pengembangan industri hilir dari produk kelapa sawit di daerah, termasuk pemanfaatan limbah kelapa sawit yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan daerah. Padahal kebijakan tersebut dapat lebih menjamin keberlangsungan dan perkembangan industri hulu, sekaligus pengembangan kegiatan ekonomi lainnya, yang sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat baik petani maupun elemen masyarakat lainnya. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sangat potensial untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lain, sehingga pada gilirannya dapat membantu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di kawasan tersebut.

5.3. PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA : PELUANG DAN TANTANGAN

Sebagai komoditi pertanian, pengelolaan perkebunan yang luas dan menyebar ke berbagai lokasi, sangat potensial menyerap banyak tenaga kerja di daerah, khususnya masyarakat petani. Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencapai target 1 juta Ha, diperkirakan mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di kalangan petani. Apabila rencana ini dapat direalisasikan, akan sangat membantu pemda terutama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Dengan demikian prospek penyerapan tenaga kerja di sub-sektor kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan dan perkembangan sub-sektor tersebut. Namun prospek yang sangat menjanjikan ini dapat diwujudkan apabila pelaku-pelaku ekonomi baik di daerah maupun di pusat mampu memanfaatkan peluang yang tersedia dan sekaligus dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Bagian ini akan membahas beberapa peluang dan tantangan ke depan yang dapat mempengaruhi prospek penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan kelapa sawit. Beberapa peluang dan tantangan dalam perkembangan kelapa sawit antara lain potensi dan kondisi lahan, kebijakan dan sistem birokrasi, potensi pasar dan daya saing, dan kesiapan sumber daya manusia.

Potensi dan kondisi sumber daya alam (SDA)

Ketersediaan dan kondisi lahan

Dilihat dari ketersediaan lahan secara fisik di Kabupaten Pasir dan Kaltim pada umumnya, dapat dinyatakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit masih sangat potensial di kawasan tersebut. Hal ini merupakan peluang penting yang selama ini menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Namun dilihat dari realisasi tanam yang sudah dilakukan oleh masing-masing daerah, tampaknya tidak mudah memanfaatkan peluang emas ini sesuai dengan rencana masing-masing daerah. Hal ini dapat dilihat dari data tentang realisasi tanam

yang relatif rendah dibandingkan dengan luas lahan yang memiliki ijin lokasi, yaitu pada tahun 2002 sekitar 14% di Kaltim dan sekitar 25% di Kabupaten Pasir. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak sepenuhnya siap untuk segera merealisasikan pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut. Bahkan di beberapa daerah banyak investor yang ijin lokasinya dicabut, akibat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan ijin lokasi. Kurang seriusnya sebagian investor dalam memanfaatkan lahan yang sudah dikuasainya, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi krisis (kekurangan modal), atau karena hanya ingin memanfaatkan kayu di lahan tersebut, yang dianggap lebih cepat meraih keuntungan dibandingkan membangun perkebunan kelapa sawit.

Sebagian lahan yang sudah memiliki ijin lokasi juga merupakan hutan yang dikonversikan ke perkebunan. Pengembangan besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang banyak dilakukan dengan konversi lahan hutan menjadi perkebunan (termasuk Kaltim), mengundang kritik dari para aktivis lingkungan, karena dianggap sebagai ancaman terhadap tutupan hutan di Indonesia. Pemanfaatan lahan hutan untuk perkebunan tersebut juga telah meningkatkan konflik sosial antara perusahaan-perusahaan besar dengan masyarakat lokal di sekitarnya. Meskipun Kalimantan Timur dan daerah lain di Indonesia Timur masih memiliki hutan konversi untuk perkebunan, banyak perusahaan besar yang memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga semakin menguatkan dugaan adanya pemanfaatan lahan konsesi HPH untuk perkebunan kelapa sawit. Data di Kaltim menunjukkan sekitar 168.848 Ha lahan hutan telah dikonversikan ke perkebunan kelapa sawit (Casson, 2003:292). Keengganan investor untuk pengembangan kelapa sawit di luar Sumatera (termasuk Kaltim), memungkinkan penyimpangan dalam pemanfaatan hutan konversi untuk pengambilan kayu, sehingga pengembangan kelapa sawit terhambat. Hasil studi dari Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR), menunjukkan bahwa para investor menghadapi kendala dalam merealisasikan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan rencana besar daerah, karena dua faktor utama yaitu konflik sosial dan lemahnya infrastruktur (Casson, 2000).

Salah satu faktor yang menyebabkan prospek kelapa sawit di Kaltim dianggap tidak secerah Sumatera, adalah faktor iklim dan kondisi lahan yang umumnya dianggap kurang kondusif untuk membudidayakan kelapa sawit. Berdasarkan peta kesesuaian lahan untuk kelapa sawit, Kaltim masih memiliki lebih dari separuh lahan perkebunan yang berpotensi baik (3.794.100 Ha), selebihnya berpotensi sedang (329.900 Ha) dan rendah (2.416.800 Ha) (Disbun Kaltim, 2003).

Maraknya berbagai tuntutan atas tanah adat akhir-akhir ini juga terjadi pada lahan perkebunan kelapa sawit., baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Kasus 'perebutan' kebun inti sawit milik PTPN XIII seluas 2000 Ha di Kabupaten Pasir oleh masyarakat lokal, dianggap suatu 'petaka' bagi Kabupaten Pasir, karena proses penyelesaiannya yang lama (sekitar 20 bulan), melibatkan masyarakat luas (10 desa dan 3 kecamatan), dan menimbulkan kerugian ekonomi yang relatif besar bagi semua pihak (Kompas, 2001). Kasus-kasus konflik yang terkait dengan peninjauan status tanah perkebunan, potensial dapat menghambat investor untuk perkembangan perkebunan di kawasan ini. Dkuatirkan apabila kasus demikian terus berlangsung, akan dapat mengganggu prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit di Pasir dan Kaltim pada umumnya. Diperlukan antisipasi dan penyelesaian kasus secara bijaksana oleh Pemda dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat adat.

Ketersediaan benih unggul

Pada saat ini Malaysia dengan luas lahan perkebunan 3,6 juta Ha dapat menghasilkan sekitar 13,4 juta ton CPO per tahun, sementara Indonesia dengan luas lahan sekitar 4,2 juta Ha, hanya menghasilkan 10,6 juta ton CPO per tahun (Republika, 2004). Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kelapa sawit Indonesia dibandingkan Malaysia adalah faktor keaslian bibit, terutama untuk perkebunan rakyat. Disinyalir terdapat sekitar 10% lahan sawit yang menggunakan benih palsu. Padahal penggunaan benih unggul kelapa

sawit berperan penting dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Tanpa benih unggul, kelapa sawit tidak berbuah, atau berbuah kecil, dengan cangkang besar, sehingga merugikan petani dan pengusaha umumnya.

Sejalan dengan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, permintaan akan benih unggul juga meningkat pesat, sehingga pasokan benih ke daerah sering terganggu. Selama ini benih unggul untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit secara nasional diperoleh dari 3 perusahaan yang sudah berpengalaman yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Soefindo dan P.T. London Sumatera (LonSum) yang berlokasi di Sumatera Utara. Untuk menutupi kekurangan persediaan bibit unggul Indonesia juga mengimport benih unggul dari Negara lain seperti Malaysia dan Papua Nugini.

Terbatasnya suplai dalam negeri dibandingkan kebutuhan bibit unggul selama ini, berdampak terhadap beredarnya banyak bibit palsu yang diusahakan secara liar oleh petani. Untuk menjaga kualitas produksi, PPKS bekerja sama dengan Disbun setempat bertindak tegas dengan membakar bibit liar dan menggantinya dengan bibit asli, serta pengedaranya ditangkap. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan benih unggul adalah kemudahan dalam memperoleh, ketepatan waktu dan harga yang terjangkau. Untuk mengatasi ketersediaan benih unggul di daerah, diperlukan kemudahan untuk pengembangan perusahaan penghasil benih unggul di lokasi perkembangan kelapa sawit, sehingga keterlambatan dan kekurangan benih dapat diminimalisir. Kini di Kabupaten Pasir, terutama di Desa Padang Jaya sudah mulai dirintis pengembangan bibit unggul oleh seorang petani (pendatang) bekerja sama dengan PPKS Medan. Usaha pembibitan ini dinamakan : Penangkar Bibit Waralaba PPKS Medan, dengan pembinaan dari petugas Disbun Kabupaten Pasir. Pada saat ini usaha pembibitan menyerap tenaga kerja sebanyak 6 orang, 4 diantaranya adalah perempuan, dengan status buruh lepas dan upah Rp 20.000 (setengah hari). Pemasaran bibit tersebut sampai saat ini tidak ada masalah, terutama untuk perkebunan swadaya masyarakat dan untuk peremajaan kebun. Namun untuk pemasaran selanjutnya, persyaratan yang harus

dipenuhi adalah mendapat sertifikasi dari PPKS Medan, mendapat ijin dari Dinas Perkebunan Pasir dan berbadan hukum (bekerja sama dengan KUD setempat).

Kebijakan pemerintah dan sistem birokrasi

Era otonomi daerah (OTDA) telah memberi kewenangan lebih besar bagi daerah untuk memilih dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan daerah. Kabupaten Pasir dan beberapa daerah di Kaltim telah menetapkan komoditi kelapa sawit sebagai primadona untuk menjadi penghasil utama PAD. Selama ini banyak investor dianggap enggan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di luar Sumatera, antara lain karena kelemahan infrastruktur di Kalimantan pada umumnya. Padahal untuk memperoleh hasil yang optimal, pengembangan kelapa sawit memerlukan penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung ketepatan waktu dalam proses pengangkutan TBS sampai ke pabrik CPO. Meskipun dalam kebijakan pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, namun masih diperlukan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tantangan ke depan adalah mampukah Pemda menetapkan kebijakan yang kondusif bagi investor, sekaligus mampu menjadikan kelapa sawit Kabupaten Pasir sebagai komoditi yang kompetitif di pasar global.

Kendala lain dalam pengembangan pengelolaan kelapa sawit di Pasir dan Kaltim umumnya adalah kendala birokrasi yang menyulitkan daerah dalam pemberian ijin terhadap investor. Dengan OTDA, ijin untuk pengelolaan perkebunan berada di daerah, sementara pemerintah pusat masih menguasai ijin pengelolaan hutan untuk konversi. Peraturan-peraturan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN, seringkali tidak sesuai dengan perkembangan OTDA yang memberi kewenangan lebih besar pada daerah untuk mengelola SDA di daerahnya. Di Kabupaten Pasir, Pemda menghadapi masalah dengan pengembangan pabrik CPO yang sangat dibutuhkan untuk menampung hasil yang makin meningkat. Sementara peraturan dari pusat masih mengikat daerah dengan

keharusan adanya kebun inti sebagai prasyarat pendirian pabrik CPO. Untuk kasus Kabupaten Pasir, dimana pengembangan kelapa sawit dengan pola PIR-swadaya yang melibatkan perkebunan rakyat, sulit dipenuhi, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan ke depan.

Potensi pasar dan daya saing : domestik dan global.

Kelapa sawit di Indonesia mempunyai prospek yang cerah, karena didukung oleh pasar yang prospektif baik domestik maupun global. Meningkatnya permintaan CPO dan minyak kelapa sawit baik domestik maupun global, merupakan modal penting dalam pengembangan industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Peluang Indonesia dalam menguasai pasar ekspor juga didukung oleh daya saing yang cukup kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Daya saing Indonesia juga didukung oleh proses produksi CPO yang efisien, karena beberapa faktor seperti potensi panen sepanjang tahun, kondisi lahan dan tenaga kerja yang relatif murah.

Dalam merealisasikan kebijakan perkebunan yang berorientasi pasar, maka pilihan terhadap pengembangan kelapa sawit sebagai primadona pembangunan Pasir adalah tepat, karena komoditi ini memiliki peluang pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Namun semakin banyak produksi dalam negeri, persaingan pasar semakin ketat, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih professional. Pasir seperti daerah lain di luar Sumatera, masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing kelapa sawit baik di pasar domestik maupun global. Realitas yang dihadapi oleh Kabupaten Pasir dan Kaltim pada umumnya antara lain: kondisi lahan, ketersediaan benih unggul di daerah, penetapan harga pasar yang masih didominasi PTPN, serta tidak adanya skim kredit untuk usaha perkebunan dengan bunga murah, sehingga perkembangan usaha menjadi lambat. Kelangkaan dana untuk pembangunan perkebunan yang berkesinambungan akan berdampak pada keberlangsungan banyak kebun plasma yang membutuhkan replantasi dalam waktu dekat. Kebijakan harga selama ini yang kurang menguntungkan petani dan produktivitas yang

relatif rendah di Kabupaten Pasir, berpengaruh terhadap kemampuan petani untuk pengembangan perkebunan rakyat yang dimiliki saat ini. Meskipun harga inti sawit mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, namun pada umumnya masih lebih rendah daripada harga yang ditetapkan untuk daerah Sumatera Utara, yang dianggap memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Diperlukan kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, agar keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ditargetkan dapat tercapai. Melihat peran strategis kelapa sawit dalam perekonomian Kabupaten Pasir, maka prospek penyerapan tenaga kerja di sub-sektor kelapa sawit maupun sektor lainnya sangat ditentukan oleh keseriusan Pemda dalam mengelola komoditi tersebut, sehingga potensi pasar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Kesiapan sumber daya manusia

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kelapa sawit. Kabupaten Pasir dan Provinsi Kalimantan Timur umumnya memiliki SDM yang relatif rendah baik dari segi pendidikan maupun pengalaman dalam pengelolaan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang dikaitkan dengan pola PIR-BUN, merupakan langkah penting dalam memberdayakan masyarakat untuk mengenal kultur perkebunan sawit.

Masyarakat lokal yang semula tidak tertarik dan tidak mengenal kultur perkebunan kelapa sawit, kemudian berubah setelah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang dikelola oleh PTPN, mulai menghasilkan pada tahun 1990 an. Peningkatan kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh sebagian petani plasma (umumnya pendatang), menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal di sekitarnya. Hal ini mendorong Pemda untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya yang melibatkan lahan milik masyarakat lokal. Bahkan kasus konflik tanah yang menghasilkan perubahan penguasaan kebun inti milik PTPN menjadi kebun plasma milik masyarakat lokal, merupakan indikasi

adanya perubahan animo masyarakat luas untuk terlibat dalam pengelolaan kebun sawit. Hal ini merupakan peluang bagi Pemda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam program pengelolaan kelapa sawit selanjutnya, sehingga dalam jangka panjang dapat menggantikan dominasi pola PIR-BUN di kawasan tersebut. Data proyeksi pengembangan areal perkebunan kelapa sawit untuk mencapai target sejuta hektar, menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran komposisi tersebut, yaitu luas perkebunan rakyat diprediksikan mencapai 4 kali lipat dari luas areal kelapa sawit milik PTPN. Sedangkan dominasi perkembangan kelapa sawit tetap pada pola PBS, yang menguasai sekitar 80% lahan perkebunan..

Animo masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kelapa sawit, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDMnya, agar hasil produksi sesuai dengan standard kualitas yang dibutuhkan pasar. Dalam Properda Kabupaten Pasir 2001-2005, kebijakan pemberdayaan masyarakat perkebunan dilakukan melalui upaya pengembangan SDM dan penguasaan IPTEK seperti pendidikan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan ini diperlukan agar masyarakat lokal dapat berkompetisi secara sehat dengan pendatang yang relatif lebih berpengalaman. Hal ini dapat berdampak mengurangi keraguan investor dalam melibatkan masyarakat lokal yang selama ini dianggap tidak cocok untuk pengembangan kelapa sawit. Di samping itu keterlibatan masyarakat lokal dalam PIR-Swadaya juga berpotensi mengurangi konflik akibat kecemburuan sosial dengan pendatang. Tantangan ke depan bagi Pemda dalam pengembangan SDM adalah perlunya peningkatan koordinasi baik antar sektor terkait seperti sektor pendidikan, perkebunan dan tenaga kerja, maupun antara pemerintah (Dinas Perkebunan) dengan pihak pengusaha. Kegagalan dalam meningkatkan kualitas SDM, akan berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing kelapa sawit, sehingga prospek penyerapan tenaga kerja akan terhambat.

5.4. KESIMPULAN

Keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah sangat terkait dengan kondisi dan peran berbagai pihak seperti petani, perusahaan, koperasi, dan Pemda. Peran yang saling terkait dari berbagai pihak ini memerlukan sinergi untuk dapat menopang keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut, sehingga prospek penyerapan tenaga kerja juga dapat dipertahankan. Pihak Pemda berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari perencanaan pembangunan khususnya sub-sektor perkebunan. Sektor ini merupakan salah satu sumber ekonomi utama daerah serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dalam era otonomi daerah peran Pemda sangat strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya, sehingga para investor tertarik untuk merealisasikan rencana perkebunan dan mempertahankan keberlangsungan pengelolaan perkebunannya. Keterpaduan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi masing-masing, merupakan prasyarat bagi keberlangsungan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sehingga prospek penyediaan kesempatan kerja di wilayah tersebut tetap terjamin.

Potensi perkembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pasir cukup besar, karena potensi pasar yang luas (domestik dan global), potensi lahan yang tersedia serta dukungan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun demikian untuk merealisasikannya daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: keterbatasan benih unggul, kualitas SDM dan adat budaya, daya saing produk di pasar domestik dan global dan kendala birokrasi serta ancaman menipisnya tutupan hutan akibat konversi hutan untuk perkebunan.

Peluang pasar CPO dan minyak goreng, masih terbuka baik untuk domestik maupun global. Namun demikian potensi untuk perkembangan pabrik pengolahan hasil terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemda, kualitas SDM dan kesiapan infrastruktur sebagai penunjang industri hilir, Kecenderungan pengembangan industri hilir

nasional yang terlanjur bersifat oligopolistik, telah menciptakan sekelompok pengusaha konglomerat yang menguasai jaringan pemasaran sampai ke pelosok desa. Hal ini menyulitkan daerah dalam upaya pengembangan industri hilir yang mampu bersaing dengan para pemodal besar.

Pembagian wewenang yang tidak jelas tentang pemanfaatan lahan, terutama yang terkait dengan lahan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Ketidakjelasan kewenangan ini akan mempersulit investor dalam pengurusan ijin untuk pengembangan kelapa sawit. Kelemahan koordinasi antar sektor terkait dengan pengembangan kelapa sawit (perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perindustrian), potensial menjadi hambatan bagi percepatan perkembangan perkebunan kelapa sawit di daerah.

Adanya pengakuan undang-undang terkait dengan hak ulayat atau tanah adat yang belum jelas aturan pelaksanaannya, potensial menimbulkan konflik status tanah antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Ketidakjelasan sejarah dan kriteria tanah adat dan belum adanya aturan yang rinci, sangat menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Hal ini akan mengurangi rasa aman dan nyaman para investor dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kemudahan ijin yang diharapkan investor dengan dilaksanakannya OTDA juga akan terhambat oleh penyalahgunaan hak adat oleh berbagai kelompok kepentingan.

Peraturan pusat yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan oleh BUMN, antara lain dalam hal pendirian pabrik pengolahan CPO yang mensyaratkan adanya kebun inti dan penentuan harga kelapa sawit, seringkali berbenturan dengan kepentingan daerah dalam upaya pengembangan industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Kebutuhan untuk menambah industri pengolahan CPO di Kabupaten Pasir dengan mengikutsertakan perusahaan swasta, sulit dilaksanakan karena pola PIR-Swadaya yang dikembangkan Pemda tidak memiliki kebun inti.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir telah menghasilkan komposisi penduduk yang

majemuk, yaitu meningkatnya jumlah etnis pendatang terutama dari Jawa. Dampak positif dari program ini adalah berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir melalui pola PIR-Swadaya, yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik lahan. Penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit sangat tergantung pada keberlangsungan dan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan target yang ingin dicapai. Keseriusan Pemda dalam menjaga kontinuitas perkebunan dan upaya mencapai target pengembangan, berperan penting dalam memperluas penyerapan tenaga kerja di wilayahnya.

Pengelolaan komoditi kelapa sawit potensial menyerap tenaga kerja besar baik melalui perluasan perkebunan kelapa sawit maupun melalui perkembangan industri hilir (agroindustri terkait). Pengelolaan perkebunan yang tidak optimal selain berpengaruh terhadap hasil produksi, juga menciptakan pengangguran dan setengah pengangguran, baik bagi petani maupun keluarganya. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja lain di sekitar lokasi, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit pada umumnya. Prospek agro-industri terkait dengan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, masih sangat terbatas pada pengolahan minyak sawit mentah (CPO), padahal pengembangan industri hilir lainnya, seperti minyak goreng di daerah lain mampu memberi nilai tambah yang positif bagi kesejahteraan petani dan mengurangi tingkat pengangguran di kawasan tersebut.

Jumlah dan kualitas produk sangat dipengaruhi oleh profesionalisme SDM baik di tingkat birokrasi maupun petani. Ketertinggalan SDM lokal juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengembangan kelapa sawit. Semakin banyak daerah menghasilkan kelapa sawit, persaingan pasar kelapa sawit akan semakin ketat baik di tingkat domestik maupun global. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan bagi petani, sehingga dapat mengelola perkebunan secara profesional. Upaya menyatukan luaran sekolah kejuruan dengan penyerapan tenaga kerja belum nampak, karena ketidakpastian peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antar instansi terkait perlu diintensifkan, sehingga

peningkatan SDM dapat dimanfaatkan sesuai dengan penciptaan lapangan kerja baik di perkebunan kelapa sawit maupun industri pengolahan hasil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. KESIMPULAN

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi unggulan bagi Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir sehingga pengembangan sub sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu prioritas bagi pembangunan di wilayah ini. Kabupaten Pasir memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2002, lebih dari separuh luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, terdapat di Kabupaten Pasir termasuk Penajam Paser Utara (sekitar 64.059,5 Ha). Sebagai komoditi unggulan, perkebunan kelapa sawit menjadi andalan bagi perekonomian di Kabupaten Pasir, yang diindikasikan dengan besarnya sumbangan komoditi ini terhadap PDRB Kabupaten Pasir. Pengembangan kelapa sawit juga didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan kebijakan daerah.

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir dapat dikelompokkan atas: 1) Perkebunan Rakyat; 2) Perkebunan Negara; dan 3) Perkebunan Besar Swasta (PBS). Berdasarkan luas areal, sebagian besar perkebunan kelapa sawit adalah perkebunan milik rakyat yang pengelolaannya terkait dengan pola PIR-BUN, PIR-Swadaya dan swadaya murni. Sebagai perusahaan inti untuk pola PIR-BUN adalah PTPN XIII dan sebagai plasma adalah petani yang sebagian besar merupakan transmigran dari Jawa. Salah satu lokasi PIR-BUN adalah Desa Padang Jaya yang melibatkan 350 KK, sebagian besar adalah transmigran dari Pulau Jawa, sebagai lokasi survey. Sedangkan untuk PIR-Swadaya, hampir semua yang terlibat adalah petani masyarakat local. Adapun pembinaan PIR-Swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan, dan dana dari APBD I (Provinsi) dan APBD II (Kabupaten). Dalam visi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan

pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta Ha dalam waktu 15 tahun (2003-2018).

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yang meliputi usaha perkebunan dan pengolahan hasil mempunyai potensi yang cukup besar baik dalam penyerapan tenaga kerja, maupun meningkatkan kesejahteraan petani. Diperkirakan perkebunan kelapa sawit mampu menyerap sekitar 2 orang per kapling (2 Ha), sehingga untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir diperkirakan pada tahun 2002 dapat menyerap sekitar 32.000 keluarga petani (dengan perkiraan 2 Ha untuk tiap keluarga). Apabila diperkirakan setiap keluarga mempunyai tanggungan 3-4 orang ART, maka sekitar 96.000 - 128.000 jiwa penduduk menggantungkan hidup dari hasil kelapa sawit. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perkebunan kelapa sawit akan meningkat seiring dengan perluasan perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan visi pembangunan daerah. Namun demikian dari luas lahan perkebunan yang telah memperoleh ijin untuk pembukaan kelapa sawit, baru sekitar 25 % yang sudah terealisasi penanamannya. Hal ini disebabkan banyak investor yang menyalahgunakan ijin lokasi untuk pemanfaatan selain kelapa sawit, seperti pengambilan kayu pada lahan HPH. Faktor lainnya adalah berkaitan dengan isu hak ulayat yang akhir-akhir ini berpengaruh terhadap kepemilikan lahan kelapa sawit (kasus 10 desa). Keadaan ini potensial menjadi kendala bagi masuknya investor di perkebunan kelapa sawit.

Potensi penyerapan tenaga kerja dapat diharapkan lebih besar dari pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit, seperti industri pengolahan CPO dan turunannya antara lain pabrik minyak sawit, mentega, sabun dan olein. Di wilayah ini, penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan pengolahan hasil kelapa sawit, masih terbatas pada industri pengolahan CPO, yang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan kebutuhannya. Penyerapan tenaga kerja di pabrik CPO akan meningkat sejalan dengan terealisirnya rencana pemda kabupaten untuk menambah sekitar 3 buah industri CPO. Terhambatnya realisasi pendirian pabrik CPO di Kabupaten Pasir, berkaitan dengan peraturan yang mensyaratkan adanya kebun inti

untuk setiap pabrik. Hal ini kurang sesuai dengan kondisi di lokasi, karena hasil kelapa sawit dari PIR-Swadaya dan PIR-BUN pada saat penelitian, sudah melebihi daya tampung dari 3 buah pabrik CPO yang tersedia di lokasi (oleh PTPN). Dalam hal ini peraturan yang ada kurang mendukung penciptaan lapangan kerja terkait dengan pengolahan hasil kelapa sawit, khususnya CPO. Permasalahan ini dapat menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani sawit, karena penetapan harga yang kurang menguntungkan petani.

Sebaliknya industri pengolahan CPO, perlu mendapat dukungan dari hasil produksi perkebunan kelapa sawit yang tergantung pada keberlangsungan perkebunan yang ada dan umur tanaman. Pada saat ini produksi tanaman kelapa sawit cenderung menunjukkan penurunan, seiring dengan umur tanaman yang semakin tua dan memerlukan peremajaan dalam waktu dekat (4-5 tahun). Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pendapatan yang diperoleh petani plasma kurang mendukung untuk melakukan peremajaan yang semakin dekat. Keadaan ini dapat mengganggu keberlangsungan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO yang ada.

CPO sebagai komoditi strategis selain sumber penghasil devisa, juga merupakan bahan dasar minyak goreng yang banyak dikonsumsi dalam negeri. Industri minyak goreng sangat penting karena bersifat padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 1997 industri minyak sawit di Indonesia telah mampu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Potensi penyerapan tenaga kerja pada usaha pengolahan hasil lanjutan (turunan) seperti minyak goreng cukup besar, baik dilihat dari penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian pendirian industri pengolahan tersebut belum didukung oleh iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investor dalam bidang tersebut. Beberapa faktor yang dianggap sebagai kendala antara lain terbatasnya infrastruktur, pasar masih terpusat di Jawa, dan saingan yang berat dari pabrik yang sudah ada.

Petani yang pada umumnya berumur produktif, namun tidak diimbangi dengan ketrampilan ataupun tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan petani pada umumnya relatif masih rendah sehingga secara tidak langsung dapat memengaruhi hasil produksi kelapa sawit, karena dapat memperlambat adopsi teknologi. Adopsi teknologi bagi petani penting karena dalam kegiatan perkebunan memerlukan pelatihan-pelatihan yang belum pernah diperoleh di daerah asal. Sedangkan latar belakang keterampilan yang dimiliki di daerah asal berbeda, petani terbiasa mengolah lahan pangan. Dilain pihak generasi berikutnya (anak-anak petani) tidak berminat untuk menjadi petani kelapa sawit meskipun sekolah kejuruan sudah tersedia di kabupaten, tetapi mereka lebih berminat menjadi karyawan pada perusahaan swasta.

Kegiatan petani tentang pengelolaan kebun kelapa sawit terutama dalam hal pemeliharaan, sejak awal tidak sesuai dengan standar pengelolaan yang benar dan profesional. Hal ini disebabkan karena pembinaan dari petugas perusahaan inti yang kurang profesional. Pemeliharaan yang tidak efektif ini terutama dalam hal pemupukan yang mengakibatkan rendahnya hasil produksi kebun sawit. Rendahnya hasil produksi ini juga dipengaruhi oleh faktor alam dan kondisi kesuburan tanah di Kalimantan Timur pada saat dilakukan penelitian. Rendahnya hasil produksi TBS ini yang akhirnya juga mengakibatkan rendahnya penghasilan mereka yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan petani. Guna mencukupi kebutuhan keluarga ini, strategi yang mereka terutama adalah ke koperasi petani kelapa sawit (KUD). Hal ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja lainnya diluar perkebunan kelapa sawit, sehingga menyulitkan petani untuk menambah penghasilannya. Demikian juga luas kebun plasma 2 Ha tiap keluarga dipertanyakan kecukupannya dalam memenuhi kebutuhan petani termasuk untuk *replanting*.

Keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir sangat terkait dengan kondisi dan peran berbagai pihak (diperlukan sinergi) dari berbagai pihak seperti petani, perusahaan, koperasi dan Pemda, sehingga prospek penyerapan tenaga kerja juga terjamin. Petani

diharapkan mampu mengelola kebun kelapa sawit secara profesional sehingga hasil produksi optimal. Dengan demikian petani dapat meningkatkan kesejahteraan hidup sekaligus mampu melakukan *replanting* tepat pada waktunya. Sedangkan perusahaan sebagai penampung hasil produksi mempunyai peranan penting dalam penetapan harga. KUD sebagai koperasi petani juga memiliki peranan penting dalam membantu kelancaran usaha tentang pemasaran hasil produksi ke perusahaan pengolahan, selain itu juga dalam hal penyediaan kebutuhan petani. Dilain pihak pemda berperan dalam menjaga keberlangsungan perkebunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, karena sub sektor perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi daerah serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir memiliki potensi yang cukup besar, hal ini didukung oleh potensi pasar baik domestik maupun global, dukungan luas lahan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun tantangan ini masih belum terealisasi karena masih menghadapi berbagai masalah antara lain kualitas SDM, adat dan budaya, daya saing produk di pasar nasional dan global, keterbatasan bibit unggul, kendala birokrasi serta ancaman pelestarian lingkungan karena meningkatnya konversi hutan untuk perkebunan. Prospek agro industri terkait dengan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, masih sangat terbatas pada pengolahan minyak sawit mentah (CPO), padahal pengembangan industri hilir lainnya, seperti minyak goreng di daerah lain mampu memberi nilai tambah yang positif bagi kesejahteraan petani dan mengurangi tingkat pengangguran di kawasan tersebut.

Undang-undang yang berkaitan dengan hak ulayat dan tanah adat belum diakui keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini akan mengurangi rasa aman bagi investor dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu adanya penyalahgunaan hak adat oleh berbagai kelompok juga menghambat para investor dalam hal perijinan, terutama dalam pelaksanaan OTDA. Sedangkan peraturan pemerintah pusat mengenai pengelolaan perkebunan oleh BUMN dalam hal pendirian pabrik pengolahan CPO dan penetapan harga,

berbenturan dengan kepentingan daerah tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit. Peraturan pemerintah pusat mensyaratkan investor yang akan mendirikan pabrik mengharuskan memiliki perusahaan inti, dilain pihak daerah dengan berkembangnya perkebunan PIR Swadaya membutuhkan pabrik pengolahan hasil kelapa sawit (CPO).

6.2. IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Perlunya Pemda untuk mengupayakan perkembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan target yang ditentukan. Dan perlunya koordinasi peran berbagai pihak terkait secara sinergi, antara lain perusahaan, petani, birokrasi. Koordinasi dan sinergi berbagai pihak akan berdampak positif terhadap perbaikan harga, pembinaan petani yang profesional.
- Perlunya Pemda membantu petani plasma melalui program dari pemerintah (ekonomi kerakyatan) dengan jalan memberi kemudahan kredit untuk *replanting* atau menyediakan kesempatan kerja diluar perkebunan kelapa sawit.
- Perlunya dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit sehingga memudahkan Pemda dalam merealisasikan perkembangan perkebunan kelapa sawit, antara lain mempercepat realisasi pendirian pabrik CPO dan kepastian hukum tentang penguasaan lahan perkebunan baik untuk investor maupun petani.
- Perlunya Pemda untuk memfasilitasi kemudahan bagi KUD dalam menyediakan pupuk dengan harga pabrik, mengingat pabrik pupuk ada di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Dengan kemudahan ini diharapkan petani dapat meningkatkan minat pemeliharaan kebun kelapa sawit sehingga produksi meningkat.

- Perlunya mengarahkan sisitim pendidikan kejuruan, dalam hal ini perkebunan yang dapat menarik minat anak-anak muda untuk menjadi petani yang profesional. Disamping itu dalam rangka pengembangan agro industri kelapa sawit perlu memasukkan pengembangan industri hilir kelapa sawit, hal ini sangat diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja terutama angkatan muda yang terdidik.
- Perlunya penegakan hukum untuk semua pihak terkait dengan pengelolaan kelapa sawit, sehingga pemanfaatan lahan dapat disesuaikan dengan ijin lokasi yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga (1994)
Studi Pelaksanaan Pola PIR di Beberapa Jenis Perkebunan Indonesia, Bandung: Akatiga.
- Andi Nuhung, Iskandar, DR, Ir (2003)
Perusahaan Inti Rakyat Dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan : Studi Kasus PIR-BUN Sumatra Selatan, Yarsif Watampone, Jakarta
- Arifin, Bustanul (2004)
Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, Jakarta, Kompas.
- Arifin, Sultoni dan W. Susila (1998)
Indonesia as a Major Oil Palm Producer: Prospect and Challenges, Bogor: Center for Economic Studies, Research and Development, Department of Agriculture.
- Arief, Sritua (1998)
Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi. Jakarta, CPSM.
- BPS (2003)
Kabupaten Pasir Dalam Angka, 2002, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- BPS (2002)
Kalimantan Timur Dalam Angka, 2001, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- BPS (2001)
Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2000, Jakarta : Biro Pusat Statistik.

BAPPEDA Kabupaten Pasir (2000)

Properda Kabupaten Pasir 2001-2005, Tanah Grogot:
BAPPEDA.

----- (1999)

Sasaran dan Strategi Pengembangan, Dalam Renstra
Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2000- 2003.
Samarinda: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Buku Kompas (2001)

Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Jilid I, Jakarta: Penerbit
Buku Kompas.

Basri, Faisal (2003)

Ledakan Pengangguran Menghantui Perekonomian?,
Kompas, 21 Juli.

CASSON Anne (2000)

*The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sektor in an
Era of Economic Crisis and Political Change*, Bogor:
CIFOR.

----- (2003)

'*Politik Ekonomi Sub Sektor Perkebunan Kelapa sawit di
Indonesia*', dalam buku: Bab 10: 273-299.

Dernberg dan Mc Dougall (1972)

Macro Economics, 4 th edition, Mc Graw- Hill, 1972.

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir (2003)

Statistik Perkebunan Kabupaten Pasir Tahun 2002, Pasir:
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2003)

*Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pengembangan PIR-Swadaya
di Kabupaten Pasir*, Pasir: Dinas Perkebunan Kabupaten.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2003.

Gambaran Singkat Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, laporan, Samarinda: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2003.

Laporan Bulanan Perkembangan Kegiatan PIR-Swadaya, Desember 2003, Samarinda: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

-----, 2003

'Sasaran dan Strategi Pengembangan' dalam *Renstra Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2000-2003*. Samarinda, Disbun. Kaltim.

Daliyo dkk (2000)

Pengembangan Ketenagakerjaan sub-sektor Ago Industri Kalimantan Timur: Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Global, Jakarta: PPK-LIPI.

Dewan Riset Nasional (2002)

'Peran Industri Manufaktur Sebagai Penghela Pembangunan Nasional Berkelanjutan Dengan SDA Sebagai Platform Berdasarkan Pendekatan Pengembangan IPTEK: Kasus Sawit sebagai Penggerak, Pemicu dan Pemacu Pembangunan IPTEK', *Ringkasan Rapat DRN Inti*, 5 Nopember 2002.

Iqbal, M. Irfan (2000)

Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser, PT. BHP Kendilo Coal Indonesia dan Bina Lingkungan Hidup Indonesia, Kalimantan.

Kompas (2003)

'Waspada! Perusakan Hutan Akibat Ijin Kebun Sawit di Kalimantan', Jakarta: Kompas.

----- (2004)

'Melirik Sawit Sejuta Hektar', Jakarta: Kompas 30 Maret 2004.

- (2004)
'Peladang Berpindah dan Kearifan Tradisional', Jakarta:
Kompas 8Oktober 2004.
- Kompas (2001)
Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Jilid I. Jakarta, Penerbit
Buku Kompas.
- Mubyarto (2004)
'Kemiskinan, Pengangguran dan Ekonomi Indonesia' dalam
"Dinamika Masyarakat" , Vol. III. No2, Agustus: pp: 398-
409.
- Pemda Kabupaten Pasir (2000)
Profil Rangan Barat I Kecamatan Kuaru, Pasir.
- Purwono & Siregar (2004)
Para Perintis di Tanah Harapan, Dalam Majalah Tempo
Edisi 28 Juni - 4 Juli 2004, Jakarta: Majalah Tempo.
- PITONO, Djoko dkk. (2002)
Tim Forum Kerja Manufaktur DRN
- Republika (2003)
10 Persen Lahan Sawit Gunakan Benih Palsu, Jakarta:
Republika.
- Rustiani, Frida dkk (1997)
Mengenal Usaha Pertanian Kontrak, Bandung: Akatiga.
- Saryono Mukti (1996)
Perkembangan dan Prospek Kelapa Sawit Indonesia, Dalam
Media Perkebunan No. 13 Desember 1996, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J. (2001)
*Investasi Bidang Ketenagakerjaan untuk Membangkitkan
Perekonomian Nasional*, Dalam Berita Iptek Th Ke 42. No 1,
2001, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sumono (2002)

Kualitas Petani Kelapa Dalam perspektif Kependudukan, Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Jakarta: P2K-LIPI.

Yuliati, Yayuk, Ir. MS (2003)

Sosiologi Pedesaan, Malang: Lappera Pustaka Utama.

Lampiran 1. : Susunan Anggota Kelompok Kerja Penghitungan dan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir (SK Bupati No.210 Th 2004)

- Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir
- Ketua : Asisten PembangnanEkonomi dan Kesra
Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir
- Ketua Harian : Kepala Sub. Dinas Usaha Tani
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian
Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir
2. Kepala Seksi Pengolahan dan
Pemasaran Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasir
3. Kasubag. Produksi 1 Bagian
Perekonomian Sekertaris Daerah
Kabupaten Pasir.
4. Distrik Manager PTPN XIII Wilayah
Kal.Tim
5. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
6. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
7. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
8. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
9. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
10. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
11. Pimpinan PT Pradiksi Guntama
12. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Kabupaten Pasir
13. Pimpinan PT. Sebutin



